

Analisis *Current Ratio* Terhadap *Debt To Asset Ratio* Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate*

Sofyan Marwansyah
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
Sofyan.smw@bsi.ac.id

ABSTRACT

Each company generally has the financial statements as a form of management of the operational activities for a specific period. After the financial statements are prepared based on the relevant data, and performed with the correct accounting procedures, it will show the condition of the company's financial statements sebenarnya. Agar more meaningful and understandable to stakeholders then need to do the financial analysis. Financial statement analysis is performed to measure and determine sejauh where the performance of a company at the moment. In this final project research is interested to analyze some of the commonly used ratio is the ratio of liquidity and solvency. This study aims to determine whether the liquidity ratio effect on solvency ratios simultaneously and partially. Independent variables used in this study is the current ratio (X) and the dependent variable is the debt to asset ratio (Y). Rancangan research is hypothesis testing, with a sample of 20 property and real estate company listed on the Indonesia Stock Exchange year period 2010 to 2012. the data were processed using linear regression analysis using SPSS version 21. Based on the analysis performed on each - each variable, it can be concluded that the current ratio and debt to asset ratio has a relationship being and in the opposite direction to the value of R obtained by -0.439. debt to asset ratio is influenced by the current ratio amounted to 19.2% the remaining 80.8% is influenced by other factors. regression line formed dalah $Y = 0.512 - 0.042 X$.

Keywords: *Current Ratio, Debt to Asset Ratio*

ABSTRAK

Setiap perusahaan umumnya memiliki laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap aktivitas operasional selama satu periode tertentu. Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, dan dilakukan dengan prosedur akuntansi yang benar, maka akan terlihat kondisi perusahaan yang sebenarnya. Agar laporan keuangan lebih berarti dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan maka perlu dilakukan analisis keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kinerja suatu perusahaan pada saat ini. Pada penelitian Tugas Akhir ini penulis tertarik untuk menganalisis beberapa rasio yang umum digunakan yaitu rasio likuiditas dan solvabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap rasio solvabilitas secara simultan dan parsial. Variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *current ratio* (X) dan variabel dependennya adalah *debt to asset ratio* (Y). Rancangan penelitian yang digunakan adalah pengujian hipotesis, dengan sampel penelitian 20 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 sampai dengan 2012. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linear dengan bantuan SPSS versi 21. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada masing – masing variabel, dapat disimpulkan bahwa *current ratio* dan *debt to asset ratio* memiliki hubungan yang sedang dan berlawanan arah dengan nilai R yang diperoleh sebesar -0.439. *debt to asset ratio* dipengaruhi oleh *current ratio* sebesar 19.2 % sisanya 80,8% dipengaruhi oleh faktor lain. persamaan garis regresi yang terbentuk dalah $Y = 0.512 - 0.042 X$.

Kata Kunci : *Current Ratio , Debt to Asset Ratio*

I. PENDAHULUAN

Dalam suatu usaha atau bisnis tentu setiap perusahaan memiliki tujuan atau *goal* yang ingin dicapai oleh pemilik perusahaan. Pertama tentu pemilik perusahaan mengharapkan laba yang maksimal, lalu pemilik perusahaan mengharapkan usahanya tidak hanya pada satu periode saja. Selanjutnya pemilik perusahaan akan berupaya memenuhi permintaan konsumen yang semakin banyak dan beragam. Artinya perusahaan tersebut berharap dapat menjalankan usaha nya secara berkelanjutan tidak hanya pada satu periode saja dan berupaya memenuhi semua keinginan konsumennya. Agar tujuan itu dapat tercapai manajemen perusahaan harus mampu membuat perencanaan yang dapat dipantau perkembangannya. Setiap perusahaan harus mampu membuat catatan, pembukuan, dan laporan keuangan dengan baik.

Setiap perusahaan umumnya memiliki laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pihak berkepentingan baik intern maupun ekstern selama satu periode tertentu. Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, dan dilakukan dengan prosedur akuntansi yang benar maka akan terlihat kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Kondisi keuangan yang dimaksud adalah jumlah aktiva, kewajiban dan modal yang dimiliki harus seimbang. Kemudian akan diketahui jumlah pendapatan

yang diterima dan biaya yang dikeluarkan dalam satu periode tertentu.

Agar laporan keuangan lebih berarti dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan maka perlu dilakukan analisis keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kinerja suatu perusahaan pada saat ini. Melalui analisis laporan keuangan maka akan diketahui apakah perusahaan mampu melunasi semua utang jangka pendek maupun utang jangka panjangnya dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan. Jika suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditas dan kemampuan memperoleh labanya rendah maka pihak *ekstern* seperti kreditur akan sulit memberikan dana dan kemudahan fasilitas bagi perusahaan tersebut.

Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Artinya apabila perusahaan itu ditagih maka perusahaan tersebut harus mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Sedangkan solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya pada saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan.

Likuiditas berpengaruh erat dalam memperoleh laba perusahaan, karena menentukan kemampuan kas perusahaan dalam aktivitas operasionalnya. Semakin banyak perusahaan menahan uang kas maka semakin *liquid* perusahaan tersebut dan semakin berkurang uang kas yang digunakan perusahaan dalam peredaran. Dalam usaha memperoleh laba uang kas tersebut harus beredar semakin cepat agar semakin besar kemungkinan memperoleh laba. Dengan kata lain apabila perusahaan terlalu banyak menahan uang kas maka kesempatan memperoleh laba akan semakin kecil. Artinya kas perusahaan harus tersedia cukup dan tidak berlebihan dalam membiayai operasional perusahaan. Dengan demikian kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan semakin maksimal dan juga mampu memenuhi semua kewajibannya jika suatu saat perusahaan itu dibubarkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut (Kasmir) yaitu “laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut (Kasmir) tujuan dan manfaat bagi para pihak dengan adanya analisis laporan keuangan :

1. Mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.

2. Mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Mengetahui kekuatan yang dimiliki perusahaan.
4. Mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.

Pihak- Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir) adapun pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan sebagai berikut:

1. Pemilik
Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercemin dari kepemilikan saham yang dimilikinya.
2. Manajemen
Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu.
3. Kreditor
Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kepentingan pihak kreditor dalam memberi pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati – hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan.
4. Pemerintah
Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik.

Jenis Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir) jenis laporan keuangan sebagai berikut :

1. Neraca
Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan. Penyusunan komponen didalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Artinya penyusunan komponen neraca harus didasarkan likuiditasnya atau komponen yang paling mudah dicairkan.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas.

Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki beberapa keterbatasan menurut (Indriani) sebagai berikut:

1. Laporan keuangan disusun berdasarkan data historis yang kejadiannya (transaksi) sudah berlalu atau sudah terjadi.
2. Dalam laporan keuangan kadang – kadang terdapat pendapat pribadi (*personal judgement*)
3. Laporan keuangan yang disusun atas dasar konsep perusahaan akan berjalan secara berkelanjutan (*going concern*) menyajikan nilai buku (*book value*) aktiva tetap berdasarkan harga perolehannya yang belum tentu sama dengan harga sekarang.
4. Laporan keuangan tidak dapat menyajikan berbagai faktor yang tidak dinyatakan dalam satuan uang. Misalnya reputasi atau prestasi perusahaan (*goodwill*).
5. Laporan keuangan bersifat konservatif terhadap ketidakpastian penilaian suatu pos, yang biasanya memilih alternatif yang menghasilkan laba bersih, atau nilai aktiva yang paling kecil.
6. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penilaian terhadap sumber ekonomis dan ketidaksesuaian antar perusahaan.
7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah teknis akuntansi dengan asumsi pemakai laporan keuangan memahami istilah teknis akuntansi.

Pengertian Rasio Keuangan

Menurut (Kasmir) pengertian rasio keuangan adalah, “indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya”.

Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, dari hasil rasio akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Jenis Rasio Keuangan

Jenis rasio keuangan menurut (Kieso) sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas yaitu mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajibannya yang jatuh tempo.
2. Rasio aktivitas yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan menggambarkan aktiva yang dimiliki.
3. Rasio profitabilitas atau solvabilitas yaitu mengukur tingkat keberhasilan / kegagalan perusahaan atau divisi tertentu sepanjang periode tertentu.
4. Rasio cakupan yaitu mengukur tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor jangka panjang.

Likuiditas

Pengertian Likuiditas

Pada penelitian kali ini variabel independen (X) yang penulis gunakan adalah rasio likuiditas yaitu *current ratio*. Variabel *independent* atau variabel bebas adalah variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, sebaliknya variabel ini akan mempengaruhi variabel lainnya.

Menurut (Soedarto) *liquidity ratio* adalah bilangan yang dinyatakan dalam persen yang menunjukkan besarnya dana baru yang harus disediakan terhadap besarnya total assets (apabila tandanya positif) atau menunjukkan kelebihan dana yang dapat ditempatkan dipasar (apabila tandanya negatif), jadi rasio yang positif mencerminkan besarnya kekurangan dana dan apabila negatif mencerminkan kelebihan dana.

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya (termaksud bagian dari utang jangka panjang yang jatuh temponya dalam waktu sampai dengan satu tahun) dari aktiva lancarnya menurut (Suhardjono).

Jadi rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari satu tahun dengan aktiva lancar yang dimilikinya dan dinyatakan dalam dalam bilangan persen.

Likuiditas berhubungan dengan masalah kepercayaan kreditur jangka pendek kepada perusahaan, artinya semakin tinggi rasio likuiditas semakin percaya para kreditur jangka pendek. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar atau aktiva yang mudah dijadikan uang tunai seperti kas, surat berharga, piutang dan persediaan.

Jenis Rasio Likuiditas

Berikut ini adalah jenis rasio likuiditas menurut (Harapan, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan) yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio ini menggambarkan sejauh mana aktiva lancar perusahaan menutupi kewajiban - kewajiban lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio lancar dapat dibuat dalam bentuk presentasi, jika berada diatas 100 % maka perusahaan termaksud aman artinya aktiva lancar harus jauh diatas jumlah utang lancar.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling *likuid* mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Rasio ini

disebut juga *Acid Test Ratio*, angka rasio ini tidak harus 100%.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

3. Rasio Kas atas Aktiva Lancar

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aktiva lancar.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{KAS}}{\text{Aktiva Lancar}}$$

4. Rasio Kas atas Hutang Lancar

Rasio ini menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi hutang lancar.

$$\text{Kas Atas Aktiva Hutang Lancar} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

5. Rasio Aktiva Lancar dan Total Aktiva

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total aktiva.

$$\text{Rasio Aktiva Lancar dan Total Aktiva} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Total Aktiva}}$$

6. Rasio Aktiva Lancar dan Total Hutang

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total kewajiban perusahaan.

$$\text{Rasio Aktiva Lancar dan Total Aktiva} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}$$

Ketidakkampuan Perusahaan dalam Membayar Kewajiban

Menurut (Kasmir) menyatakan beberapa faktor ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo yaitu :

1. Perusahaan sudah tidak memiliki dana sama sekali.
2. Perusahaan memiliki dana namun pada saat jatuh tempo tidak memiliki dana atau tidak cukup secara tunai sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu untuk mencairkan aktiva lainnya seperti menagih piutang, menjual surat berharga atau menjual persediaan aktiva lainnya

Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Menurut (Kasmir) tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas adalah:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang.

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan dengan modal kerja perusahaan.
5. Mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan kedepan terutama perencanaan kas dan utang.
7. Melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan beberapa periode.
8. Melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing - masing komponen yang ada diaktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Solvabilitas

Pengertian Solvabilitas

Menurut (Soemarso) solvabilitas adalah “kemampuan perusahaan melunasi seluruh kewajibannya dan mengukur perbandingan dana yang disediakan pemilik dengan pembelanjaan dari kreditur”. Solvabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya pada saat perusahaan tersebut dibubarkan atau dilikuidasi.

Analisis solvelensi difokuskan pada kemampuan perusahaan untuk membayar atau memenuhi kewajiban lancar dan tidak lancarnya. Hal ini umumnya dinilai dengan memeriksa hubungan neraca dengan menggunakan analisis utama menurut (Carls) sebagai berikut:

1. Analisis posisi lancar (*current position analysis*)
2. Analisis piutang usaha
3. Analisis persediaan
4. Rasio aktiva tetap terhadap kewajiban jangka panjang
5. Rasio kewajiban terhadap ekuitas pemegang saham
6. Jumlah beban bunga yang dapat dibayarkan (*times interest charges are earned*)

Suatu perusahaan dikatakan *solvable* jika perusahaan tersebut memiliki aktiva yang cukup untuk melunasi semua hutang – hutangnya. Sebaliknya jika perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya dengan aktiva yang dimiliki maka perusahaan tersebut dikatakan *insolvable*.

Jenis Rasio Solvabilitas

1. Ratio Hutang Modal (*Debt to Equity Ratio*)
Rasio ini disebut juga rasio *leverage* yang menggambarkan sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang – hutang kepada pihak luar dan juga menggambarkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio ini mengukur seberapa bagus struktur pemodal perusahaan.

Menurut (Riyanto) Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan pengimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari mengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta dan lain – lain). Jadi dapat disimpulkan bahwa *debt to equity ratio* adalah perbandingan antara total hutang dan modal yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya dengan modal yang ada.

Rasio hutang modal menurut (Harapan) yaitu, “semakin kecil rasio hutang modal maka akan semakin baik dan untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah hutang atau minimal sama”.

$$\text{Debt To Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}}$$

2. Total Asset to Total Debt Ratio (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio ini merupakan rasio perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Sehingga rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Menurut (Sawir) *debt to asset ratio* adalah “rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban dan seluruh aktiva yang dimiliki”.

$$\text{Debt To Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

Semakin kecil rasio ini maka hutang perusahaan semakin kecil, berarti semakin kecil risiko pinjaman yang dimiliki atau perusahaan semakin mudah untuk membayar semua hutangnya. Sebaliknya jika hutang perusahaan semakin besar maka semakin besar pula risiko pinjaman sehingga perusahaan kesulitan untuk membayar hutangnya.

3. *Times Interest Earned*

Merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga dan rasio yang mencerminkan besar nya jaminan perusahaan untuk membayar bunga utang jangka panjang.

Menurut (Sawir) mengatakan bahwa rasio ini merupakan rasio penutupan (*coverage ratio*) yang mengukur kemampuan pemenuhan kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi (EBIT) dan mengukur sejauh mana laba operasi boleh turun tanpa menyebabkan kegagalan dari pemenuhan kewajiban membayar bunga pinjaman.

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban}}$$

Konsep Dasar Perhitungan Uji Koefisien Korelasi

Dalam penelitian ini koefisien korelasi dimaksudkan untuk menguji apakah *variable independent* secara parsial memiliki hubungan signifikan terhadap variabel *dependent*.

Hipotesis

Ho = Variabel X tidak ada hubungan signifikan terhadap variabel Y

Ha = Variabel X ada hubungan signifikan terhadap variabel Y

Pengambilan keputusan

Jika profitabilitas nilai sigma > 0.05 atau -t table < t hitung < t table maka Ho tidak ditolak.

Jika profitabilitas nilai sigma < 0.05 atau -t table < t hitung < t table maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Pada tabel II.1 dapat diketahui nilai koefisien korelasi yang didapat dari variabel X dan variabel Y. Berdasarkan tabel koefisien korelasi dan taksirannya terdapat lima tingkatan hubungan yaitu sangat rendah, rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat.

Tabel II.1
Koefisien Korelasi dan Taksirannya

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,1999	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Mahadianto

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk melihat presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka variabel bebas yaitu *Current Ratio* (CR) mempengaruhi variabel terikat yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR) yang dinyatakan dengan R² untuk mengetahui koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh *Current Ratio* (CR) terhadap *Debt to Asset Ratio* (DAR). Sedangkan R untuk mengetahui koefisien determinasi parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji Persamaan Regresi

Persamaan Regresi menurut (Mahadianto) yaitu “analisis untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan (pengaruh dan hubungan) antara variabel independen terhadap variabel dependen”.

Hasil persamaan regresi umumnya dikenal dengan rumus Y= a + b X. Persamaan regresi tersebut menunjukkan kontribusi positif atau negatif dari kuat lemahnya variabel X terhadap variabel Y.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah teknik analisa deskriptif kuantitatif dengan cara melakukan analisa regresi linear sederhana. Hipotesa dalam penelitian ini terdiri dari Ha1 = ada hubungan antara *Current Ratio* (CR) terhadap *Debt to Asset Ratio* (DAR) secara signifikan pada perusahaan *property* dan *real estate*. Ha2 = ada pengaruh antara *Current Ratio* (CR) terhadap *Debt to Asset Ratio* (DAR) secara signifikan pada perusahaan *property* dan *real estate* Ha3 = persamaan regresi yang terbentuk antara *Current Ratio* (CR) terhadap *Debt to Asset Ratio* (DAR) pada perusahaan *property* dan *real estate* signifikan. Sampel perusahaan yang penulis ambil adalah 20 perusahaan yang bergerak dibidang *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Agung Podomoro Land Tbk.(APLN) , PT Ciputra Property Tbk.(CTRP) , PT Ciputra Surya Tbk. (CTRS), PT Duta Anggada Realty Tbk.(DART) , PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.(DGIK) , PT Duta Pertiwi Tbk.(DUTI) , PT Bakrieland Development Tbk.(ELTY) , PT Fortune Mate Indonesia Tbk.(FMII) , PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.(GMTD) , PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT), PT Lippo Cikarang Tbk.(LPCK) , PT Lippo Karawaci Tbk.(LPKR) , PT Modernland Realty Tbk. (MDLN), PT Indonesia Prima Property Tbk. (MORE), PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.(PJAA) , PT Plaza Indonesia Realty Tbk.(PLIN) , PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk.(RBMS) , PT Summarecon Agung Tbk.(SMRA) , PT Suryamas Duta Makmur Tbk.(SMDM), PT Suya Semesta Internusa Tbk.(SSIA).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian *Current Ratio*

Berikut ini adalah hasil perhitungan *Current Ratio* pada 20 perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 – 2012.

Tabel III.2

Data Perhitungan *Current Ratio* pada 20 perusahaan *property* dan *real Estate* di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012 (Dalam Jutan Rupiah)

No	Kode Perusahaan	AKTIVA LANCAR			HUTANG LANCAR			CURRENT RATIO		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	APLN	4476	4686	6727	1491	2562	4298	300%	183%	157%
2	CTRP	1389	1017	1843	177	370	1014	785%	275%	182%
3	CTRS	1329	1855	2184	663	1112	1732	200%	167%	126%
4	DART	620	790	785	1048	1184	674	59%	67%	116%
5	DGIK	1487	1052	1206	973	456	678	153%	231%	178%
6	DUTI	2525	2854	3208	1375	1476	1290	184%	193%	249%
7	ELTY	5526	5628	3826	2320	4189	4470	238%	134%	86%
8	FMII	54039	55738	65075	96360	101394	68405	56%	53%	95%
9	GMTD	176	289	587	150	265	456	117%	109%	129%
10	JRPT	1646	1926	2072	1457	1856	2367	113%	104%	88%
11	LPCK	1152	1486	2371	633	1062	1507	182%	140%	157%
12	LPKR	12193	13608	19479	2901	2254	3479	420%	604%	560%
13	MDLN	566	826	1940	639	994	1525	89%	83%	127%
14	MORE	151	123	115	285	183	171	53%	67%	67%
15	PJAA	611	578	720	305	426	460	200%	136%	157%
16	PLIN	913	653	723	546	382	609	167%	171%	119%
17	RBMS	75515	34258	65246	7786	10464	8335	970%	327%	783%
18	SMRA	3221	4897	6079	2407	3572	5197	134%	137%	117%
19	SMDM	163	191	215	147	82	136	111%	233%	158%
20	SSIA	1235	1671	3075	881	1122	1783	140%	149%	172%

Sumber: Diolah Penulis 2017

Debt to Asset Ratio

Berikut ini adalah hasil perhitungan *debt to asset ratio* pada 20 perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 – 2012.

Tabel III.3

Data Perhitungan *Current Ratio* pada 20 perusahaan *property* dan *real Estate* di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012 (Dalam Jutan Rupiah)

No	Kode Perusahaan	TOTAL HUTANG			TOTAL AKTIVA			<i>Debt to Asset Ratio</i>		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	APLN	3540	5807	8846	7755	10838	15195	45,65%	53,58%	58,22%
2	CTRP	260	707	1945	3823	4314	5933	6,80%	16,39%	32,78%
3	CTRS	923	1580	2213	2609	3529	4428	35,38%	44,77%	49,98%
4	DART	1822	1860	1455	2561	4103	4293	71,14%	45,33%	33,89%
5	DGIK	987	525	750	1959	1485	1757	50,38%	35,35%	42,69%
6	DUTI	1516	1624	1436	4723	5188	6592	32,10%	31,30%	21,78%
7	ELTY	6582	6805	6071	17064	17707	15235	38,57%	38,43%	39,85%
8	FMII	68	102	105	347	351	355	19,60%	29,06%	29,58%
9	GMTD	230	313	666	358	487	900	64,25%	64,27%	74,00%
10	JRPT	1670	2184	2776	3295	4084	4998	50,68%	53,48%	55,54%
11	LPCK	1106	1220	1603	1670	2041	2832	66,23%	59,77%	56,60%
12	LPKR	7930	8850	13399	16155	18259	24869	49,09%	48,47%	53,88%
13	MDLN	1014	1337	2365	2147	2526	4591	47,23%	52,93%	51,51%
14	OMRE	360	235	231	767	738	774	46,94%	31,84%	29,84%
15	PJAA	491	557	1078	1569	1737	2388	31,29%	32,07%	45,14%
16	PLIN	2207	1935	1717	4430	4232	3950	49,82%	45,72%	43,47%
17	RBMS	7787	10464	10938	117301	135937	152812	6,64%	7,70%	7,16%
18	SMRA	3982	5622	7060	6139	8099	10876	64,86%	69,42%	64,91%
19	SMDM	301	398	523	2063	2454	2637	14,59%	16,22%	19,83%
20	SSIA	1429	1737	3185	2383	2938	4855	59,97%	59,12%	65,60%

Uji Koefisien Korelasi

Pada uji koefisien korelasi penulis akan meneliti tentang hubungan antara *current ratio* terhadap *Debt to asset ratio* , adapun hipotesa yang dapat dibentuk dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

Ho : tidak ada hubungan signifikan antara *curent ratio* (CR) terhadap *debt to aset Rasio* (DAR)

Ha : ada hubungan signifikan antara *curent ratio* (CR) terhadap *debt to aset Rasio* (DAR)

Berdasarkan hipotesa yang dibentuk setelah penulis olah dengan menggunakan *SPSS* versi 21, maka dapat dilihat hasil perhitungannya pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.4
Korelasi

		DAR	CR
Pearson Correlation	DAR	1,000	-,439
	CR	-,439	1,000
Sig. (1-tailed)	DAR		,000
	CR	,000	
N	DAR	60	60
	CR	60	60

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan hasil output SPSS Versi 2.1 menyatakan signifikan yang dihasilkan adalah 0.000, maka $0.000 < 0.05$ sehingga H_a diterima, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara *Current Ratio* (CR) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR), dan apabila dilihat pada *pearson correlation* dihasilkan nilai R sebesar -0.439 artinya antara CR dan DAR mempunyai hubungan yang sedang dan berlawanan arah. Jika CR mengalami kenaikan sebesar 1 % maka akan menurunkan nilai DAR sebesar 0.439 %

Uji Koefisien Determinasi

H_0 : Tidak ada pengaruh antara CR (*Current Ratio*) terhadap DAR (*Debt To Asset Ratio*)

H_a : Ada pengaruh antara CR (*Current Ratio*) terhadap DAR (*Debt To Asset Ratio*)

Hasil pengolahan data dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Model Summary

Change Statistics					
R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
,192	13,824	1	58	,000	

a. Predictors: (Constant), CR

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui nilai Sig. F Change sebesar $0,000 < 0,05$, maka keputusannya adalah terima H_a , kesimpulannya bahwa ada Pengaruh antara *Current Ratio* terhadap *Debt To Asset Rasio*, bila di lihat dari nilai R Square Change diperoleh nilai 0,192 atau 19,2%, hal ini berarti bahwa *Debt To Asset Rasio* dipengaruhi oleh *Current Ratio* sebesar 19,2 %, sisanya sebesar 80,8 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji Koefisien Regresion

Dalam menguji koefisien regresion hipotesa yang dapat dibentuk adalah:

H_0 : Persamaan regresi yang terbentuk tidak signifikan

H_a : Persamaan regresi yang terbentuk signifikan

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.5
Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,347	1	,347	13,824	,000 ^b
Residual	1,454	58	,025		
Total	1,800	59			

a. Dependent Variable: DAR

b. Predictors: (Constant), CR

Berdasarkan tabel di atas Tingkat signifikan pada tabel *Anova* sebesar $0.000 < 0.05$ (5%) maka H_a diterima, berarti persamaan garis yang terbentuk antara *current Ratio* dengan *Debt To Asset Rasio* adalah Signifikan.

Persamaan Garis yang terbentuk dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Koefisein

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,512	,031		16,762	,000
CR	-,042	,011	-,439	-3,718	,000

a. Dependent Variable: DAR

Berdasarkan tabel diatas nilai konstanta sebesar 0.512 dan nilai variabel independen (CR) sebesar - 0.42

Jadi dapat diketahui maka persamaan regresi yang terbantuk adalah : $Y = 0.512 - 0.042 X$

Nilai Konstanta (a) sebesar 0.512 menyatakan bahwa apabila tidak ada perubahan *current Ratio* (CR) maka Nilai *Debt To Asset Rasio* (DAR) sebesar 0,512. Nilai b sebesar - 0.042 menyatakan bahwa apabila *current Ratio* (CR) bertambah satu (1) persen maka akan menurunkan nilai *Debt To Asset Rasio* (DAR) sebesar 0,042 %

V. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat solvabilitas khususnya *Debt to Asset Ratio* pada 20 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek periode 2010 – 2012, dilihat dari likuiditas (*Current Ratio*) yang berpengaruh terhadap *Debt to Asset Ratio*.

Berdasarkan uraian – uraian teori dan analisis yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Secara parsial diperoleh nilai sebesar -0.439, artinya bahwa antara *Current Ratio* dan *Debt to Asset Ratio* memiliki hubungan yang sedang dan berlawanan arah.

2. *Debt to asset ratio* dipengaruhi oleh *current ratio*, terbukti pada tabel III.7 *model summary*, R Square yang dihasilkan sebesar 0.192. Nilai 0.192 memiliki arti bahwa DAR dipengaruhi oleh CR sebesar 19,2 % dan sisa nya 80.8 % (100 % - 19.2 %) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

3. Pada tabel III.8 *coefficients* di kolom *unstandardized coefficients* (B) dihasilkan nilai konstanta a sebesar 0.512

dan nilai b adalah -0.042 , sehingga terbentuk persamaan regresi yang signifikan yaitu $Y = 0.512 - 0.042 X$ memiliki arti bahwa jika nilai CR mengalami penurunan sebesar 0.042 maka DAR akan mengalami peningkatan sebesar 0.512. Sebaliknya jika CR mengalami kenaikan sebesar 1 % maka akan menurunkan nilai DAR sebesar 0.042.

Saran

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk berbagai pihak yang akan melakukan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan populasi dan sampel yang lebih banyak, sehingga dapat mempresentasikan seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pemilihan variabel independen hanya terdiri dari satu aspek yaitu likuiditas (*current ratio*). Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan beberapa variabel X agar mendapatkan nilai signifikan yang lebih baik lagi terhadap tingkat solvabilitas (*debt to asset ratio*).
3. Sebaiknya melakukan penelitian dengan melibatkan banyak data observasi, menambah lama waktu pengamatan, karena semakin lama waktu pengamatan dan semakin banyak data observasi yang diambil, hasilnya akan semakin baik dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Carls, Warren., Reeve James M., dan Fess Philip E. *Accounting Pengantar Akuntansi buku ke 2 ,edisi 21*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Exchange, Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Jakarta Stock. *www.idx.co.id*. senin February 2017.
- Harapan, Sofyan Syafri. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali, 2009.
- . *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Indriani, Epi. *Akuntansi Gampang untuk Pemula dan Orang Awam*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Kasmir. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2008.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield. *Akuntansi Intermediate edisi ke 12 jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Mahadianto, Moh. Yudi dan Adi Setiawan. . *Analisis Parametrik Dependensi dengan Program SPSS untuk Pengolahan Data Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis edisi 1 cetakan 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Riyanto, Bambang. *Dasar – Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Sawir, Agnes. *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Soedarto. *Manajemen Risiko untuk BPR cetakan 1. Jakarta*. Jakarta: PT Palem Jaya, 2007.
- Soemarso. *Revisi Akuntansi Suatu Pengantar Buku ke 2 edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Suhardjono, Indra Bastian. *Akuntansi Perbankan Buku ke 2*. Makassar: Salemba Empat, 2006.

Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Meminimalkan Ppn Terhutang Pada Cv. Mikita Cookies

Dwiyatmoko Pujiwidodo

Program Studi Manajemen Perpajakan
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
e-mail : dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id

ABSTRACT

To implement the savings tax obligations and the tax burden, the company can implement tax planning. Tax planning is legal or process attempts to manipulate, organize business and the transaction so that the tax payer is a tax debt in an amount of at least but still within the scope of the provisions of the taxation laws in force. This study aims to identify and analyze the impact of tax planning in an effort to minimize the value-added tax payable on CV. Mikita Cookies. Based document of VAT in 2014, CV. Mikita Cookies transact with suppliers who have registered themselves as PKP or not PKP, so that not all purchases issuing tax invoices, it affects the calculation of VAT. Of the various ways of tax planning VAT, in this study, the authors apply the optimization of crediting of input tax. From the discussion, it can be seen that the document in 2014, VAT owed to be paid is Rp. 212 046 749, -, with total purchases of PKP Rp. 10,917,702,280 and the total purchase Non PKP Rp. 810 189 115, After the VAT tax planning with patterns of maximizing tax creditable input VAT payable then the resulting total of Rp. 131 027 838, -. Assumed in 2014 that CV. Mikita Cookies only deal with PKP, so that on every purchase of goods / services CV. Mikita Cookies get a tax invoice

Keywords- VAT, Tax Planning

ABSTRAK

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan penghematan beban pajak maka perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan upaya legal atau proses untuk merekayasa, mengorganisasi usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak penerapan *tax planning* sebagai usaha meminimalkan pajak pertambahan nilai terhutang pada CV. Mikita Cookies. Berdasarkan data PPN tahun 2014, CV. Mikita Cookies bertransaksi dengan *supplier* yang telah mendaftarkan diri sebagai PKP maupun yang belum PKP, sehingga tidak semua transaksi pembelian menerbitkan faktur pajak, hal ini berdampak pada perhitungan PPN. Dari berbagai cara *tax planning* PPN, pada penelitian ini, penulis menerapkan optimalisasi pengkreditan pajak masukan. Dari hasil pembahasan dapat dilihat bahwa data PPN pada tahun 2014 PPN terhutang yang harus

dibayar adalah sebesar Rp. 212.046.749,- , dengan total pembelian dari PKP sebesar Rp. 10.917.702.280 dan total pembelian Non PKP sebesar Rp. 810.189.115,- . Setelah dilakukan *tax planning* PPN dengan pola memaksimalkan pengkreditan pajak masukan maka dihasilkan total PPN terhutang sebesar Rp. 131.027.838,- . Diasumsikan pada tahun 2014 bahwa PT Sucofindo Episi hanya bertransaksi dengan PKP, sehingga atas setiap pembelian barang/jasa PT Sucofindo Episi mendapatkan faktur pajak.

Kata Kunci- Pajak Pertambahan Nilai, Perencanaan Pajak

I. PENDAHULUAN

Penerimaan Negara yang meliputi penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran yang semakin waktu semakin bertambah besar. Pengeluaran untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar tersebut, diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang semakin lama semakin sulit untuk diharapkan. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan Negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Pemerintah telah berupaya dan akan berusaha terus menerus membuat berbagai peraturan sehingga peningkatan penerimaan dari pajak selalu dapat dipertahankan, modalnya dengan menggunakan *Full Self Assessment System*. Dimana Wajib Pajak diberikan wewenang penuh membuat pencatatan, pembukuan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang harus dibayar.

Pajak merupakan salah satu beban utama bagi perusahaan atau badan usaha yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai, maka suatu perusahaan dapat melakukan *Tax Planning* (perencanaan pajak) dengan cara antara lain, yaitu memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena

Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menunda pembuatan faktur pajak atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima, selambat-lambatnya akhir bulan setelah Masa Pajak berakhir.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu fungsi *tax management* yang bertitik pada usaha pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Secara garis besar tujuan perencanaan pajak adalah untuk memenuhi aspek formil dan materil dari perpajakan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan Perencanaan Pajak adalah meredakan beban pajak (*Tax Burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-undang

Tax planning sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. (Anwar Pohan)

(Santoso) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah satu usaha menyeluruh yang dilakukan terus menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara

(Zain) mengatakan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukannya penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Lebih lanjut (Zain) mengemukakan bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak

merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan perkataan lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah terjadi transaksi.

Perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk menganalisis dan memanfaatkan celah ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak seminimal mungkin pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang. Untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan menyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak. Jika transaksi tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya. Oleh sebab itu, setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan secara komprehensif. Agar pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya tidak terjadi pemborosan. Penyediaan dana harus direncanakan supaya pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Disamping pembayaran pajak masih ada kewajiban pelaporan yang juga harus direncanakan supaya dapat selesai dan dilaporkan tepat pada waktunya. (Sumarsan)

(Mardiasmo.) mengutarakan beberapa perencanaan dalam bidang perpajakan dengan tujuan penghematan perpajakan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Memanfaatkan secara optimal ketentuan perpajakan yang berlaku khususnya berbagai celah kelemahan peraturan yang menguntungkan wajib pajak
2. Mengambil keuntungan dengan pemilihan bentuk-bentuk usaha yang tepat
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak dan potensi penghasilan

4. Menyebar penghasilan ke beberapa tahun untuk menghindari pengenaan pajak dengan tarif yang tinggi

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya, bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu : (Suandy)

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu :

- a. Jenis Pajak yang akan dipungut

Berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung yaitu : PPh Badan dan Orang Pribadi, PPN, Pajak atas keuntungan modal (*capital gains*), Withholding tax atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain, Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk, Pajak atas undian / hadiah, Bea materai, *Capital transfer taxes / transfer duties* dan Lisensi usaha serta pajak perdagangan lainnya.

Terdapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar dimana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri-sendiri. Misalnya, bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak atau bisa diminta restitusi apabila kita melakukan ekspor barang (output), sedangkan Pajak Penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak. Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang baik untuk bisa menganalisis transaksi apa yang akan terkena pajak yang mana dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

- b. Subjek Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem klasik di mana ada pemisahan antara badan usaha dengan pribadi pemiliknya (pemegang saham) yang akan menimbulkan pajak ganda.

Adanya perbedaan perilaku perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Di samping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earning*)

bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

- c. Objek pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Sebagai contoh, transaksi modal personal atas dividen dan keuntungan modal; di mana atas pembayaran dividen kepada pemegang saham perorangan ditetapkan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sedangkan keuntungan modal dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0,1% atau 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan saham. Karena objek pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak, maka untuk optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (karena bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak harus membayar sanksi yang berarti pemborosan dana).

- d. Tarif Pajak

Adanya penerapan *schedular taxation* tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah (*low bracket*). Semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena Wajib Pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah.

- e. Prosedur Pembayaran Pajak

Sistem *self-assesment* dan sistem pembayaran mengharuskan perencanaan pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik. Saat ini sistem pemungutan *withholding tax* di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. Hal ini disamping mengganggu arus kas perusahaan juga bisa mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut, padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut dibutuhkan waktu dan biaya.

2. Undang-Undang Perpajakan

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. **Administrasi Perpajakan**
Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fisik dengan Wajib Pajak akibatnya luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. (Suandy)

2.2. Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian PPN menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean. Penyerahan jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean, dan atas impor Barang Kena Pajak dan ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Zain)

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang objek PPN dalam pasal 4, 16C, dan 16D UU PPN 42 tahun 2009 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (Zain)

1. **Pengusaha kena Pajak (PKP)**
Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau melakukan usaha atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
Yang termasuk Pengusaha Kena Pajak adalah :
 - a. Pabrikasi atau produsen adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru.
 - b. Importer adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.
 - c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikasi atau importir adalah hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau ketertarikan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh faktor kepemilikan atau penyertaan maupun adanya penugasan melalui manajemen.

- d. Agen utama dan penyalur utama pabrikasi atau importir adalah pengusaha yang kegiatannya sebagai penyalur utama atas Barang Kena Pajak yang diperoleh dari produsen.
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha atas barang tidak berwujud didalam daerah pabean.
- f. Pedagang besar (distributor) adalah pengusaha orang pribadi atau badan dalam kegiatan usaha perdagangan atas Barang Kena Pajak dalam jumlah besar.
- g. Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak adalah pengusaha orang pribadi atau badan dalam setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.
- h. Pedagang eceran adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya melakukan usaha perdagangan dengan cara menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen.

2. **Bukan (Non) Pengusaha Kena Pajak (BPKP)**
Yang dimaksud dengan Bukan Pengusaha Kena Pajak tetapi memiliki status sebagai subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dikenakan pajak, namun oleh Undang-undang tidak diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan tersebut dimaksudkan adanya kemungkinan Pengusaha kecil yang ingin menjadi Pengusaha Kena Pajak

(Soemarso) menjelaskan bahwa untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah: (Rahayu)

1. Harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP / JKP, tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
3. Nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
4. Nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.
5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor JKP

Mekanisme PPN sesuai dengan ketentuan UU PPN adalah sebagai berikut : (Rahayu)

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP / JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
2. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).
3. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian / perolehan BKP / JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan, yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
4. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan

pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU No. 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.

5. Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak..

III. METODOLOGI PENELITIAN

(Soemarso) menjelaskan bahwa untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam pemaparan secara kualitatif.

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penulisan sesuai dengan fakta di lapangan sedang literatur yang digunakan merujuk kepada perencanaan pajak dan Pajak Pertambahan

1. Metode literatur

Studi literatur dilakukan dengan telaah literatur Perencanaan pajak dan Pajak Pertambahan Nilai serta Undang – Undang Perpajakan

2. Metode observasi

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan berkompeten (Manajemen CV. Mikita Cookies) mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai di CV. Mikita Cookies (3)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

Penyerahan BKP yang dilakukan oleh CV. Mikita Cookies merupakan penyerahan BKP yang dapat dikreditkan. Berdasarkan data pembelian yang ada terlihat bahwa penyerahan BKP berasal dari PKP dan Non PKP (supplier yang belum mempunyai NPWP ataupun belum dikukuhkan sebagai PKP). Atas pembelian dari PKP tersebut CV. Mikita Cookies akan mendapatkan pajak masukan.

CV. Mikita Cookies merupakan badan usaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) pada tanggal 15 Maret 2010. CV. Mikita Cookies diwajibkan memungut PPN atas penjualannya. Setiap transaksi penjualan

CV. Mikita Cookies mengeluarkan faktur pajak sebagai pajak keluaran kepada *customer* selain itu CV. Mikita Cookies juga mendapatkan faktur pajak dari beberapa *supplier* yang sudah PKP sebagai pajak masukan. Selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan ini kemudian menjadi

PPN terhutang yang disetor dan dilaporkan CV. Mikita Cookies setiap bulannya.

Mekanisme PPN yang terjadi di CV. Mikita Cookies adalah sebagai berikut :

1. PPN Keluaran (*Vat Out*)
PPN Keluaran diperoleh perusahaan dari penyerahan BKP kepada *customernya*. Bukti pendukung atas pemungutan PPN, perusahaan mengeluarkan faktur pajak.
2. Pajak Masukan (*Vat In*)
PPN masukan diperoleh perusahaan dari pembelian BKP. Besarnya nilai PPN Masukan adalah 10% dari DPP, sehingga perusahaan akan membayar sebesar DPP ditambah dengan 10%.

CV. Mikita Cookies melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai PKP dengan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak atas PPNnya setiap bulan. Dikarenakan sistem pembukuan yang bersifat *accrual*, sehingga setiap penjualan yang diakui akan ditanggung PPNnya oleh Wajib Pajak sebelum *invoicing* atas pengakuan penjualan tersebut dibayar oleh *costumer*. Atas dasar menanggung PPN terhutang dari penjualan maka CV. Mikita Cookies perlu melakukan pengendalian PPN agar *cashflow* perusahaan tidak terganggu. Pengendalian PPN yang dilakukan adalah dengan mengatur Pajak Masukan yang diterima agar tidak menumpuk pada satu bulan, walaupun kompensasi untuk masa selanjutnya diperbolehkan dalam mekanisme PPN.

Tabel dibawah ini menggambarkan data pembelian dan PPN di CV. Mikita Cookies untuk tahun 2016

Tabel 1 : Data Pembelian 2016

BULAN	PKP	PPN	NON PKP	TOTAL
JAN	1.205.538.280	120.553.828	14.521.000	135.074.828
FEB	740.660.530	74.066.053	12.532.500	86.598.553
MAR	1.070.127.700	107.012.770	60.500.300	167.513.070
APR	1.260.478.230	126.047.823	120.350.000	246.397.823
MEI	657.432.760	65.743.276	53.500.500	119.243.776
JUN	917.598.820	91.759.882	75.350.351	167.110.233
JUL	761.720.150	76.172.015	110.353.383	186.525.398
AGUS	728.912.060	72.891.206	72.131.535	145.022.741
SEPT	815.382.420	81.538.242	100.321.500	181.859.742
OKT	1.018.553.020	101.855.302	85.000.000	186.855.302
NOV	552.640.910	55.264.091	75.003.546	130.267.637
DES	1.188.657.400	118.865.740	30.624.500	149.490.240
TOTAL	10.917.702.280	1.091.770.228	810.189.115	1.901.959.343

Sumber : Hasil Penelitian (2016)

Tabel 2 : Data PPN CV. Mikita Cookies tahun 2016

BULAN	DPP	PPN	PPN MASUKAN	PPN TERHUTANG
JAN	1.449.436.675	144.943.668	120.553.828	24.389.840
FEB	945.626.100	94.562.610	74.066.053	20.496.557
MAR	1.266.045.763	126.604.576	107.012.770	19.591.806
APR	1.421.972.487	142.197.249	126.047.823	16.149.426
MEI	950.902.676	95.090.268	65.743.276	29.346.992
JUN	1.059.497.976	105.949.798	91.759.882	14.189.916
JUL	927.901.664	92.790.166	76.172.015	16.618.151
AGUS	819.602.118	81.960.212	72.891.206	9.069.006
SEPT	1.034.206.771	103.420.677	81.538.242	21.882.435
OKT	1.181.982.244	118.198.224	101.855.302	16.342.922
NOV	655.799.355	65.579.956	55.264.091	10.315.865
DES	1.325.195.793	132.519.574	118.865.740	13.653.834
TOTAL	13.038.169.622	1.303.816.977	1.091.770.228	212.046.749

Sumber : Hasil Penelitian (2016)

Penulis mengasumsikan bahwa semua penyerahan BKP merupakan penyerahan BKP yang dapat dikreditkan, lalu penulis juga mengasumsikan berdasarkan data pembelian bahwa penyerahan BKP dari PKP, sehingga atas pembelian dari PKP perusahaan akan mendapatkan pajak masukan. Data pembelian, merupakan pembelian atas barang-barang yang akan perusahaan kirim kepada *costumernya*. Atas data tersebut didapat pembelian yang berasal dari PKP dan pembelian yang berasal dari NON PKP (*supplier* yang belum mempunyai NPWP ataupun belum dikukuhkan sebagai PKP).

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pemungut, sehingga semua PPN atas transaksi penjualan akan disetorkan sendiri oleh perusahaan. Total beban pajak PPN pada tahun 2016 adalah Rp. 212.046.749, sementara pembelian yang berasal dari PKP adalah sebesar Rp. 10.917.702.280, dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 1.091.770.228. Sementara itu pembelian NON PKP sebesar Rp. 810.189.115, atau sekitar 7% pembelian dari NON PKP yang tidak dapat dikreditkan dari jumlah pembelian yang ada.

B. Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Meminimalkan Ppn Terhutang Pada CV. Mikita Cookies.

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan cara memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN, sehingga perusahaan melakukan transaksi pembelian secara maksimal dengan PKP, sehingga atas transaksi pembelian perusahaan dapat mengkreditkan PPN masukannya untuk dapat mengurangi beban pajak PPN perusahaan

Tabel 3 : Data Pembelian tahun 2016

BULAN	PKP	NON PKP	TOTAL	PPN
JAN	1.205.538.280	14.521.000	1.220.059.280	122.005.928
FEB	740.660.530	12.532.500	753.193.030	75.319.303
MAR	1.070.127.700	60.500.300	1.130.628.000	113.062.800
APR	1.260.478.230	120.350.000	1.380.828.230	138.082.823
MEI	657.432.760	53.500.500	710.933.260	71.093.326
JUN	917.598.820	75.350.351	992.949.171	99.294.917
JUL	761.720.150	110.353.383	872.073.533	87.207.353
AGUS	728.912.060	72.131.535	801.043.595	80.104.360
SEPT	815.382.420	100.321.500	915.703.920	91.570.392
OKT	1.018.553.020	85.000.000	1.103.553.020	110.355.302
NOV	552.640.910	75.003.546	627.644.456	62.764.446
DES	1.188.657.400	30.624.500	1.219.281.900	121.928.190
TOTAL	10.917.702.280	810.189.115	11.727.891.395	1.172.789.140

Sumber : Hasil Penelitian (2016)

Tabel 4 : Data PPN setelah *tax planning* tahun 2016

BULAN	DPP	PPN KELUARAN	PPN MASUKAN	PPN TERHUTANG
JAN	1.449.436.675	144.943.668	122.005.928	22.937.740
FEB	945.626.100	94.562.610	75.319.303	19.243.307
MAR	1.266.045.763	126.604.576	113.062.800	13.541.776
APR	1.421.972.487	142.197.249	138.082.823	4.114.426
MEI	950.902.676	95.090.268	71.093.326	23.996.942
JUN	1.059.497.976	105.949.798	99.294.917	6.654.881
JUL	927.901.664	92.790.166	87.207.353	5.582.813
AGUS	819.602.118	81.960.212	80.104.360	1.855.852
SEPT	1.034.206.771	103.420.677	91.570.392	11.850.285
OKT	1.181.982.244	118.198.224	110.355.302	7.842.922
NOV	655.799.355	65.579.956	62.764.446	2.815.510
DES	1.325.195.793	132.519.574	121.928.190	10.591.384
TOTAL	13.038.169.622	1.303.816.977	1.303.816.977	131.027.838

Sumber : Hasil Penelitian (2016)

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa total beban pajak pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp. 81.018.912, atau sekitar 38% dari beban pajak sebelum dilakukan *tax planning* menjadi Rp. 131.027.912, yang semula Rp. 212.046.749.

Langkah selanjutnya setelah *tax planning* PPN dilakukan oleh perusahaan maka CV. Mikita Cookies perlu melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*tax review*). Pengendalian pajak yang dapat dilakukan dalam rangka *tax planning PPN* di CV. Mikita Cookies adalah dengan cara :

1. Melakukan review atas pengkreditan pajak masukan, apakah faktur pajak yang diterima memenuhi syarat sebagai faktur pajak.

2. Melakukan review apakah faktur pajak telah dibuat dan dilaporkan tepat waktu, hal ini guna mendeteksi sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak.
3. Melakukan review atas jumlah penyerahan BKP apakah sesuai dengan jumlah pada SPT PPN yang dilaporkan.

Ketentuan faktur pajak atas penyerahan BKP / JKP yang dapat dikreditkan oleh CV. Mikita Cookies adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi ketentuan formal
 - a. Secara formal harus berbentuk Faktur Pajak atau dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak, diisi selengkapanya dan tidak lengkap/cacat.
 - b. Harus memperhatikan ketentuan pasal 9 ayat (8) UU PPN, yang menentukan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk :
 - Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
 - Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 - Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
 - Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
 - Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
 - Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
 - Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

2. Faktur Pajak memenuhi ketentuan material. Menurut UU PPN pasal 8 ayat 8 huruf b dijelaskan bahwa pajak masukan yang dibayarkan atas perolehan BKP/JKP yang berhubung langsung dengan kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran. Selain itu, Pajak Masukan juga mesti didukung bukti pengeluaran berupa invoice dan kuitansi pembayaran yang menyatakan bahwa transaksi sudah dipungut PPN.
3. Faktur Pajak tidak lengkap
PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :
 - a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Ketentuan terbaru mengenai faktur pajak tidak lengkap diatur didalam SE-26/PJ/2015 mengenai penegasan penggunaan nomor seri faktur dan tata cara pembuatan faktur pajak disebutkan bahwa :

- a. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- b. Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak tersebut.
- c. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak

sesungguhnya sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

4. Tanggung Jawab Renteng
Pada awalnya ketentuan tanggung jawab renteng ini diatur dalam Pasal 33 UU KUP No. 16 tahun 2000, kemudian ketentuan ini dihapus dalam UU KUP No. 28 tahun 2007, kemudian dihidupkan lagi melalui penambahan Pasal 16F dalam UU PPN No. 42 tahun 2009, yakni : “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayarkan”.
Pembeli BKP atau penerima JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atau PPnBM kecuali dalam hal : (Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP 1 Tahun 2012)
 - a. Pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
 - b. Pembeli BKP atau penerima JKP dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.
 - c. Tanggung renteng melekat pada pembeli BKP atau penerima JKP atas transaksi pembelian BKP dan/ atau JKP di dalam Daerah Pabean. (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP 1 Tahun 2012)Hal-hal tersebut diatas harus menjadi perhatian CV. Mikita Cookies dalam rangka memaksimalkan pengkreditan pajak masukan agar kedepannya tidak ada kendala ataupun koreksi dari fiskus akibat tidak adanya perencanaan pajak yang berdampak pada kenaikan beban pajak ketika terjadi pemeriksaan terutama pada aspek pajak PPN.

IV. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap analisis penerapan *tax planning*, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. CV. Mikita Cookies adalah wajib pajak badan yang telah terdaftar sebagai PKP sehingga pada transaksi perusahaan tidak luput dari mekanisme PPN. Dalam menghitung PPN terutang terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan yang didapat dari penerbitan faktur pajak atas pembelian yang dilakukan oleh PKP.
2. Penulis menganalisis penerapan *tax planning* PPN melalui data PPN pada tahun 2014. Pada transaksi pembelian atas pemenuhan barang / jasa untuk operasional perusahaan, CV. Mikita Cookies bertransaksi dengan *supplier* yang sudah terdaftar sebagai PKP maupun *supplier* yang belum PKP (Non PKP), sehingga atas transaksi pembelian barang / jasa tidak sepenuhnya dapat dikreditkan.
3. Penerapan *tax planning* PPN pada perusahaan didasarkan atas dasar bahwa perusahaan

menanggung PPN terhutang dari transaksi penjualan, sehingga perlu dilakukan perencanaan agar beban pajak dapat diminimalisir dengan cara yang dilegalkan oleh peraturan perpajakan di Indonesia.

4. Setelah dilakukan *tax planning* PPN dengan cara memaksimalkan pengkreditan pajak masukan dari transaksi pembelian atas pemenuhan barang / jasa untuk operasional. Dari pembahasan dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2014 CV. Mikita Cookies dapat menghemat sebesar Rp. 81.018.838 dengan beban pajak PPN sebesar Rp. 131.027.912, dari beban pajak PPN semula adalah Rp. 212.046.749.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi Perusahaan, dengan diterapkannya *tax planning* PPN dalam meminimalkan beban pajak PPN dengan cara yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk bertransaksi dengan PKP agar dapat memaksimalkan pajak masukan yang didapat.
2. Dalam melakukan *tax planning* PPN dibutuhkan pengetahuan atas regulasi perpajakan yang berlaku khususnya mengenai PPN terlebih lagi mengenai penerbitan faktur pajak, sehingga dikemudian hari tidak ada kendala ketika perusahaan pada posisi diperiksa oleh Kantor Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Pohan, Chairil. Manajemen Perpajakan. Jakarta : Kompas Gramedia, 2014.
- Mardiasmo. Perpajakan. Edisi 18. Jakarta. : Andi, 2016.
- Rahayu, Siti Kurnia. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Santoso, Imam dan Ning Rahayu. Corporate Tax Management. . Jakarta.: Ortax, 2013.
- Soemarso. Perpajakan : Pendekatan Komprehensif. . Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Suandy, Erly. Hukum Pajak. Jakarta. : Salemba Empat, 2011.
- Subyakto., Wardoyo dan. Pajak Terapan Brevet A&B. . Tangerang: Taxsys, 2011.
- Suhartono, Ilyas dan. Hukum Pajak Material 1. . Jakarta. : Salemba Humanika, 2011.
- Sumarsan, Thomas. Perpajakan Indonesia. . Jakarta: Indeks, 2012.
- Zain, Mohammad. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Analisis Dampak Kebijakan *Loan To Deposit Ratio* (Ldr) Terhadap Perubahan Tingkat Pengembalian Modal (Roe)

Slamet Heri Winarno

Program Studi Sekretaris

Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Jakarta

e-mail : slamet.smh@bsi.ac.id

ABSTRACT

Measurement of health of a financial institution (bank) can be determined on several factors, including the level of liquidity and profitability. By knowing the liquidity and profitability, we can find out if a bank is still able to function as an institution intermediaris in meeting the funding needs for the community. In order to produce optimum gain level, naturally required optimal management of the funds between deposits and borrowed funds are reflected in the Loan to Deposit Ratio (LDR). Optimal management of the funds is expected to produce significant changes on the return obtained (profit) which looks at the value of Return On Equity (ROE). LDR is a measure of how much the bank's ability to refinance withdrawals and ROE is a profitability performance comparison results net profit after tax with their own capital. This study aims to analyze the impact, influence and relationships of policy Loan to Deposit Ratio (LDR) to changes in return on equity (ROE) in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk . The data used are secondary data obtained through the analysis of financial statements for the period 2004-2013. The results showed Based on hypothesis testing using correlation that produce numbers -0.890. For the calculation of the coefficient of determination obtained a value of 0.792. ROE can be explained by this equation model at 79.2%, while the remaining 20.8% is influenced by other factors. While the results of the calculation of the amount of 75.716 constant regression equation and regression coefficient of X by -0.598.

Keywords-Policies; Loan to Deposit Ratio; Return on Equity

ABSTRAK

Pengukuran kesehatan sebuah lembaga keuangan (bank) dapat ditentukan pada beberapa faktor diantaranya tingkat likuiditas dan profitabilitas. Dengan mengetahui likuiditas dan profitabilitas ini, kita dapat mengetahui apakah sebuah bank masih mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediaris dalam memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat. Guna menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal, sudah sewajarnya diperlukan pengelolaan dana yang optimal antara dana simpanan dan dana pinjaman yang tercermin dalam *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Pengelolaan dana yang optimal ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang signifikan pada return yang diperoleh (*profit*) yang terlihat pada nilai *Return On Equity* (ROE).

LDR merupakan ukuran seberapa besar kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana dan ROE merupakan kinerja profitabilitas hasil perbandingan laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak, pengaruh dan hubungan dari kebijakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap perubahan *Return on Equity* (ROE) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui analisis laporan keuangan untuk periode 2004-2013. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji korelasi bahwa menghasilkan angka -0,890. Untuk hasil perhitungan besarnya koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,792. ROE yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini sebesar 79,2%, sedangkan sisanya sebesar 20,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan hasil perhitungan besarnya persamaan regresi konstant sebesar 75,716 dan koefisien regresi X sebesar -0,598.

Kata Kunci- Kebijakan; *Loan to Deposit Ratio*; *Return on Equity*

I. PENDAHULUAN

Setiap pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia diyakini bahwa industri perbankan memegang peran yang amat vital sebagai sebagai *financial intermediary* (penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana), sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, setiap bank akan dihadapkan dengan risiko. Salah satu risiko yang kerap kali dihadapi yaitu risiko likuiditas, seperti diketahui likuiditas merupakan tingkat kemampuan bank memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi. Salah satu indikator likuiditas yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas bank yaitu *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana oleh pihak ketiga. Rasio ini merupakan indikator dalam menilai kerawanan dan kemampuan

suatu bank. Sumber pendapatan dari bank sedikit banyak dipengaruhi oleh jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat (bunga kredit) yang juga menentukan besarnya laba yang nantinya akan diterima oleh bank. Dapat dikatakan jenis rasio keuangan ini sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kembali kepada profitabilitas (Ahmed).

Kinerja perbankan dapat diukur dengan mengukur rata-rata tingkat bunga pinjaman, rata-rata tingkat bunga simpanan, dan profitabilitas perbankan. Tingkat bunga simpanan merupakan ukuran kinerja yang lemah dan menimbulkan masalah, sehingga profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Seperti yang disampaikan M. Bashir (2003), salah satu ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE) untuk perusahaan pada umumnya. *Return on Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis suatu bisnis. Penelitian ini dimaksudkan guna mendapatkan gambaran tentang bagaimana kebijakan LDR yang dilaksanakan akan mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan ditinjau dari pengaruh serta hubungan dari dua hal tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio menurut (Darmawi) merupakan salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan adalah rasio pinjaman terhadap deposit. Jika rasio meningkat ke tingkat yang lebih tinggi secara relatif bankir kurang berminat untuk memberikan pinjaman atau investasi. Selain itu, mereka menjadi selektif dan kalau standar dinaikkan dan kredit menjadi lebih sulit, maka suku bunga cenderung naik. Walaupun rasio pinjaman terhadap deposit yang tinggi tidak pernah ditentukan acuannya, tapi rasio tersebut merupakan kekuatan yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman dan investasi.

Rasio pinjaman terhadap deposit meningkat untuk semua bank. Peningkatan itu akan lebih tinggi untuk bank yang lebih besar. Rasio yang lebih tinggi ini dapat dijelaskan sebagian oleh kesanggupan dan kesediaan bank untuk mengatasi persoalan likuiditasnya menggunakan manajemen liabilitas, atau melakukan pinjaman dari pasar uang, dan bukannya semata-mata menggantungkan diri pada penyesuaian asset, dan sebagian lainnya melalui usaha bank untuk memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut (Dendawijaya) mengemukakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* adalah ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Rumus perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut (Siamat) sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \quad (1)$$

Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio yang tinggi menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas bank. Namun berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah rasio kredit terhadap dana yang diterima bank dalam rupiah dan valas. Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kondisi likuiditas bank (Siamat).

Tabel 1. Kriteria Pengukuran Rasio LDR

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	50% < rasio ≤ 100%
Tidak Sehat	>100%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia (2004)

B. Return on Equity (ROE)

(Fahmi) mengutarakan bahwa rasio *return on equity* (ROE) disebut juga dengan laba atas *equity*. (Kasmir) mengatakan bahwa hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, dan sebaliknya.

Lebih lanjut dijelaskan rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. rasio dirumuskan sebagai :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}} \times 100\% \quad (2)$$

Menurut (Darmawi), bank menyimpan dana para deposan yang besar jumlahnya. Bank sentral sebagai pengawas perbankan menetapkan beberapa sasaran pengawasan, antara lain: (1) memberi perlindungan pada para pemegang deposan; (2) keharusan menjaga penawaran uang yang stabil; (3) merangsang sistem keuangan agar bersaing dalam memperlancar perantara keuangan

Tabel 2. Kriteria Pengukuran Rasio ROE

Kriteria	Hasil Rasio
Sehat	≥ 5%
Tidak Sehat	< 5%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia (2004)

C. Pengaruh Loan to Deposit Ratio Terhadap Return on Equity

(Kasmir) mengemukakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Selain menjalankan fungsi intermediasi perolehan laba (profitabilitas) merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bank. (Kasmir) menyatakan pula bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit yang tercermin pada nilai rasio LDR sangat penting bagi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan tujuan untuk memperoleh laba yang didapat dari selisih penerimaan bunga kredit dengan beban bunga simpanan.

Pemilik modal lebih tertarik pada seberapa besar kemampuan bank memperoleh keuntungan terhadap modal yang ia tanamkan. (Siamat) mengemukakan bahwa untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan dilihat dari kepentingan pemilik, digunakan rasio *Return on Equity* (ROE). Fungsi modal sebagai perlindungan terhadap masyarakat yang menyimpan dananya di bank pada saat bank likuidasi merupakan hal yang dapat diterima. Namun, perlu diingat bahwa meskipun suatu bank memiliki modal kecil, tidak berarti bank tersebut dengan mudah mengalami insolvensi. Beberapa bank yang modalnya rata-rata mengalami kesulitan antara lain karena manajemen bank yang lemah, terutama karena pengelolaan likuiditas yang kurang tepat. Oleh karena itu, penyediaan modal yang cukup memungkinkan bank untuk meneruskan operasinya tanpa terganggu, khususnya dalam periode ekonomi yang sulit, sampai mencapai tingkat keuntungan yang normal kembali.

Hipotesis penelitian yang dapat diajukan menyangkut dua variabel yang diteliti LDR dan ROE yaitu: (1) H_0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Equity* (ROE); dan (2) H_1 : Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Equity* (ROE).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis kuantitatif yang mencoba menunjukkan pengaruh dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Return on Equity* (ROE) dengan menggunakan metode perhitungan statistik. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang meliputi data total kredit, data pinjaman pihak ketiga, data laba bersih dan data modal untuk periode 2004 hingga 2013.

Pengukuran variabel penelitian menggunakan analisis statistik guna mengetahui tingkat hubungan dan pengaruh antara variabel yang diteliti.

A. Uji Koefisien Korelasi

Menurut Karl Pearson dalam (Usman and Akbar) mengemukakan bahwa korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Lebih lanjut (Usman and Akbar) memberikan batasan bahwa korelasi adalah salah satu teknik analisis statistik yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Karena para peneliti pada umumnya tertarik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mencoba untuk menghubungkannya. Hubungan antara dua variabel di dalam teknik korelasi bukanlah dalam arti hubungan sebab akibat (timbal balik), melainkan hanya merupakan hubungan searah saja.

Dalam menghitung koefisien korelasi perlu diingat beberapa hal menurut (Nazir), yaitu: (1) jumlah pengamatan variabel X dan Y harus sama, atau kedua nilai variabel tersebut harus berpasangan; (2) secara relatif, makin besar koefisien korelasi, maka tinggi pula derajat hubungan antara kedua variabel. Sebaliknya, secara relatif makin kecil koefisien korelasi, makin rendah pula derajat hubungan antara kedua variabel; (3) hubungan yang terjadi diasumsikan berbentuk linear. Jika hubungan yang terjadi adalah hubungan bukan linear, maka peneliti harus menggunakan teknik lain untuk mengukur derajat korelasinya; dan (4) koefisien korelasi tidak memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diukur.

(Sujarweni) menyampaikan bahwa uji korelasi bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel dapat dilihat dengan tingkat signifikan, jika ada hubungannya maka akan dicari seberapa kuat hubungan tersebut. Di sisi lain, (Sujarweni) juga memberi batasan bahwa keeratan hubungan dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi.

Tingkat signifikan ini digunakan untuk menyatakan apakah dua variabel mempunyai hubungan dengan syarat sebagai berikut: (1) jika $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima artinya tidak terdapat hubungan; dan (2) jika $Sig < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya terdapat hubungan

Menurut (Sujarweni) mengemukakan bahwa "Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu hubungan antar variabel". Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1. Sifat nilai koefisien korelasi antara plus (+) atau minus (-). Makna sifat korelasi, yaitu: (1) korelasi positif (+) berarti bahwa jika variabel x_1 mengalami kenaikan maka variabel x_2 juga akan mengalami kenaikan, begitu sebaliknya; dan (2) korelasi negatif (-) berarti bahwa jika variabel x_1 mengalami penurunan maka variabel x_2 akan mengalami kenaikan, begitu sebaliknya. Koefisien korelasi yang dinyatakan dengan r merupakan alat kedua untuk menerangkan kekuatan hubungan antara variabel X dan Y.

B. Uji Koefisien Determinasi

Santosa (2005:144) mengemukakan bahwa koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Lebih lanjut

(Priyatno) memberikan batasan bahwa analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. (Supardi) memberikan batasan bahwa koefisien determinasi dilambangkan dengan r^2

Tabel 3. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval koefisien	Tingkat hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Cukup
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Sumber: (Riduwan)

(Supardi) menyatakan jika nilai r^2 ini merupakan proporsi variabel keseluruhan dalam nilai variabel *dependent* yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linear dengan variabel *independent*, selain itu (sisanya) diterangkan oleh variabel yang lain (alat atau peubah lainnya). Nilai koefisien determinasi dinyatakan dalam kuadrat dari nilai koefisien korelasi $r^2 \times 100\% = n\%$, memiliki bahwa nilai variabel *dependent* dapat diterangkan oleh variabel *independent* sebesar $n\%$, sedangkan sisanya sebesar $(100-n)\%$ diterangkan oleh galat (*error*) atau pengaruh variabel yang lain. Sedangkan untuk analisis korelasi dengan jumlah variabel *dependent* lebih dari satu (ganda atau majemuk), terdapat koefisien determinasi penyesuain (*adjustment*) yang sangat sensitif dengan jumlah variabel. Masih menurut (Supardi), biasanya untuk analisis korelasi majemuk atau ganda yang sering dipakai adalah koefisien determinasi penyesuaian (koefisien determinasi sederhana tidak memperhatikan jumlah variabel *independent*).

C. Uji Persamaan Regresi

Analisis regresi linear digunakan untuk menaksir atau meramalkan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan (Priyatno). Analisis ini didasarkan pada hubungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Biasanya dinyatakan dalam persamaan:

$$Y = a + b X \quad (3)$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai pihak yang berperan sebagai intermedias, pihak bank tentunya berkewajiban mampu mengelola keuangan mereka khususnya dalam hal menyalurkan dana atau pemberian kredit. Besarnya jumlah kredit yang diberikan menggambarkan tingkat kemampuan bank dalam memutar dana atau modal yang

dimilikinya menjadi lebih profitable. Besarnya jumlah kredit juga menunjukkan persentase dari keseluruhan dana yang dimiliki mampu terserap dalam berbagai kegiatan bisnis bagi pihak ketiga. Perkembangan jumlah kredit dalam suatu periode dapat diketahui dari data kolektabilitas kredit seperti pada tabel 4.

Berdasarkan data kolektabilitas kredit seperti pada tabel 4, terlihat bahwa kinerja dari kredit yang diperhitungkan didasarkan pada enam elemen sifat, yaitu: (1) individual kolektif, yaitu besarnya kredit yang diberikan secara individu dan bersifat mandiri baik secara perorangan maupun korporat; (2) lancar, yaitu jumlah kredit yang masih dapat dipertanggungjawabkan yang masih berpotensi menghasilkan return; (3) dalam perhatian khusus, yaitu besarnya kredit yang disinyalir dapat mendatangkan masalah pada tingkat pengembalian; (4) kurang lancar, yaitu jumlah kredit yang menunjukkan trend penurunan pada tingkat pengembaliannya; (5) diragukan, yaitu keseluruhan kredit yang diyakini memiliki risk negative pada tingkat pengembalian; dan (6) macet, yaitu kredit yang berdampak pada loss profit perusahaan. Besarnya keseluruhan dana kredit yang diberikan dan tersalurkan diperoleh dengan menjumlahkan keseluruhan dari jumlah kredit berdasarkan enam kategori tersebut.

Besarnya jumlah kredit yang dihasilkan dalam kurun waktu 2004 hingga 2013 menunjukkan trend yang meningkat. Peningkatan ini sejalan dengan misi pemerintah dalam memperluas cakupan dari penyaluran kredit perbankan. Perhitungan LDR juga mengharuskan adanya informasi tentang dana yang ada pada pihak ketiga, dana tersebut berupa giro, tabungan dan deposito. Sepanjang kurun waktu 2004 hingga 2013 jumlah dana pihak ketiga pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengalami peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. Dana Pihak Ketiga
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Dana Pihak Ketiga			Jumlah DPK
	Giro	Tabungan	Deposito	
2004	1.488.012	6.035.808	11.046.145	18.569.965
2005	1.242.076	5.513.295	12.709.200	19.464.571
2006	1.637.302	6.057.402	13.899.961	21.594.665
2007	2.245.187	7.156.134	14.785.767	24.187.088
2008	2.853.230	7.375.098	21.220.416	31.448.744
2009	7.364.272	8.940.964	23.909.718	40.214.954
2010	5.174.175	10.867.627	31.504.245	47.546.047
2011	13.149.587	14.815.913	34.004.515	61.970.015
2012	13.271.227	21.540.425	45.856.331	80.667.983
2013	19.116.196	24.237.893	52.853.533	96.207.622

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data dana pihak ketiga seperti pada tabel 5, terlihat bahwa kinerja dari dana pihak ketiga yang diperhitungkan didasarkan pada tiga komposisi t, yaitu: (1) giro; (2) tabungan; dan (3) deposito. berdasarkan data tersebut terlihat kenaikan yang signifikan dari besarnya dana pada pihak ketiga. Mayoritas dana yang pada pihak ketiga

terdapat pada jenis deposito, yang nilainya rata-rata dua kali dari tabungan. Dari data total kredit dan dana pihak ketiga maka dapatlah ditentukan besarnya nilai dari *Loan to Deposit*

Ratio (LDR) selama kurun waktu 10 tahun tersebut, seperti terlihat pada tabel 6.

Tabel 4. Kolektabilitas Kredit
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kolektabilitas kredit						Total Kredit
	Individual Kolektif	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
2004	-	10.305.464	1.899.372	142.575	72.764	188.803	12.608.978
2005	-	12.232.531	2.419.265	134.574	111.004	375.217	15.272.591
2006	-	13.848.189	3.136.885	84.042	136.594	484.279	17.829.456
2007	-	18.305.537	3.132.808	105.694	133.799	665.070	22.342.906
2008	-	27.743.616	3.257.737	96.848	138.260	788.770	32.025.231
2009	-	34.326.341	5.036.303	120.956	182.637	1.066.717	40.732.954
2010	3.865.833	39.785.072	6.305.616	147.724	217.291	1.227.965	51.549.501
2011	5.563.601	45.005.777	7.349.511	159.500	179.382	1.079.985	59.337.756
2012	7.866.240	55.581.405	9.127.663	540.580	507.393	1.787.424	75.410.705
2013	10.721.471	67.168.404	11.053.174	348.183	425.404	2.669.308	92.386.308

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data pada tabel 6 maka dapat dikatakan bahwa rasio LDR yang tertinggi terdapat pada tahun 2010 yaitu sebesar 108,42%, angka ini berada dalam kategori kurang sehat, sehingga dapat mengancam profitabilitas atau perolehan laba, dan juga menunjukkan bahwa menurunnya penyaluran kredit.

Rasio LDR yang menunjukkan angka terendah terdapat pada tahun 2004 sebesar 67,90% angka ini berada dalam kategori sehat mencerminkan kriteria yang overlikuid yang artinya laba perusahaan dalam penyaluran kredit tidak efektif dan kurang efisien atau kelebihan dana cair yang mengakibatkan rendahnya profitabilitas usaha. Secara umum dapat dikatakan bahwa sepanjang kurun waktu 10 tahun tingkat resiko likuiditas menunjukkan trend peningkatan, hal ini tentunya kurang baik mengingat angka yang dihasilkan diatas 50%. Setelah mengetahui nilai-nilai dari LDR, maka langkah berikutnya yaitu menentukan nilai dari return on equity (ROE). Nilai-nilai pada ROE menggambarkan tingkat kemampuan pada setiap investasi modal.

Data-data yang digunakan pada perhitungan ROE ini adalah data laba bersih serta data modal inti. dalam kurun waktu 10 tahun (2004-2013) seperti pada tabel Berikut ini data tentang hasil perhitungan *Return on Equity* (ROE) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selama periode 2004-2013, yang disajikan pada tabel 7.

Berdasarkan data pada tabel 7, laba bersih tertinggi terdapat pada tahun 2013 yang mencapai 1,5 triliun sedangkan jumlah terendah ada pada tahun 2004 sebesar 370 milyar, sedangkan untuk modal tercatat angka tertinggi lebih dari 9 triliun di tahun 2013 dan lebih dari 950 milyar ditahun 2004.

Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa kemampuan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga dapat dikatakan sebagai perusahaan yang profitable dalam penggunaan seluruh modalnya.

Kondisi ini tentunya berpengaruh pada perkembangan nilai ROE yang diperoleh, dimana nilai yang dihasilkan menunjukkan kecenderungan yang berubah dari tahun ke tahun. Nilai ROE terendah

Tabel 6. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)
(dalam jutaan rupiah)
Indikator

Tahun	Total Kredit	Dana Pihak Ketiga	LDR
2004	12.608.978	18.569.965	67,90%
2005	15.272.591	19.464.571	78,46%
2006	17.829.456	21.594.665	82,56%
2007	22.342.906	24.187.088	92,38%
2008	32.025.231	31.448.744	101,83%
2009	40.732.954	40.214.954	101,29%
2010	51.549.501	47.546.047	108,42%
2011	59.337.756	61.970.015	95,75%
2012	75.410.705	80.667.983	93,48%
2013	92.386.308	96.207.622	102,42%

Sumber: Data diolah

ditunjukkan pada tahun 2009 sebesar sebesar 9,38% dan tertinggi pada tahun 2004 sebesar 37,53%. tinggi rendahnya nilai ROE tersebut tentunya banyak

dipengaruhi oleh berbagai macam aspek atau indikator, salah satunya LDR. Pada bagian selanjutnya akan dilakukan analisis tentang pengaruh LDR terhadap perubahan ROE.

Tabel 7. *Return on Equity* (LDR)
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Laba bersih	Modal inti	ROE
2004	370.144	986.261	37,53%
2005	436.698	1.351.128	32,32%
2006	364.674	1.608.077	22,68%
2007	402.020	2.078.727	19,34%
2008	430.474	2.281.464	18,87%
2009	490.453	5.231.321	9,38%
2010	915.938	5.738.730	15,96%
2011	1.118.661	6.584.012	16,99%
2012	1.363.962	9.038.283	15,09%
2013	1.562.161	9.878.541	15,81%

Sumber: Data diolah

A. Uji Koefisien Korelasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara *Loan to Deposit Ratio* (variabel independen) terhadap *Return on Equity* (variabel dependen). Hasil uji ini terlihat pada tabel 8. Hasil uji guna menjawab hipotesis yang diajukan

Dari hasil output pada tabel 8 nilai korelasi antara LDR dengan ROE diketahui nilai signifikan yaitu $0,001 < 0,05$ maka keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima. Mengindikasikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara LDR dengan ROE dengan nilai R sebesar -0,890. Angka tersebut menunjukkan kedua variabel mempunyai korelasi yang sangat kuat karena nilai -0,890 mendekati 1. Tanda negatif (-) menunjukkan hubungan yang berlawanan, jika nilai LDR mengalami penurunan maka nilai ROE akan mengalami kenaikan, begitu sebaliknya, sehingga hubungan antara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Equity* (ROE) bersifat tidak searah.

B. Uji Koefisien Korelasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara *Loan to Deposit Ratio* (variabel independen) terhadap *Return on Equity* (variabel dependen). Hasil uji ini terlihat pada tabel 8. Hasil uji guna menjawab hipotesis yang diajukan

Dari hasil output pada tabel 8 nilai korelasi antara LDR dengan ROE diketahui nilai signifikan yaitu $0,001 < 0,05$ maka keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima. Mengindikasikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara LDR dengan ROE dengan nilai R sebesar -0,890. Angka tersebut menunjukkan kedua variabel mempunyai korelasi yang sangat kuat karena nilai -0,890 mendekati 1. Tanda negatif (-) menunjukkan

hubungan yang berlawanan, jika nilai LDR mengalami penurunan maka nilai ROE akan mengalami kenaikan, begitu sebaliknya, sehingga hubungan antara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Equity* (ROE) bersifat tidak searah.

C. Uji Koefisien Korelasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara *Loan to Deposit Ratio* (variabel independen) terhadap *Return on Equity* (variabel dependen). Hasil uji ini terlihat pada tabel 8. Hasil uji guna menjawab hipotesis yang diajukan

Dari hasil output pada tabel 8 nilai korelasi antara LDR dengan ROE diketahui nilai signifikan yaitu $0,001 < 0,05$ maka keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima. Mengindikasikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara LDR dengan ROE dengan nilai R sebesar -0,890. Angka tersebut menunjukkan kedua variabel mempunyai korelasi yang sangat kuat karena nilai -0,890 mendekati 1. Tanda negatif (-) menunjukkan hubungan yang berlawanan, jika nilai LDR mengalami penurunan maka nilai ROE akan mengalami kenaikan, begitu sebaliknya, sehingga hubungan antara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Equity* (ROE) bersifat tidak searah.

Tabel 8. Hasil Uji Korelasi

		LDR	ROE
LDR	Pearson Correlation	1	-.890**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	10	10
ROE	Pearson Correlation	-.890**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	10	10

Sumber: Data diolah

D. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen seperti pada hipotesis yang diajukan yaitu : (1) H_0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Equity* (ROE); dan (2) H_A : Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Equity* (ROE). Maka dapat dilihat nilai signifikansi seperti pada tabel 9, berdasarkan data tabel diketahui nilai signifikan senilai $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Equity* (ROE).

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar nilai pengaruh antar variabel, maka dapat diketahui melalui tabel koefisien determinasi (tabel 10).

Pada tabel 10, nilai koefisien determinasi tercermin pada nilai R Square (R^2) yang akan menunjukkan besarnya pengaruh antara variabel independen (LDR) terhadap variabel dependen (ROE). Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (R Square) sebesar 0,792 atau 79,2%.

Tabel 9. Hasil Uji Signifikasi

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	511.574	1	511.574	30.392	.001 ^b
	Residual	134.659	8	16.832		
	Total	646.232	9			

Sumber: Data diolah

Hal ini menunjukkan bahwa *Return on Equity* (ROE) dipengaruhi biaya *Loan to Deposit Ratio* sebesar 79,2% sedangkan sisanya sebesar 20,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Dengan adanya nilai ini maka jelaslah bahwa kebijakan LDR yang ada pada PT Bank Tabungan Negara terbukti mempengaruhi tingkat kemampuan pada pengembalian modal atau investasi (ROE).

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.890 ^a	.792	.766	4.10272

Sumber: Data diolah

E. Uji Persamaan Regresi

Pengujian ini bertujuan untuk menaksir atau meramalkan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Model regresi hubungan antara *LDR* terhadap *ROE* dapat dilihat dari hasil perhitungan statistik pada tabel 11.

Tabel 11. Hasil Uji Persamaan Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	75.716	10.118		7.483	.000
	LDR	-.598	.109	-.890	-5.513	.001

Sumber: Data diolah

Pada tabel 11, dengan tingkat signifikansi 0,001 maka dapat dikatakan Persamaan regresi antara LDR dengan ROE signifikan. Dengan demikian persamaan regresi yang terbentuk adalah signifikan, dan ditulis sebagai $Y = 75,716 - 0,598X$. Dari persamaan tersebut dapat diterangkan: (1) nilai konstanta sebesar 75,716 menyatakan bahwa jika kebijakan LDR ditiadakan maka nilai ROE sebesar 75,716 atau jika dinyatakan dalam rupiah sebesar Rp. 75,716 juta; dan (2) koefisien regresi X

sebesar -0,598 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai LDR, maka nilai ROE berkurang sebesar 0,598 atau jika dinyatakan dalam rupiah sebesar Rp. 598 ribu.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tentang dampak kebijakan *Loan to Deposit Ratio* terhadap *Return on Equity* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya :

1. Perhitungan korelasi menunjukkan pola hubungan yang sangat kuat dan tidak searah secara signifikan antara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Equity* (ROE) dengan nilai negatif sebesar -0,890
2. Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa *Return on Equity* (ROE) dipengaruhi biaya *Loan to Deposit Ratio* sebesar 79,2% sedangkan sisanya sebesar 20,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
3. Jika kebijakan LDR ditiadakan maka ROE yang akan diperoleh sebesar 75,716 atau jika dinyatakan dalam rupiah sebesar Rp. 75,716 juta dan koefisien regresi X sebesar -0,598 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR), maka nilai *Return on Equity* (ROE) berkurang sebesar 0,598 atau jika dinyatakan dalam rupiah sebesar Rp. 598 ribu.

Beberapa saran yang diajukan terkait dengan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan dalam penyaluran kredit perlu lebih intensif agar tidak terjadi kerugian yang dapat menurunkan nilai ROE agar kegiatan usaha dapat dikatakan sehat.
2. Stabilitas dari jumlah ekuitas yang dimiliki agar dapat menjalankan usahanya secara efektif dan nantinya juga dapat dipercaya oleh investor.
3. Keseimbangan antara penyaluran modal maupun penerimaan modal perlu dijaga agar tetap sesuai dengan posisi yang normal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karena LDR yang terlalu rendah akan berakibat pada kesehatan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Ibrahim Elsidig. "Liquidity Profitability and The Dividends Payout Policy World." *Review of Business Research* 5.2 (2015): 73-85.
- "Bank Tabungan Negara." n.d. 24 12 2016 <<http://www.btn.co.id/Produk.aspx>>.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Fahmi, Irham. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfa Beta, 2013.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

- M. Bashir, Abdel-Hameed. " Determinants Of Profitability In Islamic Banks: Some Evidence From The Middle East ." *Islamic Economic Studies* 1.11 (2003).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Priyatno, Duwi. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- Riduwan. *Dasar-Dasar Statistika* . Bandung: Alfa Beta, 2006.
- Santosa, Purbayu Budi. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Yogyakarta: C.V Andi, 2005.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Sujarweni, Wiratna. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.
- Supardi. *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: Cshange Publication, 2013.
- Usman, Husaini and dan Setiady Purnomo Akbar. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Faktor Biaya Dan Efisiensi Kerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Mandiri Tbk

Ratihah
Manajemen Perpajakan
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
Jl. Dewi Sartika No. 77 dan No. 289, Cawang, Jakarta Timur
ratihah.rtv@bsi.ac.id

Abstract

Deregulation of the banking today has resulted in the need of funds directly or indirectly through banks. These conditions encourage the growth of our banking both related to banking products, the number of banks and the number of branches that reach more people in need of banking services. The financial crisis in Southeast Asia starting from the stage of the liberalization of financial characterized by increasingly free flow of foreign capital in the banking sector. Liberalization has increased capital inflow from abroad to developing countries including Indonesia because developing countries are in need of funds for economic development. Therefore the Bank must improve performance particularly well, maintaining the level of profitability that will earn the trust of society. Where this research has the objective to analyze the effect of non-performing loans (NPL), Return on Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM), ROA (Operating costs / operating income) on profit growth of Bank Mandiri, Tbk. After the data is collected, the data is analyzed by using multiple regression analysis SPSS version 20.0, then analyzed based on the results of the analysis of the data processing. And the results of this study can be concluded NPLs, ROA, NIM and ROA negative effect on the profit growth of Bank Mandiri Tbk and not significant because the value of t sig is 0.887 (NPL), 0.944 (ROA), 0.821 (NIM), 0.829 (ROA) greater than the real level of 0.01.

Keywords: Cost, Financial Performance, Profit Bank

Abstrak

Deregulasi pada perbankan saat ini telah mengakibatkan kebutuhan dana secara langsung maupun tidak langsung melalui perbankan. Kondisi ini mendorong tumbuhnya perbankan kita baik menyangkut produk perbankan, jumlah bank maupun jumlah cabang sehingga semakin banyak menjangkau masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. Krisis keuangan di Asia Tenggara dimulai dari tahap adanya liberalisasi keuangan yang ditandai dengan semakin bebasnya arus dana asing di sektor perbankan. Liberalisasi telah meningkatkan *capital inflow* dari luar negeri ke negara berkembang termasuk ke Indonesia dikarenakan negara berkembang sangat membutuhkan dana untuk pembangunan ekonominya. Maka dari itu Bank harus meningkatkan kinerja dengan baik terutama menjaga tingkat profitabilitasnya sehingga akan memperoleh kepercayaan masyarakat. Dimana

penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh Non Performing Loan (NPL), Return on Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM), BOPO (Biaya operasional/Pendapatan operasional) terhadap Pertumbuhan laba Bank Mandiri, Tbk. Setelah data terkumpul, maka data dianalisa dengan menggunakan metode regresi berganda bantuan software SPSS versi 20.0, kemudian dianalisa berdasarkan hasil analisa olah data tersebut. Dan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan NPL, ROA, NIM, dan BOPO berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba Bank Mandiri Tbk dan tidak signifikan sebab nilai t sig adalah 0.887 (NPL), 0.944 (ROA), 0.821 (NIM), 0.829 (BOPO) lebih besar dari taraf nyata 0.01.

Kata Kunci: Biaya, Kinerja Keuangan, Laba Bank.

I. Pendahuluan

Perkembangan perbankan saat ini sangat pesat setelah terjadi deregulasi dibidang moneter dan perbankan pada 1 juni 1983 dilanjutkan dengan paket kebijaksanaan 28 oktober 1988 (Pakto 1988), disempurnakan dengan paket Pebruari 1991 (Pakfeb) serta Paket Kebijakan Pada bulan Mei 1993 (Pakmei 1993). Deregulasi tersebut telah mengakibatkan kebutuhan dana secara langsung maupun tidak langsung melalui perbankan. Kondisi ini mendorong tumbuhnya perbankan kita baik menyangkut produk perbankan, jumlah bank maupun jumlah cabang sehingga semakin banyak menjangkau masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. Kondisi ini terjadi sejak awal 1997 yang kemudian menjadi awal terjadinya krisis ekonomi. Krisis keuangan di Asia Tenggara terjadi dimulai tahap adanya liberalisasi keuangan yang ditandai dengan semakin bebasnya arus dana asing di sektor perbankan. Liberalisasi telah meningkatkan *capital inflow* dari luar negeri ke negara berkembang termasuk ke Indonesia dikarenakan negara berkembang sangat membutuhkan dana untuk pembangunan ekonominya. Negara yang sedang berkembang memberikan *yield* yang relatif tinggi dan pada umumnya disertai keringanan-keringanan pajak serta kemudahan-kemudahan lain (Hahm dan Mishkin, 2000).

Salah satu tujuan perbankan adalah memperoleh keuntungan optimal dengan memberikan layanan jasa kepada masyarakat. Bagi pemilik saham yang menanamkan modal kepada perbankan pasti mengharapkan keuntungan semaksimal mungkin baik itu

berupa deviden ataupun kenaikan dari saham yang dimilikinya. Maka dari itu Bank harus meningkatkan kinerja dengan baik terutama menjaga tingkat profitabilitasnya sehingga akan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Informasi tentang kinerja dan kondisi perbankan dapat diperoleh melalui laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan setiap periode seperti laporan laba rugi dan Neraca. Laporan tersebut diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kondisi keuangan bank. Dalam mengukur kinerja perbankan biasanya dilakukan penilaian atas kondisi laporan keuangan pada periode tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia (Surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 30 April 1997 disempunakan dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR tanggal 1998 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum meliputi faktor permodalan, faktor kualitas Aktiva produktif, Faktor manajemen dengan penekanan pada manajemen umum dan resiko, faktor Rentabilitas, Faktor likuiditas dan pelaksanaan ketentuan lain. Laporan keuangan adalah suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan, yang berguna bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. (Kieso, weygandt dan Warfield 2011) Dalam Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia) dikatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan rugi laba serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana.

Tujuan Laporan Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 1) Asset; 2) Liabilitas; 3) Ekuitas; 4) Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian; 5) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; 6) Arus Kas (PSAK 1 Revisi 2013).

Penelitian Nesti Hapsari (2005) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada 19 bank umum yang terdaftar di BEJ selama periode 2000-2004 yang terdiri dari CAR, NPL dan LDR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank. Sedangkan penelitian mengenai hubungan efisiensi operasional terhadap pertumbuhan laba pada 25 bank yang *go public* di BEJ pada tahun 2004-2006 menunjukkan bahwa DPK dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank. Sedangkan CAR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank (Yuliani, 2007). Berbeda dengan penelitian Kesowo (2000) dalam Kuncoro dan Suhardjono (2002) dalam

Yuliani (2007) menunjukkan bahwa pertumbuhan laba bank dipengaruhi oleh BOPO dan CAR. Sedangkan hasil penelitian Violeta (2010) dalam Rindy dan Dharma (2010) menunjukkan bahwa CAR, ROA, ROE, BOPO, dan LDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank.

Penelitian Erna (2010) dalam Rindy dan Dharma (2010) menunjukkan hasil bahwa LDR mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank. Sedangkan variabel CAR, NIM (Net Interest Margin), KAP (Kualitas Aktiva Produktif), BOPO dan ROA tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank. Sementara itu hasil penelitian Sri Widyastuti dan Hendrie Anto (2010) menunjukkan bahwa volume pembiayaan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia. Sedangkan dana pihak ketiga dan biaya operasional berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank syariah. Ismet (1998) dalam Sri Widyastuti dan Hendrie Anto (2010) menunjukkan bahwa volume kredit dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank pemerintah dan bank swasta nasional sedangkan biaya operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank pemerintah dan bank swasta nasional.

Rasio-rasio keuangan diatas bermanfaat dalam memprediksi laba perusahaan perbankan termasuk Bank Persero seperti Bank Mandiri, Tbk. Prediksi ini bermanfaat terhadap kinerja perbankan dimasa yang akan datang. Penilaian tentang kinerja bank sangat penting dilakukan oleh pihak manajemen, investor, pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dikarenakan pihak berkepentingan/investor tidak hanya melihat laba bank atau kinerja dalam satu periode saja, namun melihat perubahan laba dari tahun ke tahun. Laba dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, dan prediksi periode yang akan datang dengan harapan pengembalian lebih tinggi dari apa yang telah diinvestasikan, dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), *Return on Asset* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM), BOPO (Biaya operasional/Pendapatan operasional) terhadap Pertumbuhan laba Bank Mandiri, Tbk.

II. Metodologi Penelitian

2.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Mandiri dengan laporan keuangan lima tahun berturut-turut periode 2010-2014. Tahun Buku laporan keuangan tersebut adalah yang berakhir 31 Desember dan tidak memakai laporan keuangan periode bulan maret.

2.2. Jenis Data penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut yaitu tahun 2010-2014 (data time series). Sedangkan sumber datanya dari internet dari situs Bank

Mandiri Tbk dan Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan.

2.3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisa menggunakan metode regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 20.00, kemudian dianalisa berdasarkan hasil analisa olah data tersebut.

2.4. Model Penelitian

Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\hat{Y} &= a + b_1 X_1 + e \\ \hat{Y} &= a + b_2 X_2 + e \\ \hat{Y} &= a + b_3 X_3 + e \\ \hat{Y} &= a + b_4 X_4 + e\end{aligned}$$

Dimana:

a = Konstanta
 b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien Regresi
 X_1, X_2, X_3, X_4 = Variabel Independen
 \hat{Y} = Variabel Dependen

Adapun rumus dalam penghitungan rasio keuangan adalah:

1. Non Performing Loan (NPL)

$$NPL = \frac{\text{kualitas produktif bermasalah}}{\text{Aktivaproduktif}}$$

2. Return On Assets (ROA)

$$ROA = \frac{\text{NetIncome}}{\text{OperatingIncome}}$$

3. Net Interest Margin

$$NIM = \frac{\text{pendapatan bungabersih}}{\text{Rata-rataaktivaproduktif}}$$

4. BO/PO (Biaya Operasional/Pendapatan Operasional)

$$BO/PO = \frac{\text{Totalbebanoperasional}}{\text{Totalpendapatan operasional}}$$

2.5. Uji Parameter Prediksi

Parameter prediksi antara variabel bebas (*Independen Variable*) dan variabel terikat (*Dependen Variable*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Model regresi

Regresi secara parsial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\hat{Y}_1 = a + b X_1 + e$, dimana \hat{Y} adalah *Dependen Variable* dan e adalah kesalahan acak (*random error*). *Random error* ini mencerminkan sifat perilaku acak dari pelaku yang diamati. Parameter a dan b dapat dirumuskan melalui metode OLS (*Ordinary Least Square*), sebagai berikut:

$$b = \frac{\sum X_i Y_i - n \bar{X} \bar{Y}}{\sum X_i^2 - n \bar{X}^2}$$

$$a = \bar{Y} - b \bar{X}$$

2) Prediksi Parsial (Bivariat)

Regresi bivariat antara *Independen Variable* terhadap *Dependen Variable*, melalui penduga t_{hitung} dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Parameter a ; $t_{hitung} a = \frac{a - A_0}{S_a}$
 S_a dapat dicari melalui:

$$S_a = \frac{\sqrt{\sum X^2 \cdot (S_e)}}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Sedangkan untuk penduga S_e dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut:

$$S_e = \frac{\sqrt{\sum Y^2 - a \sum Y - b \sum X Y}}{n - 2}$$

b) Parameter b ; $t_{hitung} b = \frac{b - B_0}{S_b}$

S_b dapat dicari melalui:

$$S_b = \frac{S_e}{\sqrt{\sum X^2 - (\sum X)^2/n}}$$

Untuk mencari penduga S_e , dapat diselesaikan seperti penduga model diatas.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang data yang dikumpulkan dari sampel penelitian, Hasil pengolahan data statistik deskriptif dengan menggunakan Software Microsoft Excel 2007.

3.1.1. Pertumbuhan Laba

Laba merupakan salah satu indikator kinerja perusahaan, Laba perusahaan dapat tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang disajikan pada laporan Rugi-Laba. Salah satu tolak ukur penilaian kinerja adalah pertumbuhan laba.

Tabel 3.1
Hail Perhitungan Laba Bersih

TAHUN	NILAI LABA BERSIH (%)
2010	1,370
2011	1,537
2012	1,810
2013	2,050
2014	2,312

Berdasarkan tabel 3.1 dapat terlihat dengan jelas, bahwa PT. Bank Mandiri, Tbk mengalami pertumbuhan laba positif dan signifikan pada tahun 2010-2014.

3.1.2. Non Performing Loan (NPL)

Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar.

Tabel 3.2
Hail Perhitungan NPL

TAHUN	NILAI NPL (%)
2010	0,54
2011	0,45
2012	0
2013	0,37
2014	0,44

Berdasarkan tabel 3.2 Bank Mandiri memiliki kinerja yang sangat baik dalam upaya menurunkan kredit bermasalahnya dari tahun 2010-2012 hal tersebut dapat dilihat dari penurunan nilai NPL pada tahun 2010 0,54 persen menjadi 0 persen pada tahun 2012, tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2013 dan 2014, dapat dilihat dari kenaikan nilai NPL dari 0 persen pada tahun 2012 menjadi 0,44 persen pada tahun 2014.

3.1.3. Return on Asset (ROA)

Rasio ini mengukur kemampuan bank di dalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan.

Tabel 3.3
Hail Perhitungan ROA

TAHUN	NILAI ROA (%)
2010	3,50
2011	3,37
2012	3,55
2013	3,66
2014	3,57

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat perhitungan return on asset PT. Bank Mandiri, Tbk pada tahun 2010-2014. Besarnya return on asset yang dihasilkan pada tahun 2010-2014 secara keseluruhan hasil tertinggi tahun 2013 sebesar 3,66% dan terendah tahun 2011 sebesar 3,37%. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2012-2013 dari 3,55% menjadi 3,66%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan aktiva yang dimiliki sudah cukup baik. Sehingga aktiva yang dimiliki dapat lebih cepat berputar untuk mendapatkan laba. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2014 rata-rata return on asset yang dihasilkan PT. Bank Mandiri, Tbk sebesar 3,53%, artinya rata-rata return on asset selama tahun 2010-2014 mampu menghasilkan laba bersih dari asset yang dimiliki sebanyak 3,53%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bahwa rata-rata return on asset

yang dihasilkan semakin baik bagi perusahaan dan return on asset yang tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam melaksanakan operasi sehari-hari.

3.1.3. Net Interest Margin (NIM)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Tabel 3.4
Hail Perhitungan NIM

TAHUN	NILAI NIM (%)
2010	5,39
2011	5,29
2012	5,58
2013	5,68
2014	5,94

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai NIM tahun 2010-2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal tersebut menunjukkan semakin buruknya kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar.

3.1.4. BOPO (Biaya operasional / Pendapatan operasional)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Tabel 3.5
Hail Perhitungan BOPO

TAHUN	NILAI BOPO (%)
2010	66,43
2011	67,22
2012	63,93
2013	62,41
2014	64,98

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan bahwa nilai BOPO mengalami penurunan pada tahun 2012 dari 67,22% menjadi 63,93% dan 2013 dari 63,93% menjadi 62,41% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013 dari 62,41% menjadi 64,98%. Dengan rata-rata sebesar 64,99, hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank mandiri sudah cukup efisien dalam mengendalikan biaya operasional.

3.2. Hasil Analisa Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Pertumbuhan laba Bank Mandiri, Tbk

Hasil olah data pengaruh NPL terhadap pertumbuhan laba dapat dilihat pada tabel berikut:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	85.065	123.633		.688	.541
NPL	-1.361	8.820	-.089	-.154	.887

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Laba

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persamaan yang terbentuk adalah :

$$Y = 85,065 - 1,351 X1 + e$$

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan NPL berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba Bank Mandiri Tbk dan tidak signifikan sebab nilai t sig adalah 0.887, lebih besar dari taraf nyata 0.01.

3.3. Hasil Analisa Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Pertumbuhan Laba Bank Mandiri, Tbk

Hasil olah data pengaruh ROA terhadap pertumbuhan laba dapat dilihat pada tabel berikut:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	81.146	167.060		.486	.660
ROA	-6.053	79.643	-.044	-.076	.944

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Laba

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persamaan yang terbentuk adalah :

$$Y = 81,145 - 6,053 X2 + e$$

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan ROA berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba Bank Mandiri Tbk dan tidak signifikan sebab nilai t sig adalah 0.944, lebih besar dari taraf nyata 0.01.

3.4. Hasil Analisa Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Pertumbuhan Laba Bank Mandiri, Tbk

Hasil olah data pengaruh NIM terhadap pertumbuhan laba dapat dilihat pada tabel berikut:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-112.121	740.393		-.151	.889
NIM	36.819	149.138	.141	.247	.821

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Laba

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persamaan yang terbentuk adalah :

$$Y = -112,121 + 35,819 X3 + e$$

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan NIM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba Bank Mandiri Tbk dan tidak signifikan sebab nilai t sig adalah 0.821, lebih besar dari taraf nyata 0.01.

3.5. Hasil Analisa Pengaruh BOPO (Biaya operasional/Pendapatan operasional) terhadap Pertumbuhan Laba Bank Mandiri, Tbk

Hasil olah data pengaruh BOPO terhadap pertumbuhan laba dapat dilihat pada tabel berikut:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	219.573	640.680		.343	.754
BOPO	-3.205	13.617	-.135	-.235	.829

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Laba

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persamaan yang terbentuk adalah :

$$Y = 219,573 - 3,205 X4 + e$$

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan BOPO berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba Bank Mandiri Tbk dan tidak signifikan sebab nilai t sig adalah 0.829, lebih besar dari taraf nyata 0.01.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. NPL berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba Bank Mandiri Tbk dan tidak signifikan sebab nilai t sig adalah 0.887, lebih besar dari taraf nyata 0.01.
2. ROA berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba Bank Mandiri Tbk dan tidak signifikan sebab nilai t sig adalah 0.944, lebih besar dari taraf nyata 0.01.
3. NIM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba Bank Mandiri Tbk dan tidak signifikan sebab nilai t sig adalah 0.821, lebih besar dari taraf nyata 0.01.
4. BOPO berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba Bank Mandiri Tbk dan tidak signifikan sebab

nilai t sig adalah 0.829, lebih besar dari taraf nyata 0.01.

REFERENSI

- Bank Indonesia (2005), *Konsep Dasar Perbankan Syariah*, Jakarta, Juli 2005.
- E. Kieso, Donald, Jerry J, Weygandt and Teery D. Warfield, 2011. *Intermediate Accounting*, Edisi 12 by: Erlangga
- Hapsari, Nesti (2005), Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Masa Mendatang Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta, Universitas Diponegoro, Tesis-Tidak Dipublikasikan
- IAI (2000), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan, Edisi Revisi 1 Januari 2009, Jakarta: Salemba Empat
- Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Lilis, Erna (2010), Analisis Pengaruh CAR, NIM, BOPO, LDR, NPL, ROA, dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Perubahan Laba Bank Umum di Indonesia, Universitas Diponegoro, Tesis-Tidak Dipublikasikan.
- Nurhafita, Rindy dan Tintri, Dharma (2010), Effect On The Quality of earnings ratio Camel (Case Study of Registered Commercial Banks in Indonesia Stock Exchange), *Jurnal Universitas Gunadarma*, Jakarta, hlm 1-18.
- Widyastuti, Sri dan Hendrie Anto, MB (2010), Pengaruh Volume Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, dan Biaya Intermediasi Terhadap Marjin Laba Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Sinergi*, Volume XII No.1, Januari 2010, hlm 115-124.
- Yuliani (2007), Hubungan Efisiensi Operasional Dengan Kinerja Profitabilitas Pada Sektor Perbankan Yang *Go Public* di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Volume V No. 10, Desember 2007, hlm 15-36.

Analisis NPL Dan LDR Terhadap ROA pada PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Nasional Indonesia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Hartanti

Program Studi Manajemen Perpajakan
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
Jl. Dewi Sartika No.289, Cawang, Jakarta Timur
E-mail: hartanti.hti@bsi.ac.id

Abstract- *The financial statements can be used to measure the financial performance of banks, financial statements can be calculated financial ratios that may be considered in making a decision. The objective of this study was to determine the relationship and influence simultaneously or partially NPL, LDR and ROA at three banks, namely PT Persero, Bank Mandiri Tbk, the National Bank and Bank Rakyat Indonesia Tbk Indonesia Tbk. The data used in the financial statements of the 1st quarter of 2011- the third quarter of 2015 before the bank obtained a loan from Bank of China. The research method using quantitative analysis method to analyze the relationship and the influence of dependent and independent variables either simultaneously or partially. As for the independent variable in this study NPL (X1), LDR (X2) and ROA Dependent Variable (Y). The data were processed using SPSS Version 20. In this study using multiple linear regression analysis. The results showed no significance relationship between the NPL (x1) and ROA (Y) and the relationship is weak and negative; no significance relationship between LDR (x2) and ROA (Y) and the relationship is weak and positive (unidirectional); NPL (x1), LDR (x2) together affect significantly the ROA (Y); Partially NPL (x1) negative effect on ROA (Y); While LDR (x2) has no effect on ROA (Y). should be further enhanced both in terms of its financial performance and LDRnya NPL and control over the invested assets that do not arise problem loans.*

Key words : NPL; LDR; ROA

Abstrak - Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan, dari laporan keuangan tersebut dapat dihitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh secara simultan maupun parsial NPL, LDR dan ROA pada tiga bank Persero yaitu PT. Bank Mandiri Tbk, Bank Nasional Indonesia Tbk dan Bank Rakyat Indonesia Tbk. Data yang digunakan laporan keuangan kuartal I 2011-kuartal III 2015 sebelum bank tersebut memperoleh pinjaman dari Bank China. Metode penelitian menggunakan metode analisa kuantitatif dengan menganalisis hubungan dan pengaruh variabel *dependent* dan *independent* baik secara simultan maupun parsial. Adapun yang menjadi variabel *independent* dalam penelitian ini NPL (X1), LDR (X2) dan Variabel *Dependent* ROA (Y). Data diolah menggunakan aplikasi

SPSS Versi 20. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan signifikansi antara NPL (x_1) dengan ROA (Y) dan hubungan tersebut lemah dan negatif; ada hubungan signifikansi antara LDR (x_2) dengan ROA (Y) dan hubungan tersebut lemah dan positif (searah); NPL (x_1), LDR (x_2) bersama-sama mempengaruhi secara signifikan dengan ROA (Y); Secara parsial NPL (x_1) berpengaruh negatif terhadap ROA (Y); Sedangkan LDR (x_2) tidak mempunyai pengaruh terhadap ROA (Y). sebaiknya lebih ditingkatkan lagi kinerja keuangannya baik dari sisi NPL maupun LDRnya dan melakukan pengawasan lebih terhadap aset yang diinvestasikan sehingga tidak timbul kredit bermasalah.

Kata Kunci : NPL, LDR dan ROA

I. PENDAHULUAN

Laporan keuangan sangat penting untuk perusahaan salah satunya adalah usaha perbankan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan, dari laporan keuangan tersebut dapat dihitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat dijadikan tolak ukur penilaian kesehatan bank tersebut.

Jenis bank salah satunya adalah Bank BUMN/bank pemerintah, antara lain Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Pada bulan September 2015 Bank BUMN seperti bank Mandiri, Bank BNI dan BRI mendapatkan pinjaman senilai US\$ 3 miliar atau sekitar Rp 43,4 triliun dari China Development Bank (CDB) akan dipakai untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Pinjaman ini untuk pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan dana besar dan berjangka panjang. Misalnya, untuk membangun pembangkit listrik program 35 giga watt (GW) yang total kebutuhannya mencapai Rp 1.200 triliun dalam lima tahun. Maka per tahunnya mencapai Rp 240 triliun (Setyowati)

Bank yang melakukan peminjaman perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi keuangan sebelum melakukan peminjaman. Sebagai bahan pertimbangan dapat dilihat dari rasio laporan keuangan dari sisi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan rasio lainnya. Menurut (Liora) Rasio keuangan bank merupakan alat analisis keuangan bank untuk menilai kinerja bank berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan.

Rasio menggambarkan suatu hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Posisi keuangan bank dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kemampuan bank di masa depan dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi, pendistribusian hasil pengembangan dan arus kas, memprediksi kemampuan bank dalam memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo, dan lain sebagainya.

Jenis rasio keuangan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bermacam-macam diantaranya LDR (*Loan to Deposit Ratio*), NPL (*Non Performing Loan*), ROA (*Return On Asset*) dll. LDR (*Loan to Deposit*) biasa digunakan untuk mengukur kemampuan dalam membayar kewajibannya, NPL digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah, sedangkan ROA untuk mengukur keuntungan/profit bank.

Menurut penelitian (Ahmad) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Menurut (Rita Septiani) NPL secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada PT. BPR Pasarraya Kuta periode 2010-2014, sedangkan LDR secara parsial berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap profitabilitas pada PT. BPR Pasarraya Kuta periode 2010-2014.

(Zainuddin) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa NPL (*Net Performing Loan*) mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap Laba, sedangkan penelitian yang dilakukan (ARTWIENDA) menunjukkan bahwa NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap perubahan laba pada bank besar, akan tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap bank kecil.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri Tbk, Bank Nasional Indonesia Tbk dan Bank Rakyat Indonesia Tbk. Laporan keuangan yang digunakan adalah Laporan keuangan kuartal/Catur wulan 1 2011-III tahun 2015.

Metode penelitian menggunakan metode analisa kuantitatif dengan menganalisis hubungan dan pengaruh variabel *dependent* dan *independent* baik secara simultan maupun parsial. Adapun yang menjadi variabel *independent* dalam penelitian ini NPL (X1), LDR (X2) dan Variabel *Dependent* ROA (Y). Data diolah menggunakan aplikasi SPSS Versi 20. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

2.1. Bank

Menurut (Hasibuan SP) "Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja".

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam (Ismail) yang dimaksud oleh Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2. Laporan Keuangan

(Ikatan Akuntan Indonesia) mengemukakan pengertian laporan keuangan yaitu: Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, *networth*, beban, dan pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

Menurut (Munawir), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarakan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

(Harahap) menyatakan bahwa "Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan".

2.3. Rasio keuangan bank

a. NPL (*Non Performing Loan*)

(Riyadi) mengatakan *rasio Non Performing Loan* adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 sampai 5 dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Semakin besar tingkat NPL menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang dihadapi bank. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Sesuai SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004) :

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

b. LDR (*Loan to Deposit Ratio*)

Rasio likuiditas dapat diukur menggunakan *loan to deposit ratio* (LDR). LDR adalah perbandingan antara total kredit yang telah diberikan oleh bank dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank (Riyadi)

(Kasmir) mengartikan *Loan to Deposit Ratio* sebagai berikut: "Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan."

(Kasmir), rasio *Loan to Deposit Ratio* ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}}$$

c. ROA (*Return On Asset*)

Pengertian rasio ROA dikemukakan oleh (Sartono) *Return On Aset* (ROA) maunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.

Menurut (Sudana) *Return On Aset* ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak.

Menurut (Rivai) *Return On Aset* (ROA) adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ROA, adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berupa Rasio NPL sebagai variabel independent (X_1), Rasio LDR sebagai Variabel Independent (X_2) dan ROA sebagai Variabel Dependent (Y) dari Bank Mandiri, BRI dan BNI dari periode laporan keuangan kuartal 1 tahun 2011-kuartal 3 tahun 2015.

Tabel 1. Data Rasio NPL, LDR dan ROA pada Bank Mandiri, BRI, BNI kuartal 1 tahun 2011-kuartal 3 tahun 2015

Nama Bank	Tahun	Kuartal	NPL	LDR	ROA
Bank Mandiri	2015	3	2,41	84,27	3,00
		2	2,00	82,97	3,21
		1	1,81	83,80	3,54
		4	1,66	82,97	3,57
	2014	3	1,68	84,34	3,53
		2	1,77	85,40	3,48
		1	1,76	86,61	3,55
		4	1,60	82,97	3,66
	2013	3	1,71	85,65	3,45
		2	1,77	82,75	3,47
		1	1,90	80,95	3,48
		4	1,74	77,66	3,55
2012	3	1,91	82,23	3,47	
	2	1,95	81,42	3,35	
	1	2,18	78,97	3,25	
	4	2,84	71,65	3,37	
2011	3	2,41	76,25	3,69	
	2	2,22	73,43	3,88	
	1	2,43	67,93	4,70	
	3	2,83	87,67	2,45	
BNI	2015	3	2,83	87,67	2,45
		2	2,98	87,63	1,48

		1	2,14	87,76	3,55
		4	1,96	87,81	3,49
	2014	3	2,23	85,74	3,32
		2	2,19	80,28	3,26
		1	2,32	88,39	3,28
		4	2,17	85,30	3,36
	2013	3	2,44	84,69	3,32
		2	2,55	84,00	3,39
		1	2,79	82,57	3,26
		4	2,84	77,52	2,92
	2012	3	3,39	76,82	2,81
		2	3,44	72,13	2,81
		1	3,58	74,36	2,76
		4	3,61	70,37	2,94
	2011	3	3,83	78,29	2,96
		2	4,03	76,08	3,05
		1	4,09	73,27	2,82
		3	2,24	84,89	3,95
	2015	2	2,23	87,87	3,91
		1	2,17	80,47	3,99
		4	1,69	81,68	4,74
	2014	3	1,89	85,29	4,84
		2	1,97	94,00	4,92
		1	1,78	92,01	5,02
		4	1,55	88,54	5,03
	2013	3	1,77	90,88	4,65
		2	1,81	89,25	4,62
		1	1,97	89,62	4,76
		4	1,78	79,85	5,15
	2012	3	2,33	85,23	4,87
		2	2,38	82,13	4,87
		1	2,73	84,03	5,11
		4	2,30	76,20	5,11
	2011	3	2,30	76,20	4,93
		2	3,64	90,22	4,44
		1	3,05	85,75	4,41

Sumber: <http://ir.bankmandiri.co.id/phoenix.zhtml?c=146157&p=iro1-reportsOther>;
<http://www.bni.co.id/id-id/hubinvestor/kinerjakeuangan/laporantriwulan.aspx>;
<http://ir-bri.com/>

Dari tabel 1 dapat dilihat kondisi kinerja keuangan dari rasio NPL, LDR dan ROA dari masing-masing bank sebelum mendapatkan pinjaman dari Bank China.

Sebelum dilakukan pengolahan dan analisis dari data pada tabel 1, maka dilakukan uji asumsi klasik dengan hasil sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

3.2. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan uji *kolmogorov-simorrnov* dengan hasil *Asymp Sig (2-tailed)* sebesar 0,057. Hasil tersebut lebih besar dari signifikan 0,05 ($0,057 > 0,05$) jadi data penelitian tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Heterokadisitas

Uji *Heterokadisitas* pada data penelitian ini menggunakan uji *Glestjer*, jika hasil signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada gejala heterokadisitas. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa NPL signifikansi 0,966 dan LDR signifikansi 0,44, berarti signifikansi NPL dan

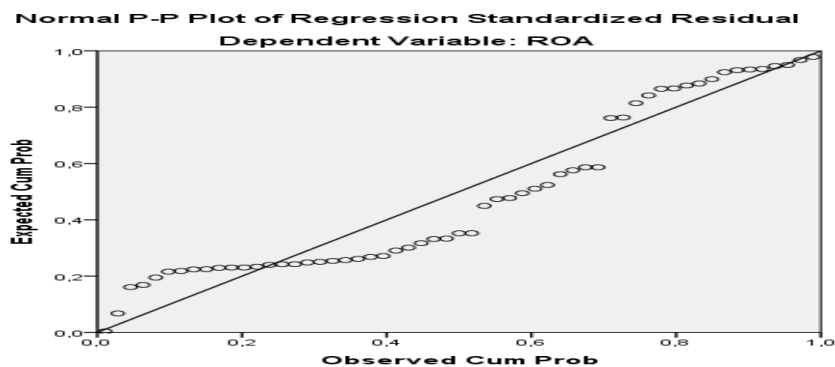
LDR lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi masalah *heterokadisitas*.

c. Uji *Multikolinieritas*

Uji *Multikolinieritas* diperoleh dari hasil *collienarity statistics* dengan memperhitungkan nilai VIF, apabila nilai $VIF < 10$, berarti penelitian tersebut terbebas dari masalah *multikolinieritas*. Hasil uji dari data penelitian menunjukkan hasil sebesar 1,262 sehingga tidak terjadi masalah *multikolinieritas* karena < 10 .

d. Uji *Linieritas*

Uji *Linieritas* menggunakan diagram *Scater Plot* seperti dibawah ini:



Gambar 1 : Plot Garis Antar Variabel (Normal P-P)

Sumber: hasil pengolahan data (2017)

Berdasarkan gambar 1 yang menggambarkan plot antara nilai residu (*ZRESID*) dengan nilai prediksi (*ZPRED*) pada model regresi berganda pada penelitian ini, sehingga diperoleh hasil bahwa model telah linier karena nilai residu yang mengikuti alur residu normal.

3.3. Hasil Penelitian

3.3.1. Analisa Hubungan (Korelasi) NPL, LDR dengan ROA

Uji *Korelasi* dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan atau tidak antara variabel x dan y.

a. Hubungan variabel NPL (x_1) dengan ROA (Y)

Hipotesa dari hubungan NPL (x_1) dengan ROA (Y) bahwa ada hubungan antara NPL (x_1) dengan ROA (Y), dapat digambarkan dengan perumusan hipotesa sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada Hubungan antara NPL (x_1) dengan ROA (Y)

H_a = Ada Hubungan antara NPL (x_1) dengan ROA (Y)

b. Hubungan variabel LDR (x_2) dengan ROA (Y)

Hipotesa dari hubungan LDR (x_2) dengan ROA (Y) bahwa ada hubungan antara LDR (x_2) dengan ROA (Y), dapat digambarkan dengan perumusan hipotesa sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada Hubungan antara LDR (x_2) dengan ROA (Y)

H_a = Ada Hubungan antara LDR (x_2) dengan ROA (Y)

Untuk menguji hipotesa dari hubungan X_1 , X_2 dengan Y dapat dilihat dari tabel 2. korelasi dibawah ini

Tabel 2. UjiCorrelations

		ROA	NPL	LDR
Pearson Correlation	ROA	1,000	-,422	,245
	NPL	-,422	1,000	-,456
	LDR	,245	-,456	1,000
Sig. (1-tailed)	ROA	.	,001	,033
	NPL	,001	.	,000
	LDR	,033	,000	.
N	ROA	57	57	57
	NPL	57	57	57
	LDR	57	57	57

Sumber: Hasil Penelitian (2017)

Berdasarkan Tabel 2. Uji korelasi diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Hubungan variabel NPL (x_1) dengan ROA (Y)
Tingkat signifikansi dari NPL sebesar 0,001 jadi tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel NPL (x_1) dengan ROA (Y), H_a = diterima. Adapun hubungannya sebesar -0,422 yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut lemah dan negatif (tidak searah) karena hasilnya diantara 0 s/d -0,5.
- b. Hubungan variabel LDR (x_2) dengan ROA (Y)
Tingkat signifikansi dari LDR sebesar 0,033 jadi tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,033 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel LDR (x_2) dengan ROA (Y), H_a = diterima. Adapun hubungannya sebesar 0,245 yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut lemah dan positif (searah) karena hasilnya diantara 0 s/d 0,5.

3.3.2. Analisis Pengaruh Antara NPL, LDR dengan ROA

- a. Analisis pengaruh secara Simultan (bersama-sama) antara NPL (x_1), LDR (x_2) dengan ROA (Y)

Hipotesa dari pengaruh NPL (x_1), LDR (x_2) dengan ROA (Y) bahwa ada pengaruh yang signifikan antara NPL (x_1), LDR (x_2) dengan ROA (Y), dapat digambarkan dengan perumusan hipotesa sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada Pengaruh signifikan antara NPL (x_1), LDR (x_2) dengan ROA (Y)

H_a = Ada Pengaruh signifikan antara NPL (x_1), LDR (x_2) dengan ROA (Y)

Untuk menguji hipotesa dari pengaruh X_1 , X_2 dengan Y dapat dilihat dari tabel 3. Model Summary dibawah ini:

Tabel 3. Hasil pengaruh Regresi berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,426 ^a	,182	,152	,75159	,182	6,000	2	54	,004

a. Predictors: (Constant), LDR, NPL

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: hasil penelitian (2017)

Berdasarkan tabel 3 hasil pengaruh regresi berganda dari model summary tersebut menunjukkan bahwa signifikansinya 0,004. Hal ini berarti tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$) sehingga berdasarkan hipotesa ada pengaruh yang signifikan antara NPL (x_1), LDR (x_2) dengan ROA (Y), H_a = diterima. Sedangkan pengaruh secara simultan/bersama-sama antara NPL (x_1), LDR (x_2) sebesar 18,2 % terhadap ROA (Y).

- b. Analisis pengaruh secara (parsial) antara NPL (x_1) dengan ROA (Y)

Hipotesa dari pengaruh NPL (x_1) dengan ROA (Y) bahwa ada pengaruh yang signifikan antara NPL (x_1) dengan ROA (Y), dapat digambarkan dengan perumusan hipotesa sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada Pengaruh signifikan antara NPL (x_1) dengan ROA (Y)

H_a = Ada Pengaruh signifikan antara NPL (x_1) dengan ROA (Y)

c. Analisis pengaruh secara (parsial) antara LDR (x_2) dengan ROA (Y)

Hipotesa dari pengaruh LDR (x_2) dengan ROA (Y) bahwa ada pengaruh yang signifikan antara LDR(x_2) dengan ROA (Y), dapat digambarkan dengan perumusan hipotesa sebagai berikut:

Ho = Tidak ada Pengaruh signifikan antara LDR (x_2) dengan ROA (Y)

Ha = Ada Pengaruh signifikan antara LDR (x_2) dengan ROA (Y)

Untuk menguji hipotesa dari pengaruh X_1 , X_2 secara parsial dengan Y dapat dilihat dari tabel 4. koefisien dibawah ini:

Tabel 4. Hasil pengaruh parsial antara NPL,LDR dan ROA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	4,126	1,831		2,254	,028
	NPL	-,483	,170	-,392	-2,837	,006
	LDR	,009	,020	,066	,476	,636

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Hasil Penelitian (2017)

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan bahwa :

- Pengaruh variabel NPL (x_1) dengan ROA (Y). Tingkat signifikansi dari NPL sebesar 0,006 jadi tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel NPL (x_1) dengan ROA (Y), H_a = diterima. Adapun pengaruh negatif sebesar 48,3%, apabila NPL atau kredit bermasalah banyak/naik maka ROA akan turun, begitupun sebaliknya apabila NPL/kredit bermasalah rendah ROA akan naik.
- Pengaruh variabel LDR (x_2) dengan ROA (Y)
Tingkat signifikansi dari LDR sebesar 0,636 jadi tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($0,636 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel LDR (x_2) dengan ROA (Y), H_a = ditolak, H_o diterima. Adapun pengaruhnya sangat kecil 9%.

4.3.3. Hasil Persamaan Regresi Antara NPL, LDR dengan ROA

Berdasarkan tabel .4 Persamaan Regresi yang terbentuk adalah: $\hat{Y} = 4,126 - 0,483 x_1 + 0,009 x_2 + e$ dari konstanta atau nilai murni ROA tanpa dipengaruhi faktor lain pada penelitian diatas sebesar 4,126. Hipotesa dari Persamaan Regresi NPL(x_1), LDR (x_2) dengan ROA (Y) bahwa ada persamaan regresi yang signifikan antara NPL (x_1), LDR(x_2) dengan ROA (Y), dapat digambarkan dengan perumusan hipotesa sebagai berikut:

Ho = Tidak Ada Persamaan regresi yang signifikan NPL (x_1), LDR (x_2) dengan ROA (Y)

Ha = Ada Persamaan regresi yang signifikan NPL (x_1), LDR (x_2) dengan ROA (Y)

Untuk menguji hipotesa dari persamaan Regresi X_1 , X_2 dengan Y dapat dilihat dari tabel 5. Anova dibawah ini:

Tabel 5. Uji ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	6,778	2	3,389	6,000	,004 ^b
	Residual	30,504	54	,565		
	Total	37,282	56			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), LDR, NPL

Sumber: Hasil Penelitian (2017)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,004 sehingga lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$) sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat persamaan regresi yang signifikan NPL (x_1), LDR (x_2) dengan ROA (Y)

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang Analisa NPL, LDR terhadap ROA pada Bank Mandiri, BNI, BRI sebagai berikut :

1. Hasil dari uji korelasi menunjukkan ada hubungan signifikasian antara NPL (x_1) dengan ROA (Y) dan hubungan tersebut lemah dan negatif (tidak searah).
2. Hasil dari uji korelasi menunjukkan ada hubungan signifikansi antara LDR (x_2) dengan ROA (Y) dan hubungan tersebut lemah dan positif (searah)
3. Hasil dari uji hipotesa bahwa NPL (x_1), LDR (x_2) bersama-sama mempengaruhi secara signifikan dengan ROA (Y), besarnya pengaruh sebesar 18,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain.
4. Secara parsial hasil uji hipotesa menunjukkan NPL (x_1) berpengaruh negatif terhadap ROA (Y) sebesar 48,3%, apabila NPL atau kredit bermasalah banyak/naik maka ROA akan turun, begitupun sebaliknya apabila NPL/kredit bermasalah rendah ROA akan naik. Sedangkan LDR (x_2) tidak mempunyai pengaruh terhadap ROA (Y)
5. Hasil persamaan persamaan analisis regresi berganda yang didapat dari tabel 4 yaitu : $\hat{Y} = 4,126 - 0,483x_1 + 0,009x_2 + e$. Berdasarkan persamaan tersebut nilai konstanta adalah 4,126, artinya apabila LDR dan NPLnya nol (0) maka ROA sebesar 4,126.

Berdasarkan penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bank dalam penelitian tersebut apabila kinerja dilihat dari tingkat NPL, LDR dan ROA dalam kondisi baik, apabila melakukan penambahan dana dari peminjaman sebaiknya mempertimbangkan kondisi semua aspek yang ada.
2. Lebih ditingkatkan lagi kinerja keuangannya baik dari sisi NPL maupun LDRnya dan melakukan pengawasan lebih terhadap aset yang diinvestasikan sehingga tidak timbul kredit bermasalah.

REFERENSI

- Ahmad, Salman, Bilal Nafees., dan Zeeshan Ahmad Khan. "Determinants of Profitability of Paskitani Banks: Panel Data Evidence For The Period 2001-2010." *Journal of Business studies Quarterly*, 4(1) (2012): pp:149-165.
- ARTWIENDA, Nur MS and PRASETIONO, Prasetiono. "ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING LOAN, BOPO, NET INTEREST MARGIN, DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PERUBAHAN LABA." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 7 (2). (2009): 150-165.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Harahap, Sofyan Safri. "Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan." Harahap, Sofyan Safri. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. 105.
- Hasibuan SP, Malayu. "Dasar-dasar perbankan." Hasibuan SP, Malayu. *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011. 2.
- Ikatan Akuntan Indonesia. "Standar Akuntansi Keuangan." Indonesia, Ikatan Akuntan. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI, 2012. 5.
- Ismail. "Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah." Ismail. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010. 12.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers., 2012.
- Liora, dkk. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah yang

- Terdaftar di Bank Indonesia.” Jurnal JOM FEKON. Vol. 1, No. 2 (2014): 1-15.
- Munawir. “ Analisis Laporan Keuangan.” Munawir. Analisis Laporan Keuangan, Edisi 4. Yogyakarta: Liberty, 2010. 5.
- Rita Septiani, Putu Vivi Lestari. “Pengaruh NPL dan LDR terhadap Profitabilitas dengan CAR sebagai Variabel Mediasi Pada PT. BPR Pasarraya Kuta.” E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 5, No.1 (2016): 293-234 .
- Rivai, Veithizal, Sofyan Basri, Sarwono Sudarto, Afandy Permata Veithzal. Commercial Bank Manajemen Perbankan Dari Teori Ke praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Riyadi, Selamat. Banking Asset and Liability Management, edisi ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2006.
- Sartono, Agus. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. (Edisi IV). Yogyakarta: BPFE, 2010 .
- Setyowati, Desy. <http://katadata.co.id>. 21 09 2015. 05 01 2017
<<http://katadata.co.id/berita/2015/09/21/ini-alasan-tiga-bank-bumn-pinjam-dana-dari-cinaa>>.
- Sudana, I Made. Manajemen Keuangan Perusahaan, Teori dan Prktik. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Zainuddin, Jogiyanto Hartono. “Manfaat Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba: Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEJ.” Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol 2, No. 1 (Januari 1999): 66-90.

Penerimaan Tarif Parkir Dampaknya Terhadap *Net Income* PT SPI Area Graha Rekso Jakarta

Ellyta Muchtar
Program Akuntansi
Akademik Manajemen dan Keuangan BSI Jakarta
JI Dewi Sartika No.28 Cawang Jakarta Timur
Email : ellyta.ely@bsi.ac.id

Abstract. Revenue from the activity or activities of a company said revenue and earnings from the company related to the company's net profit. PT SPI is a company engaged in the service area management parkir. Purpose this study to determine the revenue impact parking rates on net income of the company. The research data used is secondary data, the existing data on the income statement of PT SPI from the period 2011 to 2015. The research method used is quantitative descriptive data processing using SPSS data processing applications. The results showed that acceptance parking rates take effect or influence on the company's net income amounted to 97% (R square 0.97) with significant 0.002. 0.002 meaning $<0,005$. The regression equation established in the research is $Y = -0,709 + 1,014X + e$. So that can concluded that this study has proven where the acceptance of the company's activities that have been carried out in the form of income parking rates have a relationship with the net profit or net income of the company.

Keyword: Parking rate revenue , Net Income

Abstrak. Penerimaan yang berasal dari kegiatan atau aktifitas suatu perusahaan dikatakan pendapatan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan berhubungan dengan laba bersih perusahaan. PT SPI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengelolaan area parkir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak penerimaan tarif parkir terhadap laba bersih perusahaan. Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang ada dalam laporan laba rugi PT SPI dari periode 2011 sampai dengan 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengolahan data menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan tarif parkir memberikan dampak atau pengaruh terhadap net income perusahaan sebesar 97 % (R square 0,97) dengan signifikan sebesar 0,002 artinya $0,002 < 0,005$. Persamaan regresi yang terbentuk dalam penelitian ini adalah $Y = -0,709 + 1,014X + e$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah membuktikan dimana penerimaan dari aktifitas perusahaan yang sudah dilakukan berupa pendapatan tarif parkir mempunyai hubungan dengan laba bersih atau *net income* perusahaan.

Kata Kunci: pendapatan tarif parkir , *Net Income*

I. PENDAHULUAN

Kota Jakarta dikenal dengan tingkat kemacetannya yang cukup tinggi sehingga membuat aktivitas yang padat menjadi terhambat. Hal itu dikarenakan banyaknya kendaraan bermotor dan kendaraan roda empat yang berlalu lintas di jalan. Keadaan ini diharapkan kesadaran masyarakat Jakarta untuk beralih menggunakan kendaraan umum, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mengatasi kemacetan ini pemerintah mengeluarkan peraturan Gubernur DKI No.120/ 2012 tentang biaya parkir pada penyelenggaraan fasilitas parkir umum di luar badan jalan (dalam gedung) yang dikeluarkan tanggal 19 September 2012 dimana tarif parkir kendaraan bermotor dinaikan disejumlah zona kota Jakarta yaitu zona A merupakan kawasan padat lalu lintas dan kawasan B merupakan kawasan tidak padat lalu lintas.

Tarif parkir yang diterima oleh perusahaan pengelola area parkir dari pemilik kendaraan merupakan pendapatan bagi perusahaan yang bersangkutan. Kenaikan tarif parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta dinilai dapat mengurangi kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor di kota Jakarta setiap harinya. Namun secara tidak langsung tarif parkir yang dinaikan oleh perusahaan pengelola area parkir berdasarkan ketentuan atau peraturan dari Pemerintah Daerah akan menambah penerimaan atau pendapatan perusahaan. Dengan kenaikan tarif parkir di sejumlah tempat baik di pusat perbelanjaan maupun di perkantoran menimbulkan suatu masalah bagi pengguna kendaraan maupun perusahaan swasta pengelola parkir. Seiring dengan kenaikan tarif parkir disejumlah tempat pelayanan umum, masyarakatpun menuntut peningkatan pelayanan yang lebih baik dari pengelola parkir mulai dari kendaraan akan parkir sampai dengan kendaraan meninggalkan area parkir sehingga kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh pengelola (manajemen) parkir kepada konsumen dapat tercapai, maka masyarakat atau konsumen tidak akan keberatan dengan kenaikan tarif parkir dan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membayar biaya parkir kendaraan.

PT SPI merupakan salah satu instansi swasta yang mengelola area parkir di Jakarta. Sebagai pengelola area parkir PT SPI memperoleh pendapatan (*income*) dari pemilik kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di area gedung yang melakukan kerjasama dengan PT SPI. Penerimaan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan bisa secara harian ataupun bulanan. Seperti perusahaan atau instansi yang

mengelola area parkir lainnya, PT SPI juga menaikkan tarif parkir sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dengan dinaikannya tarif listrik penerimaan pendapatan PT SPI bertambah dan perusahaan pun dituntut untuk memberikan pelayanan, kenyamanan dan keamanan yang lebih baik kepada konsumennya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungannya antara penerimaan tarif parkir dengan laba atau *income* yang diperoleh perusahaan dan tarif parkir yang dinaikan akan berdampak pada laba atau *income* perusahaan. Laba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laba bersih (*net income*).

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat penerimaan atau pendapatan tarif parkir terhadap laba bersih (*net income*) yang diperoleh perusahaan

II. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil berdasarkan data-data yang tercantum dalam laporan keuangan yaitu Laporan L/R PT SPI dari tahun 2011 sampai dengan 2015.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data berupa angka-angka yang diolah menggunakan aplikasi statistik (SPSS) dan data dianalisa secara deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan jawaban tentang dampak dari variabel independen atau bebas dalam hal ini adalah kenaikan tarif parkir (X) yang diukur dalam bentuk penerimaan atau pendapatan tarif parkir terhadap variabel dependen atau terikat dalam hal ini adalah *net income* (Y) yang dirumuskan dengan persamaan :

$$\hat{Y} = a + bIX + e$$

dimana :

$$\hat{Y} = \text{net income (NI)}$$

X = penerimaan tarif parkir

a = bilangan konstanta

b = koefisien regresi

e = tingkat kesalahan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linier yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak dampak dari variabel independen yaitu penerimaan tarif parkir (X) terhadap variabel dependen (Y) yaitu *net income* perusahaan.

Tarif parkir merupakan besaran atau jumlah uang yang dibebankan ke konsumen atas penyediaan jasa area untuk memarkirkan kendaraan bermotor. Beban parkir kendaraan yang dibayar oleh konsumen merupakan penerimaan atau pendapatan bagi perusahaan. Kenaikan tarif parkir kendaraan tentunya akan menaikkan tingkat penerimaan atau pendapatan perusahaan. Dalam penelitian ini kenaikan tarif parkir diukur dalam bentuk jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dalam suatu periode.

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh perusahaan dari melakukan kegiatan atau aktifitas perusahaannya yang akan digunakan untuk membiayai

seluruh aktifitasnya. Pendapatan dinyatakan dalam satuan mata uang.

Menurut (Tuanakotta) "Pendapatan (*revenue*) dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu perusahaan". Pendapatan merupakan darah kehidupan dari suatu perusahaan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Semakin besar pendapatan yang diterima perusahaan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membiayai aktifitasnya. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi perusahaan. Pengukuran pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam laporan keuangan karena dalam melakukan aktifitas usaha, manajemen ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi yang diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.

Menurut (Nasution) " Pengakuan pendapatan adalah proses perekaman formal suatu item dalam catatan akuntansi yang akhirnya dilaporkan dalam laporan keuangan, termasuk pelaporan awal sebuah item maupun perubahan berikutnya yang berhubungan dengan item itu".

Menurut (Halim and Supomo) " Laba merupakan pusat pertanggung jawaban yang masukan dan keluarannya diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya". Untuk memperoleh laba perusahaan harus melakukan aktifitas atau kegiatan operasionalnya. Umumnya perusahaan melakukan aktifitas untuk memperoleh laba pada tingkat tertentu yang sudah ditetapkan sebagai tujuan yang harus dicapai. Peningkatan perolehan laba mencerminkan bahwa kinerja perusahaan baik, semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan mengindikasikan kinerja perusahaan semakin baik.

Laba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laba bersih (*Net income*). **Laba bersih** merupakan suatu ukuran berapa besar harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) melebihi harta yang keluar (beban dan kerugian). Menurut (Soemarso) "**Net Income** (Laba bersih) merupakan selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha". Laba bersih merupakan kelebihan atas seluruh pendapatan atas biaya yang dikeluarkan setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan.

Pengujian Data Penelitian

Pengujian data penelitian berupa data pendapatan tarif parkir sebagai variabel independen (X) dan data laba bersih atau *net income* (NI) sebagai variabel dependen (Y) meliputi :

1. Uji statistik deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dampak kenaikan tarif parkir terhadap *net income* PT SPI. Alat yang digunakan untuk mendeskripsikannya adalah nilai minimum, maksimum,

sum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, range (Ghozali,2009:19)

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. Suatu data penelitian yang terdistribusi normal atau tidak dapat diketahui melalui uji statistik non parametrik yaitu uji *One-sample Kolmogorov-Smirnov*. Alat uji ini digunakan untuk memberikan gambar dan angka-angka yang lebih detil apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Hasil dari uji *Kolmogorov – Smirnov* lebih dari 0,05 (Ghozali).

3. Uji Determinasi

Uji Koefisien Korelasi dan Uji F atau ANOVA Test

Uji koefisien korelasi dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel. Dimana dua variabel dikatakan berkorelasi apabila satu variabel mengalami perubahan akan diikuti dengan perubahan variabel lainnya, baik searah maupun tidak searah. Uji F atau *anova test* dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data pendapatan tarif parkir dan data laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi PT SPI dari periode 2011 sampai dengan 2015.

Tabel.1. Pendapatan tarif parkir PT SPI periode 2011-2015

Tahun	Pendapatan (X) (Rp)	LogN
2011	589.141.500	20.19
2012	740.188.000	20.42
2013	809.955.000	20.51
2014	1.038.043.000	20.76
2015	1.281.128.600	20.97

Sumber : bag.administrasi PT SPI

Data laba bersih (*net income*) yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan, dimana laba bersih merupakan hasil pendapatan dikurangi beban usaha selama periode 2011 sampai dengan 2015.

Tabel 2. *Net Income* PT SPI periode 2011-2015

Tahun	<i>Net Income</i> (Y) (Rp)	LogN
2011	380.415.850	19.76
2012	505.322.100	20.04
2013	507.523.900	20.05
2014	629.113.500	20.26
2015	886.706.600	20.60

Sumber: bag.administrasi PT X

Tabel 3. Data variabel penelitian

Tahun	X	Y
2011	20,19	19,76
2012	20,42	20,04
2013	20,51	20,05
2014	20,76	20,26
2015	20,97	20,60
Total	102,67	100,71

Sumber : Olahan penulis,2017

Hasil Pengujian Data

1. Uji statistik deskriptif

Berdasarkan data penerimaan atau pendapatan tarif parkir PT SPI selama periode 2011 sampai dengan periode 2015 (5 tahun) yang ada pada tabel 1 dan dari hasil pengolahan aplikasi SPSS diperoleh bahwa sekitar 20 % pendapatan atau penerimaan tarif parkir dapat meningkatkan *net income* atau laba bersih perusahaan.

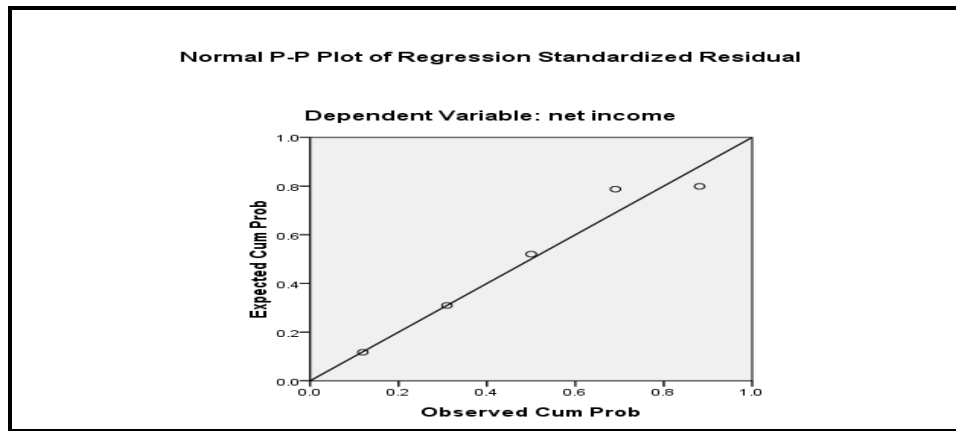
Tabel 4. Uji statistik deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
pendapatan	5	20.19	20.97	102.85	20.5700	.30274
net income	5	19.76	20.60	100.71	20.1420	.31164
Valid N (listwise)	5					

2. Uji Normalitas

Uji normalitas yang telah penulis lakukan dengan menggunakan SPSS terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh hasil seperti pada

gambar 1, dimana data – data tersebar di sepanjang garis diagonal yang menandakan bahwa data yang diregresi dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian ini sudah memenuhi asumsi normalitas



Gambar.1 Uji Normalitas

Pengujian data penelitian apakah terdistribusi secara normal dapat diperkuat dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov tampak pada tabel 5 dimana

nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,483 dan tidak signifikan pada 0,05. Jadi dapat disimpulkan residual terdistribusi secara normal.

Tabel 5. Uji Normalitas dengan 1-KS Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		pendapatan	net income
N		5	5
Normal Parameters ^a	Mean	20.5700	20.1420
	Std. Deviation	.30274	.31164
Most Extreme Differences	Absolute	.179	.216
	Positive	.179	.216
	Negative	-.135	-.172
Kolmogorov-Smirnov Z		.399	.483
Asymp. Sig. (2-tailed)		.997	.974
a. Test distribution is Normal.			

3. Uji Regresi

a. Uji Korelasi

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel independen (X) kenaikan tarif parkir yang diukur dalam bentuk pendapatan dengan variabel dependen (Y) *net income*, dari hasil olahan data dengan SPSS

dapat dilihat pada tabel 3. yang menunjukkan hasil bahwa antara variabel kenaikan tarif parkir (pendapatan) dan *net income* memiliki keeratan hubungan yang signifikan. Berdasarkan uji *Pearson correlation* nilai signifikansi pendapatan tarif parkir dan *net income* diperoleh dengan nilai 0,002 berarti < 5% atau 0,05

Tabel 6. Uji korelasi

		Pendapatan	net in come
pendapatan	Pearson Correlation	1	.985**
	Sig. (2-tailed)		.002
	N	5	5
net in come	Pearson Correlation	.985**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	
	N	5	5

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Uji Determinasi

Hasil uji determinasi data dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS terlihat pada tabel 7 dimana nilai R square sebesar 0,970 yang merupakan

hasil pengkuadratan R (0,985 X 0,985) yang artinya sekitar sekitar 97% *net income* dipengaruhi oleh penerimaan tarif parkir, sedangkan 3% nya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 7. Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.985 ^a	.970	.959	.06275	.970	95.667	1	3	.002

a. Predictors: (Constant), pendapatan

b. Dependent Variable: net in come

c. Uji Pengaruh Simultan (F Test) atau Uji ANOVA

F-test atau uji anova dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau dampak variabel independen (pendapatan) secara simultan terhadap variabel

dependen (*net income*) tampak pada tabel.8 dimana nilai *F test* sebesar 95,667 dan signifikan pada 0.002 yang berarti variabel independen yaitu pendapatan tarif parkir mempengaruhi atau memberikan dampak pada variabel dependen *net income*

Tabel. 8 Uji F test
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.377	1	.377	95.667	.002 ^a
Residual	.012	3	.004		
Total	.388	4			

a. Predictors: (Constant), pendapatan

b. Dependent Variable: net income

Berdasarkan hasil uji coefficients yang tampak pada tabel.9 menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,002 < 0,05$ maka hasil penelitian menunjukkan adanya dampak pendapatan tarif parkir terhadap net income yang besarnya dampak yang ditimbulkan sebesar 1,014. Jadi persamaan regresi dalam penelitian ini

adalah $Y = -0,709 + 1,014X + e$. Angka konstanta sebesar -0,709 mempunyai arti bahwa besarnya *net income* saat pendapatan (X) sama dengan 0 dan koefisien regresi sebesar 1,014 mempunyai arti bahwa setiap penambahan 1 pendapatan tarif parkir maka laba akan naik sebesar 1,014.

Tabel 9. Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.709	2.132		-.332	.761
	pendapatan	1.014	.104	.985	9.781	.002

a. Dependent Variable: net in come

KESIMPULAN

Penerimaan yang masuk ke perusahaan dari aktifitas yang sudah dilakukan oleh perusahaan disebut dengan pendapatan. Secara teoritis bahwa penerimaan atau pendapatan berkaitan dengan laba bersih (*net income*) yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Penerimaan perusahaan dari tarif parkir yang dinaikan pastinya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan secara tidak langsung akan menaikkan *net income* (laba bersih) perusahaan. Dari hasil penelitian dan pengolahan data dapat diperoleh hasil bahwa pendapatan tarif parkir memberikan dampak terhadap *net income* perusahaan hal itu ditunjukkan besarnya nilai *R square* 0,97 yang artinya bahwa 97% *net income* atau laba bersih perusahaan dipengaruhi oleh penerimaan tarif parkir. Hasil uji ANOVA (*F test*) dimana nilai signifikannya 0,002 berarti kurang dari 0,05 (5%) sehingga disimpulkan bahwa variabel penerimaan tarif parkir memberikan dampak yang signifikan terhadap *net income* perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa hasil

penelitian ini terbukti secara teoritis dimana pendapatan perusahaan yang berasal dari kenaikan penerimaan tarif parkir dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

REFERENSI

- Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Halim, Abdul and Bambang Supomo. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Nasution, Akbar. Pemerintah Daerah dan Pendapatan. Jakarta: PT Sofmedia, 2009.
- Soemarso, SR. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Tuanakotta, M.Theodorus. Teori Akuntansi. Jakarta: Gramedia, 2011.

PROFIL PENULIS

Ellyta Muchtar,SE,M.AK

Penulis dilahirkan di Padang ,Sumatera barat tepatnya tanggal 9 Juli 1969 namun dibesarkan dan bersekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan kuliah di Jakarta. Penulis mempunyai 4 orang puteri. Penulis memulai pendidikan kesarjanaan dari D3 Keuangan Perbankan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta lulus tahun 1992. 1993 mulai mengajar di Politehnik Bina Sarana Informatika Jakarta jurusan Perbankan. Kemudian tahun 1996 melanjutkan ke S1 Akuntansi di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Jakarta lulus tahun 1999. Penulis masih tetap mengajar di lingkungan BSI yaitu AMIK dan AMK BSI Jakarta sebagai dosen tetap yayasan dengan pangkat akademik Asisten Ahli (AA) dan mata kuliah yang diampu antara lain Dasar Akuntansi, Akuntansi menengah, Akuntansi Biaya, Akuntansi Bank, Analisa Laporan Keuangan dan beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu ekonomi dan Akuntansi. Tahun 2009 melanjutkan

pendidikan pasca sarjana S2 Akuntansi dengan konsentrasi akuntansi Manajemen di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta (lulus 2011). Tulisan Ilmiah yang pernah dibuat oleh penulis antara lain Implementasi *Good Corporate Governance* Dan Hubungannya Dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure* (terbit dalam jurnal Cakrawala Vol.X .no.1 Maret 2010 ISSN 1411-8629). Implikasi CSR Disclosure dan Kinerja Keuangan terhadap Return Saham (Studi kasus pada perusahaan manufaktur 2007-2009) terbit dalam jurnal akuntansi dan Keuangan Moneter Vol.II No.2 Oktober 2015, Dampak Loan To Deposite Ratio terhadap Prpfitabilitas (Studi kasus pada PT Bank XYZ Banten), prosiding pada Konferensi Nasional Informasi dan Teknologi STMIK Nusa Mandiri pada tanggal 6 Agustus 2016 Pengaruh Minat Dan Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Auntansi Pada Workshop Sertifikat Akuntansi.

Analisa Rasio Likuiditas Laporan Keuangan Pada Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Dian Indah Sari
Akademi Manajemen Informatika & Komputer BSI Bekasi
dian.dhr@bsi.ac.id

ABSTRACT

Abstract-The purpose of this study was to determine and identify the liquidity ratios that affect ability Adira Dinamika Multi Finance Tbk to meet the financial obligations associated with parties outside the company or creditors. In this study, the authors use three different types of data collection methods, namely the literature study (library research), non observation of behavior in the form of observational methods of financial statements issued by Adira Dinamika Multi Finance Tbk during the period 2014 and 2015 and the methods of deduction. Based on the calculation above it can be concluded as follows: Current Ratio or Current Ratio in 2015 increased by 2% from 2014. Quick Ratio or Acid Test Ratio in 2015 increased by 2% compared to the quick ratio in 2014. Cash ratio or Cash ratio in 2015 increased by 0.85 times compared to 2014. Cash Turn Over or ratio Cash Turn Over 2015 increased by 1.15 times compared to 2014. Benefits from the calculation of the liquidity ratio for Adira Dinamika Multi Finance Tbk, as a tool planning ahead, especially with regard to cash planning and debt as well as a trigger for the management to improve their performance.

Keywords : Ratio Analysis, Financial Statements, Liquidity

ABSTRAK

Abstrak-Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi rasio-rasio likuiditas yang berpengaruh terhadap kemampuan **Adira Dinamika Multi Finance Tbk** untuk memenuhi kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data, yaitu studi pustaka (*library research*), Observasi non perilaku berupa metode pengamatan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Adira Dinamika Multi Finance Tbk selama periode 2014 dan 2015 dan metode pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :Rasio Lancar atau *Current Ratio* pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2% dari *Current Ratiotahun 2014*.Rasio Cepat atau *Acid Test Ratio* pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2%

dibandingkan rasio cepat tahun 2014. Rasio Kas atau *Cash Ratio* pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,85 kali dibandingkan Rasio Kas tahun 2014. Rasio Perputaran Kas atau *Cash Turn Over* pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,15 kali dibandingkan Rasio Perputaran Kas tahun 2014. Manfaat dari perhitungan rasio likuiditas ini untuk Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah sebagai alat perencanaan ke depan terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang serta menjadi pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.

Kata Kunci : Analisa Rasio, Laporan Keuangan, Likuiditas

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan sebagai salah satu tujuan dari perdagangan bagi pengusaha dalam negeri atau pengusaha luar negeri. Produk yang dihasilkan dari dalam negeri harus mampu bersaing dengan produk luar negeri. Untuk dapat bersaing dengan produk luar negeri, produk dalam negeri harus mampu meningkatkan kualitas produk.

Salah satu aspek perusahaan dapat tetap menjalankan usaha adalah memiliki pelanggan yang setia. Banyak perusahaan yang tidak dapat melanjutkan usahanya karena pelanggan yang berkurang karena berpindah ke produk lain yang mutunya lebih baik. Dengan berkurangnya pelanggan maka pendapatan perusahaan ikut berkurang. Dengan pendapatan berkurang perusahaan menjadi rugi sehingga perusahaan tidak mampu membayar hutang kepada pihak luar.

Saat ini banyak perusahaan yang tidak mampu melunasi hutang kepada pihak luar perusahaan atau kreditur. Sehingga perusahaan mengalami masalah dalam kondisi keuangan atau tidak dapat melanjutkan operasi perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini perusahaan harus mampu menganalisa laporan keuangan agar mampu memprediksi hal apa yang harus dilakukan dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

Analisa laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Laporan keuangan pada perusahaan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Salah satu analisa laporan keuangan

adalah rasio Likuiditas. Dengan analisa rasio likuiditas diharapkan perusahaan dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dengan pihak luar atau kreditur.

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur. Rasio Likuiditas terdiri dari Rasio Lancar atau *Current Ratio*, Rasio Cepat atau *Acid Test Ratio*, Rasio Kas atau *Cash Ratio*, Rasio Perputaran Kas atau *Cash Turnover*.

Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi rasio-rasio likuiditas yang berpengaruh terhadap kemampuan **Adira Dinamika Multi Finance Tbk** untuk memenuhi kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (Munawir) "laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan".

Menurut (Sugiono dan Untung) "laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan".

Menurut (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) "laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi".

Menurut (Kasmir) "Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu".

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang berisi hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan informasi keuangan bagi pihak internal dan eksternal perusahaan guna pengambilan keputusan.

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir) Tujuan Laporan Keuangan yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Sifat Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan pihak management yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu progress report laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi menurut (Munawir) antara lain :

1. Fakta yang telah dicatat.
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi.
3. Pendapat pribadi.

Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir) keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan antara lain:

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (*historis*), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu.
2. Laporan keuangan dibuat umum artinya untuk semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja.
3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa menguntungkan selalu dihitung kerugiannya.
5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.

Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut (Kasmir) antara lain :

1. Pemilik, guna melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan serta deviden yang diperolehnya.

2. Manajemen, untuk menilai kinerjanya selama periode tertentu.
3. Kreditor, untuk menilai kelayakan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan kemampuan membayar pinjaman.
4. Pemerintah, untuk menilai kepatuhan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah.
5. Investor, untuk menilai prospek usaha tersebut ke depan, apakah mampu memberikan deviden dan nilai saham seperti yang diinginkan.

Jenis Laporan Keuangan

Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca

Menurut (Kasmir) "Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu". Artinya neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi (jumlah dan jenis) harta, utang dan modal perusahaan.

Bentuk Neraca menurut (Munawir) yaitu :

1. Bentuk Scontro (Account Form)
Dimana semua aktiva tercantum disebelah kiri/debet dan hutang serta modal serta modal tercantum disebelah kanan. Neraca bentuk scontro merupakan neraca yang bentuknya seperti bentuk **T** atau sering disebut **T Form**.
2. Bentuk Vertikal (Report Form)
Dalam bentuk ini semua aktiva nampak di bagian atas yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang serta modal. Bentuk report form sering disebut bentuk vertikal. Dalam bentuk laporan isi neraca disusun mulai dari atas terus ke bawah, yaitu mulai dari aktiva lancar, komponen aktiva lainnya, komponen kewajiban lancar, komponen utang jangka panjang dan terakhir komponen modal (ekuitas).
3. Bentuk Neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan perusahaan.

2. Laporan Rugi Laba

Menurut (Kasmir) "Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dan laba rugi dalam suatu periode tertentu". Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi menurut (Kasmir) meliputi : jenis-jenis pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Kemudian laporan laba rugi juga melaporkan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan berikut jumlahnya (nilai uangnya) dalam periode yang sama. Dari jumlah pendapatan dan biaya ini akan terdapat selisih jika dikurangkan. Selisih dari jumlah pendapatan dan biaya ini disebut laba atau rugi.

Bentuk Laporan Laba Rugi menurut (Munawir) yaitu :

1. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan diikuti

dengan harga pokok dari barang yang dijual sehingga diperoleh laba kotor.

2. Bagian yang menunjukkan biaya –biaya operasional yang terdiri dari Biaya Penjualan dan biaya Umum/Administrasi.
3. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh diluar operasi pokok perusahaan (*Non operating/financial income dan expenses*).
4. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidental (*extra ordinary gain or loss*) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan.

Bentuk Laporan Laba Rugi menurut (Kasmir) yaitu :

1. Bentuk tunggal (*single step*)
Bentuk tunggal atau *single step* merupakan gabungan dari jumlah seluruh penghasilan, baik pokok (operasional) maupun diluar pokok (nonoperasional) dijadikan satu, kemudian jumlah biaya pokok dan diluar pokok dijadikan satu.
2. Bentuk majemuk (*multiple step*)
Bentuk majemuk atau *multiple step* merupakan pemisahan antara komponen usaha pokok (operasional) dengan diluar pokok (nonoperasional). Artinya terlebih dahulu dikurangi antara penghasilan pokok dengan biaya pokok, kemudian baru ditambahkan dengan hasil pengurangan penghasilan di luar pokok dengan biaya di luar pokok.

3. Laporan Perubahan Modal

Menurut (Kasmir) "Laporan Perubahan Modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal". Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan modal menurut (Kasmir) "meliputi jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini, jumlah rupiah tiap jenis modal, jumlah rupiah modal yang berubah, sebab-sebab berubahnya modal dan jumlah rupiah modal sesudah perubahan".

4. Laporan Arus Kas

Menurut (Kasmir) "Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan dimana arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan".

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir) "Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu". Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dulu sehingga jelas. Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menaksirkannya.

Analisa Rasio

Pengertian Analisa Rasio

Menurut (Sugiono dan Untung) “analisa rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan”.

Analisa Laporan Keuangan

Menurut (Jumingan) “analisis laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan”.

Menurut (Jumingan) analisis rasio dapat ditentukan berdasarkan alternatif di bawah ini:

1. Berdasarkan pada catatan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan tahun-tahun yang lampau.
2. Berdasarkan pada rasio dari perusahaan lain yang menjadi pesaingnya, dipilih satu perusahaan yang tergolong maju dan berhasil.
3. Berdasarkan pada data laporan keuangan yang *dibudgetkan* (disebut *goal ratio*).
4. Berdasarkan pada rasio industri di mana perusahaan yang bersangkutan masuk sebagai anggotanya.

Tujuan Analisa Laporan Keuangan

Menurut (Munawir) faktor yang paling utama dalam menganalisa laporan keuangan yaitu :

1. Likwiditas Perusahaan yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya (khususnya kewajiban jangka pendek).
2. Solvabilitas Perusahaan yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikwidasi, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Rentabilitas atau *Profitability* Perusahaan yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam satu periode.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan
8. Informasi keuangan lainnya.

Analisa Perbandingan Rasio

Menurut (Munawir) dengan membandingkan Neraca (*comparative balance sheet*) pada dua tanggal atau lebih untuk satu atau dua perusahaan yang berbeda akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Analisa perbandingan laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Analisa horizontal atau analisa dinamis yaitu menganalisa dengan mengadakan perbandingan dari laporan-laporan selama beberapa periode.

2. Analisa vertikal atau analisa statis yaitu menganalisa hanya meliputi satu periode saja (hanya membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan).

Rasio Likuiditas

Pengertian Rasio Likuiditas

Menurut (Kasmir) “Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di Neraca yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek)”.

Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Tujuan dan manfaat Rasio Likuiditas menurut (Kasmir) antara lain :

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan.
9. Menjadi pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.

Jenis-jenis Rasio Likuiditas

Jenis-jenis Rasio Likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan menurut (Kasmir) yaitu :

A. Rasio Lancar atau *Current Ratio*

Menurut (Kasmir) “Rasio lancar atau *current ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan”.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Current ratio menunjukkan tingkat keamanan kreditor jangka pendek atau kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek. *Current ratio* yang tinggi menunjukkan kelebihan uang atau aktiva lancar lainnya dibandingkan kebutuhan sekarang, dan jika *current ratio* rendah kondisinya sebaliknya.

B. Rasio Cepat atau *Quick Ratio*

Menurut (Kasmir) "Rasio cepat atau *Quick Ratio* atau *Acid Test Rasio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau *inventory*".

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang lancar}}$$

Rasio ini lebih tajam daripada *current ratio*, karena hanya membandingkan aktiva yang sangat likuid (mudah dicairkan atau diuangkan) dengan hutang lancar.

C. Rasio Kas atau (*Cash Ratio*)

Menurut (Kasmir) "Rasio Kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa uang kas yang tersedia untuk membayar utang". Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti giro dan tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat)".

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang Lancar}}$$

D. Rasio Perputaran Kas atau *Cash Turn Over*

Menurut (Kasmir) "Rasio Perputaran Kas (*Cash TurnOver*) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan".

$$\text{Cash Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Perputaran Modal Kerja}}$$

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data yaitu studi pustaka (*library research*) dengan membaca literatur dan buku-buku yang mengkaji teori tentang rasio likuiditas dan landasan teori dari isi penulisan. Observasi non perilaku berupa metode pengamatan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Adira Dinamika Multi Finance Tbk selama periode 2014 dan 2015. Metode pengambilan kesimpulan yaitu setelah proses analisa telah selesai dilakukan, maka dilakukan pengambilan kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari analisa data yang dilakukan sebelumnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Neraca Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan alamat kantor pusat di Jl. Jenderal Sudirman Kav 1, Kantor Ruang Rekan Kerja dan Ruang Konferensi Landmark Tower A, 26th-31st floor, Jakarta Selatan, Jakarta 12190, Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian pada Adira Dinamika Multi Finance Tbk, penulis memperoleh laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada tahun 2014 dan 2015 sebagai berikut :

Tabel 1
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Laporan Posisi Keuangan

AKTIVA	31 Des 2015	31 Des 2014
Kas dan setara kas	158,309	124,583
Giro pada bank lain	901,676	924,220
Piutang Dagang	23,410,862	26,099,192
Investasi sewa	1,529,126	1,747,026
Piutang lainnya	122,869	137,389
Biaya dibayar dimuka	289,453	266,295
Pajak dibayar dimuka	228,336	-
Aset keuangan tersedia untuk dijual	797,937	281,851
Aset tetap	243,392	296,144
Aset lainnya	62,247	54,182
TOTAL AKTIVA	27,744,207	29,930,882
PASSIVA		
Liabilitas		

Utang Dagang	776,040	940,484
Utang Pihak Ketiga	11,719,397	12,769,673
Efek yang diterbitkan	9,088,134	10,724,658
Beban akrual	792,945	677,951
Utang pajak	58,261	207,941
Liabilitas lainnya	948,641	576,500
Jumlah liabilitas	23,383,418	25,897,207
Ekuitas		
Ekuitas	165,431	99,232
Laba ditahan	4,195,358	3,934,443
Jumlah ekuitas	4,360,789	4,033,675
TOTAL PASSIVA	27,744,207	29,930,882

Sumber: idx.co.id

Tabel 2
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Des 2015	31 Des 2014
Pendapatan		
Pendapatan usaha	887,705	716,643
Pendapatan dari pembiayaan	5,201,416	5,290,183
Pendapatan lain-lain	1,974,636	2,244,322
Beban Expenses		
Beban Lain-lain	-4,033,295	-4,098,127
Beban penjualan	0	0
Beban gaji dan tunjangan karyawan	-1,585,363	-1,886,966
Beban umum dan administrasi	-841,358	-792,750
Beban Lainnya	-703,186	-412,742
Jumlah laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	900,555	1,060,563
Pendapatan (beban) pajak	235,719	268,398
Jumlah laba (rugi)	664,836	792,165
Pendapatan Lain Setelah Pajak		
Pengukuran kembali kewajiban	-35,471	-22,143
Profit lindung nilai arus kas	93,749	-46,581
Pendapatan lain setelah pajak	58,278	-68,724

Jumlah Laba Komprehensif	723,114	723,441
---------------------------------	----------------	----------------

Sumber: idx.co.id

Tabel 3
Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Periode 31 Desember 2014 dan 2015

Keterangan	2015	2014
Aktiva Lancar	27.438.568	29.750.189
Persediaan	650	650
Hutang Lancar	12.495.437	13.710.157
Rata-rata Piutang	7.796.643	8.690.992
Penjualan	8.063.757	8.251.148
Rata-rata Persediaan	650	650
Harga Pokok Penjualan	650	650
Rata-rata Modal Kerja	1.470.531	1.342.067

Sumber: Hasil olahan penulis

Neraca Adira Dinamika Multi Finance Tbk pada tahun 2014 menunjukkan bahwa total aktiva, total kewajiban dan modal sebesar Rp. 27,744,207. Jumlah tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan total aktiva dan total kewajiban dan modal pada tahun 2015. Pada tahun 2015 total aktiva, total kewajiban dan modal berjumlah Rp. 29,930,882. Pada tahun 2014 obligasi (hutang jangka panjang) berjumlah Rp 9,088,134 sedangkan pada tahun 2015 berjumlah Rp 10,724,658. Hal ini menunjukkan bahwa hutang jangka panjang di tahun 2014 lebih kecil dari pada jumlah hutang jangka panjang di tahun 2015, sehingga total aktiva dan total kewajiban dan modal tahun 2014 juga lebih kecil dari pada total aktiva dan total kewajiban dan modal di tahun 2015.

Rasio Rentabilitas Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur.

Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek (*likuiditas*) berikut ini diberikan beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut.

A. Rasio Lancar atau *Current Ratio*

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

$$\begin{aligned} 2014 &= \text{Aktiva Lancar} : \text{Hutang Lancar} \\ &= 29.750.189 : 13.710.157 \\ &= 2,17 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2015 &= \text{Aktiva Lancar} : \text{Hutang Lancar} \\ &= 27.438.568 : 12.495.437 \\ &= 2,19 \text{ kali} \end{aligned}$$

B. Rasio Cepat atau *Acid Test Ratio*

$$\text{Acid Test Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang lancar}}$$

$$\begin{aligned} 2014 &= \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \\ &= \frac{29.750.189 - 650}{13.710.157} \\ &= 2,17 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2015 &= \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \\ &= \frac{27.438.568 - 650}{12.495.437} \\ &= 2,19 \text{ kali} \end{aligned}$$

C. Rasio Kas atau *Cash Ratio*

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang lancar}}$$

$$\begin{aligned} 2014 &= \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang lancar}} \\ &= \frac{124.583 + 924.220}{13.710.157} \\ &= \frac{1.048.803}{13.710.157} \\ &= 0,0765 \\ &= 7,65 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2015 &= \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang lancar}} \\ &= \frac{158.309 + 901.676}{12.495.437} \\ &= \frac{1.059.985}{12.495.437} \\ &= 0,085 \\ &= 8,50 \% \end{aligned}$$

D. Rasio Perputaran Kas atau *Cash Turn Over*

$$\text{Cash Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

$$\begin{aligned} 2014 &= \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}} \\ &= \frac{7.796.643}{1.470.531} \\ &= 5,3 \text{ kali} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2015 &= \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}} \\ &= \frac{8.251.148}{1.342.067} \\ &= 6,15 \text{ kali} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan analisa rasio solvabilitas laporan keuangan pada Adira Dinamika Multi Finance Tbk pada tahun 2014 dan 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio Lancar atau *Current Ratio*

Current ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Adira Dinamika Multi Finance Tbk memiliki likuiditas yang baik jika dilihat dari *current ratio* > 1 dengan *current ratio* untuk periode 2015 meningkat sebesar 2% dari *current ratio* tahun 2014. Interpretasi *current ratio* 2014 dengan angka 2,17 kali mempunyai maksud bahwa setiap 1 Rupiah hutang lancar perusahaan dijarnin oleh 2,17 Rupiah aktiva lancar. Sedangkan interpretasi *current ratio* 2015 dengan angka 2,19 kali memiliki arti setiap 1 Rupiah hutang lancar dijarnin oleh 2,19 Rupiah aktiva lancar.

2. Rasio Cepat atau *Acid Test Ratio*

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau *inventory*. Adira Dinamika Multi Finance Tbk memiliki rasio cepat selama dua periode yang meningkat sebesar 2%. Untuk rasio cepat, ketika rekening persediaan dikeluarkan dari komponen aktiva lancar maka pada tahun 2014 diperoleh rasio cepat sebesar 2,17 yang artinya setiap 1 Rupiah utang lancar tanpa persediaan dijamin oleh 2,17 Rupiah aktiva lancar. Sedangkan tahun 2015, rasio cepat perusahaan menunjukkan angka 2,19 kali yang artinya setiap 1 Rupiah hutang lancar tanpa persediaan dijarnin oleh 2,19 kali Rupiah aktiva lancar.

3. Rasio Kas atau *Cash Ratio*

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Adira Dinamika Multi Finance Tbk memiliki rasio kas pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,85 % dari rasio kas tahun 2014. Pada tahun 2014 rasio kas perusahaan sebesar 7,65 %. Sedangkan rasio kas perusahaan pada tahun 2015 sebesar 8,50 %.

4. Rasio Perputaran Kas atau *Cash Turnover*

Rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar utang dan biaya yang berkaitan dengan penjualan. Adira Dinamika Multi Finance Tbk memiliki rasio perputaran kas pada tahun 2015 meningkat sebesar 1,15 kali dari tahun 2014. Rasio perputaran kas tahun 2014 sebesar 5,3 kali. Sedangkan untuk periode 2015, rasio perputaran kas yaitu sebesar 6,15 kali.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio Lancar atau *Current Ratio*

Rasio Lancar atau *Current Ratio* pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2% dari *Current Ratio* tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh faktor kenaikan hutang lancar yang signifikan, seimbang dengan meningkatnya jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Rasio Cepat atau *Acid Test Ratio*

Rasio Cepat atau *Acid Test Ratio* pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2% dibandingkan Rasio Cepat tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan mengalami peningkatan.

5. Rasio Kas atau *Cash Ratio*

Rasio kas pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,85 kali dibandingkan rasio kas tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam ketersediaan kas untuk membayar utang.

6. Rasio Perputaran Kas atau *Cash Turn Over*

Rasio Perputaran Kas pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,15 kali dibandingkan rasio perputaran kas tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam ketersediaan kas untuk membayar utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan.

7. Manfaat dari perhitungan rasio likuiditas ini untuk Adira Dinamika Multi Finance Tbk adalah sebagai alat perencanaan ke depan terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang serta menjadi pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.

REFERENSI

- Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2009
- Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI, 2007
- Jumingan. Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Munawir, S. Analisa Laporan Keuangan. Edisi ke-4. Yogyakarta: Liberty, 2010
- Prastowo, Dwi. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2012
- Sugiono, Arief dan Edy Untung. Dasar Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: Grasindo, 2008

PROFIL PENULIS

DIAN INDAH SARI, SE. AK. MM, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Sriwijaya Palembang, lulus tahun 2000. Memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas BSI Bandung, lulus tahun 2014. Saat ini menjadi dosen AMIK BSI Cikarang.

“Tax Amnesty” Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Andreas Rudiwantoro
Program Studi Komputerisasi Akuntansi
AMIK BSI Karawang
e-mail : andreas.aed@bsi.ac.id

Abstract— In the Tax Amnesty Constitution, it is confirmed that tax amnesty is an act of abolition towards outstanding taxes debt, which will not be fined for taxation administration and convicted of crime in the taxation field by unveiling wealth which has not been reported (either declared or repatriated) in the annual tax report (SPT) of the previous year and paying retribution as have been regulated in the particular constitution.

The government as the authorities put a serious attention towards the success of this tax amnesty policy, which is hoped to give a positive impact towards national economy and development. Various socializations, counselings, seminars, and discussions have been held in the entire nation to support this policy. Tax amnesty has positive goals, which in short term, this will generate additional income from the retribution funds paid by taxpayers who join this program, and for the following years, this policy will create obedience of the taxpayers in paying their outstanding taxes.

Keywords: tax amnesty, compensation, declaration, repatriation, taxpayers and compliance of taxpayers.

Abstrak – Dalam UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ditegaskan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta yang belum disampaikan (deklarasi dan repatriasi) dalam laporan SPT tahun sebelumnya dan membayar uang tebusan sesuai yang diatur dalam UU tersebut.

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan menaruh perhatian cukup serius terhadap kesuksesan kebijakan tax amnesty / pengampunan pajak yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, seminar dan diskusi telah dilakukan diseluruh pelosok negeri. Pengampunan pajak atau tax amnesty memiliki tujuan positif dimana dalam jangka pendek akan menghasilkan tambahan penerimaan negara dari uang tebusan yang dibayarkan wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak dan untuk tahun tahun kedepan akan menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya.

Kata Kunci: Pengampunan pajak, uang tebusan, deklarasi, repatriasi, wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 1 Juli 2016, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, dan telah disahkan pula dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 28 Juni 2016 sebagai UU (Undang-Undang) Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. UU ini memiliki masa berlaku dari tanggal 18 Juli 2016 dan akan berakhir 31 Maret 2017.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama suatu negara dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dapat mewujudkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk menggerakkan roda pembangunan, membangun fasilitas umum yang memadai dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016, sumber utama penerimaan kas negara berasal dari pajak. Semakin besar total pengeluaran pemerintah maka akan diikuti semakin tinggi target penerimaan pajak yang harus dicapai. Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai garda terdepan selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (berbasis elektronik).

Sejak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2014 – 2019, Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Yusuf Kalla memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor. Salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Beliau adalah percepatan pembangunan infrastruktur, karena sektor tersebut dapat memberikan multiplier effect yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional serta percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Keseriusan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur saat ini dapat kita lihat secara nyata. Di berbagai wilayah sedang berlangsung pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, baik infrastruktur darat, laut maupun

udara seperti pelabuhan, bandar udara, jalan tol, jalan lintas propinsi yang melewati daerah derah pedalaman, jembatan dan lain lain.

Gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 mencapai Rp 313,5 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan APBN-Perubahan (APBN-P) tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 290,3 triliun. Hal ini menjadi masalah karena sumber penerimaan negara sekitar 75 persen berasal dari sektor pajak dan saat bersamaan realisasinya tidak tercapai, kecenderungan mengalami penurunan dari tahun ke tahun (Rasbin,2016).

Proyeksi Penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 berjumlah 255.461.700, dan dari jumlah tersebut yang bekerja mencapai 93.720.000, namun hingga tahun 2015 total wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mencapai 27.571.471 (Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki NPWP). Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel 1

Tabel 1
Tabel Wajib Pajak (WP) dan Rasio Kepatuhan
Tahun 2015

Keterangan	WP Terdaftar	WP Wajib Lapor SPT	Realisasi WP Lapor SPT	Rasio Kepatuhan
WP Badan	2.472.632	1.184.816	676.405	57,09%
WP Non Karyawan	5.239.385	2.054.732	837.228	40,75%
WP Karyawan	22.332.086	14.920.292	9.431.934	63,22%
Total	30.044.103	18.159.840	10.945.567	60,27%

Sumber: Olahan data dari www.pajak.go.id/content/artikel/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak

Dari tabel 1 tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi cukup memprihatinkan. Secara total rasio kepatuhan pajak hanya sebesar 60,27%.

Seperti telah diuraikan pada paragraf sebelumnya dan terlepas dari efek kelesuan ekonomi global, rendahnya kepatuhan wajib pajak ini berdampak serius dimana target penerimaan dari sektor pajak yang ditetapkan setiap tahun dalam APBN tidak pernah tercapai, kecuali pada tahun 2011 actual penerimaan mendekati 100% dari target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2009 - 2015 (Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Penerimaan
2009	652	620	95,09%
2010	743	723	97,31%
2011	879	874	99,43%
2012	1.016	981	96,56%
2013	1.148	1.077	93,82%
2014	1.246	1.143	91,73%
2015	1.294	1.055	81,51%

Sumber: Olahan data dari Data Litbag Okezone Finance & Liputan6.com

Dari tabel 2 terlihat bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2015, realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target. Realisasi penerimaan dari tahun ke tahun naik, tetapi kenaikan tersebut memiliki rasio dibawah target.

Rendahnya tingkat pempatuhan dan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi momentum pembenahan secara komprehensif di sektor perpajakan. Kebijakan tax amnesty yang telah digulirkan pemerintah pada pertengahan tahun 2016 ini merupakan gebrakan untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia sadar pajak dan dengan sukarela mengungkapkan semua objek pajak yang belum dilaporkan pada tahun sebelumnya. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo memberikan jaminan untuk tidak memperlakukan dari mana objek pajak tersebut diperoleh. Yang terpenting adalah berani untuk jujur maka pengampunan pajak akan menjadi hak bagi wajib pajak tersebut. Tax amnesty merupakan fasilitas negara yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia hanya sekali tidak ada jilid ke-2 ataupun perpanjangan waktu. Tax amnesty penting sebagai sarana membangun sistem perpajakan yang baru.

Berdasarkan ulasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam akan manfaat kebijakan tax amnesty 2016 dalam sebuah tulisan dengan judul "Tax Amnesty" Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak".

1.2. Permasalahan

Terdapat sebuah pertanyaan yang ingin dijawab dalam penulisan makalah ini, yaitu apakah kebijakan tax amnesty yang sedang digulirkan oleh otoritas perpajakan pada tahun 2016 akan mampu membangun kepatuhan wajib pajak pada tahun tahun sesudahnya.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak.

Pengertian pajak menurut rochmat Sumitro dalam Ahmad Tjahyono dan M.Fakri Husein, 2005, adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut pajak memiliki beberapa ciri yaitu (a) Dipungut berdasarkan Undang-Undang; (b) Tidak mendapat jasa

timbang balik langsung; (c) Dapat dipaksakan; (d) Digunakan untuk pembangunan.

Pajak memiliki 2 fungsi pokok yaitu (a) Fungsi penerimaan (budgetair, dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah; (b) Fungsi mengatur (regulator), dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur di bidang sosial dan ekonomi.

Dalam hal pemungutannya, terbagi dalam 3 sistem, yaitu (a) Official assesment system; (b) Self assessment system; (c) Withholding system. Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Wajib pajak atau yang sering disebut subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.2. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bentuknya berupa hukuman yang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi terbagi tiga yaitu, yang pertama sanksi administrasi dalam bentuk denda yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Yang kedua, sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi ini dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima pembayaran. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak, karena jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Sanksi pidana, terdiri dari 2, yang pertama adalah pidana kurungan. Sanksi ini terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah satu tahun. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan. Kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, tidak ada pembagian atas kelas kelas dan hukuman denda dapat menggantikan pidana kurungan. Dalam kasus tertentu diizinkan menjalani hukuman kurungan di rumah sendiri (tahanan rumah) dengan pengawasan pihak berwajib. Yang kedua pidana penjara. Sanksi ini terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum untuk pidana penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan hukuman denda tidak dapat menggantikan pidana penjara.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, tetapi jika tingkat kepatuhan rendah, maka target penerimaan pajak akan sulit dicapai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 dalam Sri Rustiyansih, 2011, wajib pajak masuk dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- Wajib Pajak yang melaporkan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

Menurut Nurmantu dalam Ngadiman dan Daniel Huslin, 2015, diuraikan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material. Yang pertama Kepatuhan Formal, wajib pajak masuk dalam Kepatuhan Formal apabila dikategorikan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah
- c. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

Yang kedua Kepatuhan Material, yaitu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang undang perpajakan. Wajib pajak dikategorikan patuh secara material, apabila:

- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak.
- b. Wajib pajak bersikap kooperatif terhadap petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan dan wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan wujud nyata sebagai warga negara yang baik.

2.4. Tax Amnesty

Arti sederhana dari tax amnesty adalah pengampunan pajak atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahun sebelumnya dan membayar uang tebusan. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Dana yang terkumpul dari uang tebusan kemudian menjadi faktor penambah penerimaan pajak negara.

Dalam Ngadiman dan Daniel Huslin, 2015, tax amnesty adalah suatu kesempatan yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Tax amnesty merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal pajak untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberian insentif.

Kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak sudah diterapkan oleh banyak negara, ada sekitar 31 negara yang telah menerapkan tax amnesty. Banyak cerita gagal dan sukses dalam menjalankan kebijakan tax amnesty tersebut. Filipina adalah salah satu negara yang gagal dalam menerapkan tax amnesty, sementara India, Afrika Selatan dan Italia adalah sebagian contoh negara yang sukses dalam menerapkan kebijakan tax amnesty.

Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5, Indonesia menjalankan kebijakan tax amnesty kemudian pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden (Kepres) No. 26 yang akhirnya diubah menjadi Kepres No. 72 Tentang Pengampunan Pajak. Kurangnya dukungan dari lapisan masyarakat, penegak hukum dan perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan serta tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara

menyeluruh maka tax amnesty tahun 1964 dan 1984 tidak berhasil.

Januari 2008, Pemerintah Indonesia menjalankan aturan Sunset Policy yang diberlakukan selama 14 bulan. Sunset Policy ini dapat dikatakan versi mini dari tax amnesty. Sunset Policy adalah kebijakan pemerintah dalam menerapkan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang kurang bayar maupun melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh.

Per 1 Juli 2016, Pemerintah Indonesia kembali menjalankan kebijakan tax amnesty, kebijakan ini akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Program tax amnesty 2016 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan sekali lagi kepada wajib pajak yang selama ini belum terbuka secara administrasi perpajakan atau selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dari objek pajak yang dimiliki.

Belajar dari negara yang pernah gagal dan dari negara yang sudah berhasil dalam menjalankan program tax amnesty, tentu kita semua berharap bahwa tax amnesty 2016 akan sukses dalam menghimpun dana dari sektor pajak dan sukses dalam meningkatkan jumlah wajib pajak yang taat pajak. Langkah lanjutan dalam reformasi administrasi perpajakan menjadi faktor penting. Kebijakan tax amnesty 2016 harus digunakan oleh Otoritas Pajak Indonesia dalam hal ini Dirjen Pajak untuk meningkatkan basis data secara benar dan akurat, sehingga tidak ada lagi wajib Pajak yang menyembunyikan objek pajak yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

III. PEMBAHASAN

Dalam jangka panjang, kebijakan tax amnesty 2016 memberi harapan besar akan peningkatan penerimaan sektor pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pihak-pihak yang selama ini menjadi penumpang gelap pembangunan atau pihak-pihak yang telah menikmati hasil pembangunan, tetapi belum memberikan pembayaran pajak dengan benar, akan tergugah hatinya untuk segera melaksanakan kewajiban yang tertunda.

Pada tahap selanjutnya, program tax amnesty diharapkan akan mampu memperbaiki sistem administrasi perpajakan, akan mengurangi kebocoran pajak akibat meningkatnya kegiatan underground economy yang selama ini luput dari data perpajakan.

Terbongkarnya kasus Panama Papers ke ruang publik menjadi indikator permasalahan perpajakan selama ini. Dalam dokumen Panama Papers, banyak aset orang Indonesia yang ditempatkan di sejumlah negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau bebas pajak (tax haven country). Aset aset tersebut tentunya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). Disisi lain masih banyak juga wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya yang tertanam di

dalam negeri. Banyak alasan mengapa mereka enggan untuk melapor.

Pemerintah, dalam hal ini direktorat jenderal pajak, telah membuat terobosan dengan digulirkannya tax amnesty, yang memiliki tujuan utama meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menarik masuk dana dana yang telah tertanam di luar negeri, pengungkapan objek objek pajak baru yang belum dilaporkan. Pengumpulan data perpajakan inilah yang akan menjadi modal besar bagi otoritas pajak dalam melakukan penegakan hukum.

Tax amnesty menjadi momentum penting dan hendaknya dimanfaatkan dengan sebesar besarnya oleh seluruh wajib pajak. Karena di tahun 2018 akan diberlakukan mekanisme pertukaran informasi perpajakan secara otomatis. Jika mekanisme ini berjalan, lalu lintas data menjadi transparan, tidak ada ruang untuk menyembunyikan data. Semua akan terlacak oleh pihak pihak yang memiliki otoritas.

Dengan adanya agenda pertukaran data antar negara yang akan segera diberlakukan, ketersediaan data secara akurat memiliki peran yang amat penting dalam menggali potensi penerimaan pajak. Ketersediaan data tersebut akan tercapai melalui pengungkapan data secara jujur dan sukarela oleh wajib pajak itu sendiri. Untuk menjembatani hal tersebut, kebijakan tax amnesty 2016 memiliki peran yang sangat penting. Terkait dengan tax amnesty, sangat perlu dijelaskan subyek pajak, objek pajak dan bagaimana skema tarif tax amnesty

Subyek pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak atau tax amnesty adalah setiap wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh, kecuali wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan dan wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Jenis objek pajak yang berhak mendapat pengampunan pajak atau tax amnesty adalah objek pajak yang belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT tahunan PPh, yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), Pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM), harta warisan dan harta hibah yang diterima dari orang tua kandung.

Objek pajak berikut ini bukan objek pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak dan terbebas dari segala resiko jika objek pajak tersebut diketemukan oleh dirjen pajak dikemudian hari, yaitu objek pajak yang diterima oleh ahli waris yang penghasilannya di bawah PTKP, atau objek pajak tersebut sudah dilaporkan di SPT pemberi hibah.

3.1. Mekanisme Dasar Pengajuan Permohonan Pengampunan Pajak / Tax Amnesty.

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Wajib Pajak yang ikut program tax

amnesty berhak untuk mendapatkan fasilitas negara dalam bentuk penghapusan pajak terhutang. Mekanisme wajib pajak melakukan pengajuan permohonan pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, wajib pajak harus mengungkapkan terlebih dahulu semua nilai aktiva bersih yang belum pernah dilaporkan di SPT tahunan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.
- b. Tahap kedua adalah membayar uang tebusan sesuai tarif yang telah ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Besarnya tarif terbagi dalam 3 periode waktu, untuk memberikan kebebasan waktu bagi wajib pajak kapan akan ikut program pengampunan pajak. Periode I, berlaku dari 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016. Periode II, berlaku dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan Periode III, dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Semakin cepat wajib pajak melaporkan asetnya atau objek pajaknya, maka tarif tarif tebusan semakin rendah.
 - b.1. Apabila wajib pajak mengungkapkan harta / objek pajak (deklarasi) yang belum dilaporkan dalam tahunan 2015, di dalam wilayah Indonesia atau memasukkan objek pajak (repatriasi) dari luar negeri, cukup membayar tebusan sebesar 2% pada periode I, 3% pada periode II dan 5% pada periode III.
 - b.2. Apabila wajib pajak hanya mengungkapkan harta / objek pajak yang berada di luar negeri, tidak membawa masuk ke wilayah Indonesia, maka besarnya tarif menjadi 2 kali lipat dari point b.1., yaitu membayar uang tebusan sebesar 4% pada periode I, 6% pada periode II dan 10% pada periode III.
 - b.3. Bagi wajib pajak UMKM, pengungkapan objek pajak sampai dengan 10 milyar, membayar uang tebusan hanya sebesar 0.5%. Pengungkapan objek pajak lebih besar dari 10 milyar, membayar uang tebusan sebesar 2%.
- c. Setelah membayar uang tebusan, maka wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan pengampunan pajak kepada menteri keuangan. Jadi sangatlah tepat slogan yang dikeluarkan oleh dirjen pajak, yaitu ungkap, tebus dan kelegaan akan dirasakan oleh wajib pajak tersebut.

3.2. Multiplier Efek Dan Potensi Dana Repatriasi Melalui Kebijakan Tax Amnesty

Berdasarkan program tax amnesty yang pernah dilakukan sepanjang sejarah diseluruh dunia, ekspektasi pemerintah Indonesia dapat dikatakan luar biasa optimis. Pemerintah optimis bahwa program yang sedang digulirkan ini akan berhasil karena dalam pelaksanaannya sudah memiliki payung hukum yang jelas dalam bentuk undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI tanggal 28 Juni 2016. Kebijakan tax amnesty menjadi tumpuan pendapatan negara ditengah merosotnya penerimaan negara.

Alasan yang kedua yang menjadikan pemerintah Indonesia cukup optimis tax amnesty akan berhasil adalah akan segera diberlakukannya automatic exchange

information pada tahun 2018, sehingga momentum tax amnesty saat ini merupakan kesempatan yang tepat untuk segera mengungkapkan semua objek pajak yang selama ini disembunyikan.

Program tax amnesty memiliki multiplier efek yang sangat positif terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Darussalam dalam Rasbin, 2016, kebijakan tax amnesty akan berdampak terhadap pembangunan di Indonesia melalui tiga jalur. Pertama, dana yang masuk ke Indonesia tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian di tanah air. Kedua, dana tebusan yang dihasilkan oleh tax amnesty bisa digunakan secara langsung bagi pembangunan yang pro rakyat seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penciptaan lapangan kerja bagi kalangan buruh. Ketiga, dalam jangka panjang akan menjamin penerimaan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dalam dokumen Panama Papers, dana wajib pajak warga negara Indonesia (WNI) yang tersimpan di luar negeri cukup besar. Dana tersebut tersimpan di negara negara yang memiliki tarif pajak yang rendah atau tax haven country. Mengutip pernyataan dari wakil ketua komisi XI, Jon Erizal, yang menyebutkan bahwa ada sekitar Rp 11.400 triliun aset WNI yang tersimpan di negara berpajak rendah. Pendapat ini diperkuat oleh Ken Dwijugiasteady dalam Rasbin, 2016, ada sekitar 2.040 dari 2.580 WNI yang menyimpan dananya di tax haven country dengan jumlah dana mencapai Rp 11.500 triliun. Melalui Kebijakan tax amnesty diharapkan dana tersebut dapat kembali masuk ke wilayah NKRI.

Efek sesungguhnya dari kembalinya dana-dana tersebut masuk ke NKRI, dapat diinvestasikan ke berbagai sektor investasi. Salah satunya instrumen instrumen di pasar modal seperti saham, obligasi dan produk produk derivatif. Untuk Menampung dana repatriasi, jasa keuangan yang pertama kali mampu menyerap dana tersebut adalah bank, dan dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito. Tetapi imbal balik deposito cukup rendah dan ini mungkin tidak menarik sebagai sarana investasi. Jika tidak tertarik berinvestasi di pasar modal maupun deposito, masih ada pilihan investasi lainnya, yaitu menempatkan dana dana tersebut pada produk danareksa dan surat utang negara (SUN). Kedua instrumen ini dapat menjadi pilihan karena memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan instrumen instrumen investasi yang dikeluarkan pihak swasta.

Selain berinvestasi pada instrumen-instrumen pasar modal, dana repatriasi dapat ditanamkan juga secara langsung di sektor property (rumah sakit dan perumahan) dan infrastruktur. Dewasa ini, pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya membangun sarana infrastruktur di berbagai bidang. Masih banyak peluang karena pemerintah membutuhkan banyak dana dan imbal balik hasilnya cukup menarik dibandingkan dengan investasi disektor pasar modal dan produk produk turunannya.

Program tax amnesty merupakan pintu masuk pemerintah untuk melakukan reformasi pajak. Dari program ini pemerintah akan mendapatkan dana segar dari dalam negeri maupun luar negeri dan akan ada penambahan basis pajak baru.

Supaya reformasi pajak terjadi secara berkelanjutan, perlu ada revisi di beberapa undang-undang terkait pajak, semisal revisi secara struktural terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Perubahan pada administrasi pajak terkait dengan pengelolaan data informasi atas tax amnesty juga perlu dilakukan. Administrasi yang memudahkan wajib pajak dan yang melindungi wajib pajak.

Program tax amnesty memiliki kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek meningkatkan penerimaan negara. Dalam Jangka panjang, jika diikuti upaya penegakan hukum yang jelas dan tegas serta upaya perbaikan administrasi pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutanganya.

3.3. Hasil Pencapaian Tax Amnesty Periode Satu.

Bersumber pada rujukan <http://economy.okezone.com>, periode I program tax amnesty telah berakhir secara sukses. Namun diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan masih sedikit wajib pajak yang ikut tax amensty. Periode I adalah tahap awal yang sudah dilalui, masih ada periode II dan Periode III yang akan berakhir 31 Maret 2017.

Merujuk data statistik amnesty pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, hasil perolehan atau statistik pada periode satu adalah sebagai berikut; repatriasi sebesar Rp 137 triliun, Deklarasi luar negeri Rp 951 triliun dan deklarasi dalam negeri sebesar Rp 2.532 triliun, sehingga secara total berjumlah Rp 3.620 triliun dengan dana tebusan yang masuk ke kas negara berjumlah Rp 97,2 triliun. Pada tahap I, dana tebusan baru mencapai 58,91% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 165 triliun. Jumlah peserta tax amnesty tahap I sebesar 366.768 wajib pajak atau baru mencapai 2% dari total wajib pajak yang terdaftar menyampaikan SPT 2015 sebesar 18.159.840.

Jadi masih ada 98% wajib pajak terdaftar yang belum mengikuti tax amnesty. Pemerintah akan terus berupaya mendorong realisasi tax amnesty untuk memastikan target yang telah ditetapkan tetap aman. Ada empat langkah yang telah disiapkan pemerintah supaya jumlah peserta tax amnesty tidak surut, bahkan bertambah untuk periode II dan periode III.

Pertama, Pemerintah akan tetap fokus pada wajib pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak berpengaruh dan berkuasa baik ditingkat pusat maupun daerah seperti pejabat pemerintahan, jajaran direksi BUMD, BUMN dan perusahaan swasta. Kedua, Pemerintah juga akan menyisir wajib pajak yang tidak masuk pada golongan pertama, tetapi dari hasil analisis data yang dilakukan otoritas pajak memiliki kendaraan bermotor, kapal, properti, saham, obligasi dan aset aset

lainnya. Data tersebut kemudian akan dibandingkan dengan data SPT wajib pajak. Ketiga, pihak yang akan disasar adalah wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Upaya-upaya persuasif akan dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan data penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keempat, menasar wajib pajak profesi seperti dokter, pengacara, akuntan, penilai aset, notaris, konsultan pajak, arsitek dan lainnya.

3.4. Konsekuensi Tidak Ikut Program Tax Amnesty

Program tax amnesty merupakan hak yang boleh dimanfaatkan ataupun tidak oleh para wajib pajak. Ikut atau tidak ikut adalah pilihan bebas para wajib pajak itu sendiri. Bagi wajib pajak yang mengungkapkan aset atau objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT tahun sebelumnya kemudian membayar uang tebusan akan diberi pengampunan.

Apabila mempunyai keyakinan bahwa aset yang belum dilaporkan berasal dari penghasilan yang sudah kena pajak, berasal dari warisan, hibah, sumbangan, wajib pajak cukup melakukan pembetulan SPT sebelum tanggal 31 Maret 2017. Ikut program amnesty atau memilih jalur pembetulan SPT, wajib pajak dituntut untuk jujur dalam pelaporannya.

Pelaporan objek pajak dilakukan secara mandiri, tidak akan dikoreksi ataupun diperiksa oleh otoritas pajak atau lebih dikenalnya menganut sistem self assesment. Dengan sistem ini, diharapkan para wajib pajak dapat melaporkan objek pajaknya secara jujur.

Pemerintah melalui menteri keuangan menegaskan bahwa tidak akan ada penegakan hukum bagi wajib pajak yang melaporkan seluruh aset atau objek pajak dalam periode pengampunan pajak. Bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan program tax amnesty ataupun tidak melakukan pembetulan SPT, akan ada penegakan hukum yang amat keras setelah masa tax amnesty berakhir.

UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak sudah mempersiapkan mekanisme dan aturan bagi wajib pajak yang tidak menggunakan program tax amnesty atau belum mengungkapkan seluruh objek pajaknya. Aturan tersebut tertuang dalam Bab VIII, Pasal 18 ayat 1 sampai 4.

Menurut Hestu Yoga dalam <http://finance.detik.com>, apabila wajib pajak ikut tax amnesty tetapi ada objek pajak yang belum diungkapkan, kemudian objek pajak tersebut diketemukan oleh otoritas pajak, maka atas objek pajak tersebut akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dan diberikan sanksi administrasi sampai dengan 30% ditambah denda sebesar 200% dari total pajak terutang.

Apabila wajib pajak tidak ikut tax amnesty, kemudian otoritas pajak menemukan data atau informasi mengenai objek pajak yang diperoleh sejak tanggal 01 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh, maka objek

pajak yang belum diungkap tersebut akan dikenakan pajak penghasilan di tambah sanksi administrasi sesuai UU Perpajakan.

Saksi pidana juga akan diberikan kepada wajib pajak, jika wajib pajak tidak ikut tax amnesty tetapi dengan sengaja melakukan kejahatan di bidang perpajakan. Sanksi pidana diberikan maksimal 6 tahun.

Untuk menghindari saksi administrasi sebesar 200% dari harta yang tidak dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, ada baiknya wajib pajak untuk segera memanfaatkan program terbatas tax amnesty yang akan berakhir 31 Maret 2017.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi point penting dalam tax amnesty ini bukan berapa total dana yang dapat masuk, tetapi hal terpenting dari program tax amnesty adalah penambahan jumlah wajib pajak yang belum melaporkan asetnya selama ini dan wajib pajak yang belum memiliki NPWP tetapi sudah memiliki penghasilan diatas PTKP.

Pasca tax amnesty, pencapaian target penerimaan negara dengan jumlah wajib pajak yang lebih banyak akan meringankan wajib pajak. Selain itu wajib pajak yang telah terdaftar sejak dahulu akan merasakan keadilan dengan para pengemplant pajak yang kini telah terjaring atau terdaftar dengan seluruh data dan informasi kekayaannya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bersandar pada pengungkapan aset-aset atau harta bersih wajib pajak yang belum dilaporkan dalam SPT tahun sebelumnya. Data dan informasi terkait harta dan kekayaan wajib pajak yang terungkap berdasarkan Surat Permohonan Pengampunan Pajak akan digunakan oleh otoritas pajak sebagai basis data untuk menggali potensi pajak di tahun tahun mendatang dan dapat juga digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak.

Program tax amnesty merupakan bagian dari strategi reformasi perpajakan yang berkelanjutan dan struktural. Untuk meyakinkan wajib pajak, membangun kepercayaan wajib pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka UU KUP harus dirancang secara baik dengan penegakan hukum yang adil dan tegas.

Kepatuhan wajib pajak menjadi barometer utama dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk menjamin kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak harus diberikan akses yang seluas luasnya masuk ke data keuangan wajib pajak. Sehingga tidak ada ruang bagi wajib pajak menyembunyikan segala aset yang dimilikinya.

Fokus utama pemerintah dalam mengulirkan program tax amnesty adalah guna membangun kerangka dasar (reformasi perpajakan) menuju masyarakat patuh dan jujur dalam membayar pajak.

V. REFERENSI

- bisnis.liputan6.com/read/2255380/3-penyebab-penerimaan-pajak-ri-selalu-di-bawah-target
- economy.okezone.com/read/2015/03/23/20/1122994/penerimaan-pajak-lima-tahun-terakhir-tak-capai-target
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal akuntansi. Universitas Tarumanagara.
- Prastowo, Yustinus. 2016. Menimbang Manfaat Kebijakan Tax Amnesty. Materi Seminar Nasional Kebijakan Tax Amnesty. Jakarta. Center For Indonesia Taxation Analysis.
- Rasbin. 2016. Tax Amnesty, Potensi Dana Repatriasi, Dan Pembangunan Di Indonesia. Majalah Info Singkat Vol. VIII, No. 08/II/P3DI/April/2016. Jakarta
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya Warta No. 02 Tahun XXXV/Juli 2011. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.
- Tjahyono, Achmad dan M. Fakri. 2005. Perpajakan. Edisi 3. Penerbit UPP AMP YKPN
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Bandung. Penerbit Fokusindo Mandiri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Jakarta
- <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3256753/tidak-jujur-laporkan-harta-saat-ikut-tax-amnesty-ini-akibatnya>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a0a2ea82585/pahami-risiko-jika-tak-ikut-program-tax-amnesty>
- <http://www.pengampunanpajak.com>
- info@pengampunanpajak.com
- [www.pajak.go.id/content/article/hilangkan-rasa-takut-mari-ikut-amnesty-pajak.](http://www.pajak.go.id/content/article/hilangkan-rasa-takut-mari-ikut-amnesty-pajak)
- [www.pajak.go.id/content/article/bersyukur-dengan-jujur.](http://www.pajak.go.id/content/article/bersyukur-dengan-jujur)
- www.kompasiana.com/renindah/apa-sih-tax-amnesty
- <https://id.wikipedia.org/wiki/wajib-pajak>
- [www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak.](http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak)
- [www.pajak.go.id/content/artikel/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak.](http://www.pajak.go.id/content/artikel/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak)
- <http://www.bps.go.id>

PROFIL PENULIS

Andreas Rudiwantoro, SE., MM. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta tahun 1996. Lulus Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA tahun 2007. Aktif Mengajar sebagai dosen dari tahun 2010 hingga sekarang di Akademi Komputer Akuntansi BSI . Mengampu mata kuliah akuntansi dasar, akuntansi menengah, akuntansi lanjutan, analisis laporan keuangan dan akuntansi biaya. Selain aktif mengajar, tercatat juga sebagai pegawai tetap di salah satu perusahaan swasta dengan posisi senior cost accountant

Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor

Sabil

Program Studi Manajemen Perpajakan
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
sabil.sbl@bsi.ac.id

Abstract - *To realize the goal of national development program that is just and prosperous society, needed development funds are not sedikit.untuk the local tax revenue is needed in sustainable regional development. local revenue component as Budget (APBD), which consists of revenue (PAD), Balance of funds, and other income, sah. This research method using qualitative methods of comparison, as well as literature. Based on the Local Tax receipts in 2011, 2012,2013, Realization is the value of money has increased when compared to the year 2011 (Rp. 622 389 004 003) to 2012 (Rp.751.189.702.605) difference of (Rp. 128 800 698 602), if comparison between 2012 (Rp751.189.702.605.) by the year 2013 (Rp. 964 731 885 667) the difference of (Rp.213.542.183.062), a total of out-on-year decline in percentage, in 2011 (128.63%) compared to 2012 (123.00%), the difference of (5.63%), while the percentage comparison, in 2012 (123.00%) compared to 2013 (117.92%), the difference of (5.08%), overall the contribution of regional Tax on Revenue regions in 2011 adalah 95%, while for 2012 the contribution of local Taxes on revenue is 99%, and for 2013 the contribution of local Taxes on revenue is 99%, see this figure menu njukkan that role Revenue of local taxes to the area is very significant compared with the filing of other sectors.*

Keywords: *Local Taxes, Local Revenue*

Abstrak - Untuk mewujudkan tujuan program pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur, dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.untuk itu penerimaan pajak daerah sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan pembangunan daerah. komponen pendapatan daerah sebagai Anggaran (APBD), yang terdiri dari pendapatan (PAD), Saldo dana, dan lain Pendapatan, Sah. Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif perbandingan, serta studi pustaka . Berdasarkan penerimaan Pajak Daerah tahun 2011, 2012,2013, Realisasi secara nilai uang mengalami kenaikan apabila dibandingkan antara tahun 2011 (Rp. 622.389.004.003) dengan tahun 2012 (Rp.751.189.702.605) selisih sebesar (Rp. 128.800.698.602), apabila dibandingkan antara tahun 2012 (Rp751.189.702.605.) dengan tahun 2013 (Rp. 964.731.885.667) selisih sebesar (Rp.213.542.183.062), secara total dari tahu ke tahun mengalami penurunan secara prosentase , tahun 2011 (128,63 %) dibanding 2012 (123,00%) selisih sebesar (5,63%) , sedangkan perbandingan secara prosentase , tahun 2012 (123,00 %) dibanding 2013 (117,92%) selisih sebesar (5,08%) , Secara keseluruhan kontribusi Pajak Daerah terhadap

Pendapatan Asli daerah pada tahun 2011 adalah 95%, sedangkan untuk tahun 2012 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99%, serta untuk tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99 %, melihat angka ini menu njukkan bahwa peranan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah sangat signifikan dibandingkan dengan penerimaan penerimaan dari sektor lain.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka tata kelola, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, yang terdiri dari daerah provinsi dan kabupaten kota. Dengan otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, termasuk dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

Pemerintah pada dasarnya mempunyai tiga fungsi utama yaitu; fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi lebih efektif dan tepat dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika diterapkan oleh Pemerintah Daerah lebih tahu kebutuhan, kondisi, dan situasi dari masyarakat setempat. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di sini, pengajuan, devolusi, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah dan harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan negara keuangan dan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan tujuan program pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur, dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. untuk itu penerimaan pajak daerah sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan pembangunan daerah. komponen pendapatan daerah sebagai Anggaran (APBD), yang terdiri dari pendapatan (PAD), Saldo dana, dan lain Pendapatan, Sah

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Obyek penelitian adalah pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor

Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif perbandingan, serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan. Data yang diolah adalah tahun 2011, 2012 dan 2013

2.2. Pendapatan Pajak Daerah

Dengan adanya pungutan pajak daerah, pemerintah daerah dapat mengatur distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak, sehingga semua masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah tersebut. Sedangkan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Landasan hukum pemungutan pajak daerah, antara lain Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

A. Pengertian Pajak

Adriani dalam (Waluyo) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro dalam (Mardiasmo) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapetasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut : pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Suanday) mendefinisikan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

(Suanday) menyatakan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung

Soemahamidjaja dalam (Darwin) mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi, barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Soemitro dalam (Darwin) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sommerfeld dalam (Darwin) mendefinisikan pajak adalah perpindahan harta dari sumber ekonomis dari sektor swasta kepada pemerintah, perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang membayar, gunanya untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, membuat konsumsi minuman keras dapat ditekan.

B. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah. Menurut Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah “iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk”.

Siahaan (2005:7) memberikan definisi pajak daerah sebagai berikut:

Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

1. Jenis Pajak Daerah

Menurut Setyawan (2009: 287)

Sistem administrasi otoritas wilayah di Indonesia terbagi menjadi dua daerah (wilayah) yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi), yang dipimpin oleh Gubernur
- b. Wilayah Tingkat II (Kota dan Kabupaten, untuk wilayah kota di Pimpin oleh Walikota sementara wilayah Kabupaten di Pimpin oleh Bupati

Jenis pajak propinsi menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 antara lain :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air,
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air,
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Kabupaten/kota memungut pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah derah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat menggali potensi sumber keuangan lainnya yang dapat dikenai pajak dengan kriteria sebagai berikut :

- a. bersifat pajak dan bukan retribusi,
- b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan,

- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
- d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat,
- e. potensinya memadai,
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif,
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,
- h. menjaga kelestarian lingkungan.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Adapun bagian dari subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- a. Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- d. Subjek Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- e. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
- f. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.
- g. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- h. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi.
- i. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.
- j. Subjek Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah a.

- orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
- k. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

4. Objek Pajak Daerah

- a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- d. Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - 1) Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan
 - 2) Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan
 - 3) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan
- e. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :
 - 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
 - 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - 3) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- f. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- g. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- h. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- i. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- j. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- k. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

5. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :

- 1).Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- 2).Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar.
- b. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air. Tarif ditetapkan sebesar 1,5%.
- c. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum, dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
 - 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya : 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
 - 3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan : 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan 5% untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%, dan untuk penyerahan karena warisan ditetapkan Sebesar 0,1%.

- 4) Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5%.
 - 5) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%
 - 6) Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
 - 7) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
 - 8) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
 - 9) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

2.2.Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004

Pendapatan asli daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan

asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah yang pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah

B. Sumber –sumber PAD

Menurut (Halim) , kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pajak Daerah
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten/ Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

C. UU No 34 Tahun 2000

Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan upaya kemandirian penerimaan daerah serta meningkatkan kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah. Hasil penerimaan pajak akan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu juga halnya dengan Dispenda Kota Bogor penerimaan pajak yang terdiri dari; Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I dan II, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak P2 APER., dalam hal ini dalam kurun waktu 2011 s.d 2013 telah menerima ratusan juta dari penerimaan pajak tersebut pertahunnya bahkan rata-rata melebihi target yang ditentukan. Berdasarkan angka peningkatan tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah mampu memberikan dorongan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Provinsi Jawa Barat cabang Bogor. pada periode 2011 sampai dengan 2013

Tabel. 1

Penerimaan Pajak Daerah tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
	PAJAK DAERAH			
1	Pajak Kendaraan Bermotor	140.847.899.404,32	179.000.879.050,00	127,09
2	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I	215.083.142.000,00	310.306.740.500,00	144,27
3	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II	4.476.364.186,33	4.160.719.000,00	92,97
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor	121.412.000.000,00	126.617.240.544,00	104,29
5	Pajak P2 APER	2.038.000.000,00	2.302.424.909,00	112,97
	JUMLAH	483.857.405.590,65	622.389.004.003,00	128,63

Sumber : Dispenda Cab Kab. Bogor (2011)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2011 melebihi target , Pajak Kendaraan Bermotor realisasi lebih besar 27,09%, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I realisasi lebih besar 44,27% , Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II, realisasi lebih kecil 7,03% Pajak Bahan Bakar

Kendaraan bermotor realisasi lebih besar 4,29%, Pajak P2 APER realisasi lebih besar 12,97%. Hanya Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II yang tidak mencapai target, tetapi total realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yaitu sebesar 28,63 %

Tabel.2

Penerimaan Pajak Daerah tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
	PAJAK DAERAH			
1	Pajak Kendaraan Bermotor	194.550.320.000,00	247.270.964.325,00	127,10
2	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I	279.552.658.000,00	340.160.480.000,00	121,68
3	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II	1.998.672.000,00	3.691.399.000,00	184,69
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor	132.523.029.000,00	157.534.251.844,00	118,87
5	Pajak P2 APER	2.084.225.000,00	2.532.607.436,00	121,50
	JUMLAH	610.708.904.000,00	751.189.702.605,00	123,00

Sumber : Dispenda Cab Kab. Bogor (2012)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2012 melebihi target , Pajak Kendaraan Bermotor realisasi lebih besar 27,10%, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I realisasi lebih besar 21,68% , Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II,

realisasi lebih lebih besar 84,69% Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor realisasi lebih besar 18,87%, Pajak P2 APER realisasi lebih besar 21,50%. Secara total realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yaitu sebesar 23 %

Tabel.3

Penerimaan Pajak Daerah tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
	PAJAK DAERAH			
1	Pajak Kendaraan Bermotor	268.499.257.000,00	314.893.606.950,00	117,28
2	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I	354.109.802.000,00	443.990.800.000,00	181,25
3	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II	3.405.000.000,00	7.916.112.600,00	232,48
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor	190.027.143.000,00	195.264.336.097,00	102,76
5	Pajak P2 APER	2.061.316.000,00	2.667.030.020,00	129,38
	JUMLAH	818.102.518.000,00	964.731.885.667,00	117,92

Sumber : Dispenda Cab Kab. Bogor (2013)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2013 melebihi target , Pajak Kendaraan Bermotor realisasi lebih besar 17,28%, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I realisasi lebih besar 81,25% , Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II,

realisasi lebih lebih besar 132,48% Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor realisasi lebih besar 2,76%, Pajak P2 APER realisasi lebih besar 29,38%. Secara total realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yaitu sebesar 17,92 %

Tabel.4

Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
	PAJAK DAERAH			
1	Total tahun 2011	483.857.405.590,65	622.389.004.003,00	128,63
2	Total tahun 2012	610.708.904.000,00	751.189.702.605,00	123,00
3	Total tahun 2013	818.102.518.000,00	964.731.885.667,00	117,92

Sumber :Data hasil olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2011, 2012, 2013, Realisasi secara nilai uang mengalami kenaikan apabila dibandingkan antara tahun 2011 (Rp. 622.389.004.003) dengan tahun 2012 (Rp.751.189.702.605) selisih sebesar (Rp. 128.800.698.602) , apabila dibandingkan antara tahun 2012 (Rp751.189.702.605.) dengan tahun 2013

(Rp. 964.731.885.667) selisih sebesar (Rp.213.542.183.062) , secara total dari tahu ke tahun mengalami penurunan secara prosentase tahun 2011 (128,63 %) dibanding 2012 (123,00%) selisih sebesar (5,63%), sedangkan perbandingan secara prosentase tahun 2012 (123,00%) dibanding 2013 (117,92%) selisih sebesar (5,08%).

Tabel: 5

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 sebagai berikut :

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1	Pajak Daerah	622.389.004.003,00	751.189.702.605,00	964.731.885.667,00
2	Restibusi Daerah	61.967.900,00	3.500.000,00	7.500.000,00
3	Lain-lain PAD yang SAH	8.550.849.500,00	7.504.155.130,00	10.485.747.800,00
4	Dana Perimbangan	20.993.449.164,69	-	-
	Jumlah	651.995.270.667,69	758.697.357.735,00	975.225.133.467,00

Sumber : Data Hasil Olahan

Tahun 2011 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah adalah 95%, untuk tahun 2012 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99%, untuk tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99 %, melihat angka ini menunjukkan bahwa peranan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah sangat signifikan.

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2011 melebihi target , Pajak Kendaraan Bermotor realisasi lebih besar 27,09%, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I realisasi lebih besar 44,27% , Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II, realisasi lebih kecil 7,03% Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor realisasi lebih besar 4,29%, Pajak P2 APER realisasi lebih besar 12,97%. Hanya Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II yang tidak mencapai target, tetapi total realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yaitu sebesar 28,63 %, untuk tahun penerimaan Pajak Daerah tahun 2012 melebihi target , Pajak Kendaraan Bermotor realisasi lebih besar 27,10%, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I realisasi lebih besar 21,68% , Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II, realisasi lebih besar 84,69% Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor realisasi lebih besar 18,87%, Pajak P2 APER realisasi lebih besar 21,50%. Secara total realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yaitu sebesar 23 %, dan untuk tahun penerimaan Pajak Daerah tahun 2013 melebihi target , Pajak Kendaraan Bermotor realisasi lebih besar 17,28%, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I realisasi lebih besar 81,25% , Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II, realisasi lebih besar 132,48% Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor realisasi lebih besar 2,76%, Pajak P2 APER realisasi lebih besar 29,38%. Secara total realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yaitu sebesar 17,92 %.

Berdasarkan penerimaan Pajak Daerah tahun 2011, 2012,2013, Realisasi secara nilai uang mengalami kenaikan apabila dibandingkan antara tahun 2011 (Rp. 622.389.004.003) dengan tahun 2012 (Rp.751.189.702.605) selisih sebesar (Rp. 128.800.698.602), apabila dibandingkan antara tahun 2012 (Rp751.189.702.605.) dengan tahun 2013 (Rp. 964.731.885.667) selisih sebesar (Rp.213.542.183.062), secara total dari tahu ke tahun mengalami penurunan secara prosentase , tahun 2011 (128,63 %) dibanding 2012 (123,00%) selisih sebesar (5,63%) , sedangkan

perbandingan secara prosentase , tahun 2012 (123,00 %) dibanding 2013 (117,92%) selisih sebesar (5,08%)

Secara keseluruhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah pada tahun 2011 adalah 95%, sedangkan untuk tahun 2012 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99%, serta untuk tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99 %, melihat angka ini menunjukkan bahwa peranan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah sangat signifikan dibandingkan dengan penerimaan penerimaan dari sektor, sektor lain

IV. KESIMPULAN

1. Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2013 realisasi selalu melampaui target secara jumlah total prosentase untuk tahun 2011 adalah sebesar 128,63 %, untuk tahun 2012 sebesar 123,00 %, serta untuk tahun 2013 sebesar 117,92 %.
2. Secara prosentase perbandingan dari tahun 2011, 2012, 2013 mengalami penurunan akan tetapi secara nilai rupiah justru mengalami kenaikan.
3. Tahun 2011 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah adalah 95%, untuk tahun 2012 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99%, untuk tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 99 %, melihat angka ini menunjukkan bahwa peranan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah sangat signifikan.
4. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi cabang Dispenda Bogor (Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah) maka Pajak Daerah membrikan kontribusi yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis pendapatan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.25 Tahun 2010 tentang Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jakarta: Kemendagri, 2010.

- . Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD 7/7/39126.1978.Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Jakarta: Kemendagri, 2016.
- . UU No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: UU Pajak, 2016.
- . UU No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. Jakarta, 2000.
- . UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta, 2007.
- . UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Jakarta, 2004.
- Darwin. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010.
- Halim, Abdu. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Samudra. Perpajakan di Indonesia Edisi 2 : . Yogyakarta: Andi, 2015.
- Siahaan, Marihot. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja. Grafindo , 2005.
- Sunday, Erly. Pengertian Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Waluyo. Fungsi Pajak. Yogyakarta : Andi, 2011.

Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Menentukan Tingkat Kesehatan Bank Pada Kantor Cabang Pembantu Bank BCA

Indria Widyastuti
Program Studi Akuntansi
AMK BSI Jakarta
Jln. Ciledug Raya No.168. Jakarta. Indonesia
email: indria.iwi@bsi.ac.id

Endri Frismadani
Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Politeknik LP3i Bandung
Jln. Pahlawan No. 57. Cikutra. Bandung. Indonesia
email: endry.frismadani@gmail.com

Abstract—The research undertaken aims to determine the procedure of calculation of financial statement analysis and how to conduct the Bank's level of health analysis at one of Branch Offices (KCP) Bank BCA Karawang area. The research method used is descriptive quantitative method that is writer conduct direct research to get information then collect quantitative data needed to yield a conclusion. After doing the analysis and discussion of the problem, the authors concluded that the health level of KCP Bank BCA is overall quite healthy even from the LDR component is not healthy. The level of bank soundness in terms of risk profile, earnings, and capital for the period of 2015 can be categorized as healthy so it is considered very capable to face the significant negative impact of changes in business conditions and other external factors is reflected in the ratings of assessment factors such as risk profile, , And capital is generally very good. Despite healthy categorization, KCP Bank BCA is necessary to pay attention to credit aspects that affect the results of LDR ratio calculations. Because of the research conducted, the calculation of the ratio shows the numbers categorized in the composite rank 5 or unhealthy

Keywords: Ratio Analysis, Financial Statement, Banking, Risk Profile, Earnings, Capital

Abstrak – Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tata cara perhitungan analisa laporan keuangan dan bagaimana melakukan analisa tingkat kesehatan Bank pada salah satu Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank BCA wilayah Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu penulis mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan informasi kemudian mengumpulkan data-data kuantitatif yang diperlukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Setelah melakukan analisis dan pembahasan masalah, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa tingkat kesehatan KCP Bank BCA tersebut secara keseluruhan tergolong sehat meskipun dari komponen LDR tergolong tidak sehat. Tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek *risk profile*, *earnings*, dan *capital* untuk periode tahun 2015 bisa dikategorikan sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, rentabilitas, dan permodalan secara umum sangat baik. Sekalipun dikategorikan sehat, KCP Bank BCA tersebut perlu untuk memperhatikan aspek kredit yang mempengaruhi hasil perhitungan rasio LDR. Karena dari penelitian yang dilakukan, hasil perhitungan rasio menunjukkan angka yang dikategorikan dalam peringkat komposit 5 atau tidak sehat.

Kata Kunci : Analisa Rasio, Laporan Keuangan, Bank, Profil Resiko, Rentabilitas, Permodalan

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Pasal 29 tentang perbankan, sebuah bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Bank Indonesia juga mewajibkan setiap bank untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan resiko. Penilaian tersebut mencakup faktor-faktor sebagai berikut : Profil resiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) atau yang lebih dikenal dengan istilah *RGEC*. Sebelumnya Bank Indonesia menetapkan untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan modal, atau lebih dikenal dengan analisis CAMELS. Tetapi analisis CAMELS dinyatakan kurang efektif karena menurut Bank Indonesia, manajemen juga perlu memperhatikan aspek resiko dalam usahanya. Di beberapa bank di Indonesia penilaian tingkat kesehatan bank hanya dilakukan oleh kantor wiayah, sehingga untuk cabang pembantu sendiri tidak benar-benar memahami tentang tata cara penilaian kesehatan bank. Melalui surat edarannya, Bank Indonesia memberikan beberapa rumus untuk menghitung rasio. Tetapi tidak semua bank di Indonesia dapat mengaplikasikan semua rumus tersebut. Beberapa bank, terutama bank-bank kecil mengalami kesulitan untuk melakukan perhitungan dengan semua rumus yang di tentukan bank Indonesia. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank, salah satu rumus rasio yang digunakan adalah rasio *Net Interest Margin* dimana di dalamnya terdapat unsur aktiva produktif. Setiap bank memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menentukan aktiva mana yang bisa dikategorikan aktiva produktif. Perbedaan sudut pandang ini yang kemudian membuat dasar perhitungan analisa rasio *Net Interest Margin* di setiap bank bisa berbeda. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tata cara perhitungan dan bagaimana tingkat kesehatan di salah satu KCP PT. Bank Central Asia,Tbk wilayah Karawang.

Penelitian-Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian yang dilakukan (Kusumo)

Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank, membuat bank dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus. Salah satu penilaian kinerja yang dapat dilakukan

adalah dengan melakukan analisa laporan keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. (Kusumo)

2. Penelitian yang dilakukan (Subaweh)

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara rasio pinjaman terhadap tabungan dan rasio tabungan terhadap pengembalian ekuitas. (Subaweh)

3. Penelitian yang dilakukan (Muhammad Sabir)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan NPL (*Non Performing Loan*) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (*Return of Assets*) (Muhammad Sabir)

4. Penelitian yang dilakukan (Andri Venio)

Kinerja perbankan tahun 2008-2014 cenderung meningkat dari segi profitabilitas rasio keuangan REO dengan angka tertinggi di 2009. Trend peramalan kinerja perbankan tahun 2015-2017 juga telah mengalami pertumbuhan dari segi profitabilitas dengan angka tertinggi di 2016. (Andri Venio)

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan untuk penyusunan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif ini adalah metode penelitian dengan menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan hasil analisa data kuantitatif yaitu perhitungan data laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dan metode penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut :

1. Observasi (*Observation*)

Dalam metode ini penulis melakukan peninjauan lokasi dan mengamati proses penilaian tingkat kesehatan bank di KCP PT. Bank Central Asia, Tbk secara langsung.

2. Wawancara (*Interview*)

Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden terkait mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank dan informasi mengenai KCP Bank BCA tersebut

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang sifatnya teoritis yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperhitungkan data yang diperoleh penulis di lapangan. Penulis juga melakukan pengambilan sampel data dari objek penelitian, yaitu PT. Bank Cental Asia, Tbk

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dikutip oleh (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya) "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian terhadap kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan secara normal dan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian kesehatan bank dilakukan dengan menilai beberapa faktor sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan melakukan analisa terhadap laporan keuangan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti profil resiko, rentabilitas, dan permodalan.

2.2.1 Profil resiko

1. Pengertian

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 "Merupakan penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank."

2. Jenis-jenis

a. Resiko Kredit

Resiko Kredit adalah resiko tidak kembalinya pinjaman sesuai dengan kontrak. Resiko Kredit dapat ditentukan dengan menghitung rasio *Non Performing Loan* dengan rumus:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Tabel 1. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Resiko Kredit

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	<2%
2	Sehat	2~3.5%
3	Cukup Sehat	3.5~5%
4	Kurang Sehat	5~8%
5	Tidak Sehat	>8%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia

b. Resiko Likuiditas

Resiko Likuiditas terjadi karena adanya penarikan dana secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank. Resiko Likuiditas dapat ditentukan dengan menghitung *Loan to Deposit Ratio* dengan rumus:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Resiko Likuiditas

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	60%~<70%
2	Sehat	70%~>85%

3	Cukup Sehat	85%~100%
4	Kurang Sehat	100%~120%
5	Tidak Sehat	>120% atau <60%

Sumber : Surat Edaran bank Indonesia

2.2.2 Profil Earnings

1. Pengertian *Earnings*

adalah suatu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas, sehingga sering disebut rasio rentabilitas.

(Kasmir, Analisa Laporan Keuangan) menyatakan bahwa “Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank.” (Kasmir, Analisa Laporan Keuangan)

2. Jenis-jenis

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP indikator penilaian tersebut antara lain:

a. *Return of Assets*

Analisa *Return of Assets* adalah analisa yang membandingkan antara laba kotor dengan rata-rata total asset.

Rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}} \times 100\%$$

Tabel 3. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	Perolehan laba sangat tinggi (rasio ROA diatas 2%)
2	Sehat	Perolehan laba tinggi (rasio ROA berkisar antara 1,26% sampai dengan 2%)
3	Cukup Sehat	Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROA berkisar antara 0,51% sampai dengan 1,25%)
4	Kurang Sehat	Perolehan laba rendah atau cenderung mengalami kerugian (ROA mengarah negatif, rasio berkisar 0% sampai dengan 0,5%)
5	Tidak Sehat	Bank mengalami kerugian yang besar (ROA negatif, rasio dibawah 0%)

Sumber : Surat Edaran bank Indonesia

b. *Net Interest Margin*

Analisa *Net Interest Margin* adalah analisa yang membandingkan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata total aktiva produktif dengan rumus sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Tabel 4. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (NIM)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	Margin bunga sangat tinggi (rasio diatas 5%)
2	Sehat	Margin bunga bersih tinggi (rasio NIM berkisar antara 2,01% sampai dengan 5%)
3	Cukup Sehat	Margin bunga bersih cukup tinggi (rasio NIM berkisar antara 1,5% sampai dengan 2%)
4	Kurang Sehat	Margin bunga bersih rendah mengarah negatif (rasio NIM berkisar 0% sampai dengan 1,49%)
5	Tidak Sehat	Margin bunga bersih sangat rendah atau negatif (rasio NIM dibawah 0%)

Sumber : Surat Edaran bank Indonesia

2.3.3 Profil Capital

1. Pengertian

Menurut (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya) “*Capital ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan.” (Kasmir, Analisa Laporan Keuangan)

(N Lapoliwa) menyatakan bahwa “Rasio ini dianggap sebagai rasio tradisional akuntansi untuk mengukur modal terhadap aktiva.”

2. *Capital Adequacy Ratio*

Untuk menghitung *CAR*, terlebih dahulu kita harus menghitung *ATMR*. Untuk menghitung *ATMR* sendiri Bank Indonesia sudah menetapkan tata caranya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/3/DPNP tahun 2009. Berikut adalah rumus yang di tetapkan Bank Indonesia untuk menghitung *ATMR*:

$ATMR = 12,5 \times \text{beban modal Risiko Operasional}$
Dan berikut rumus untuk menghitung beban modal Risiko Operasional:

$$KPID = \frac{\sum (GI_{1..n} \times \alpha)}{n}$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

$KPID$ = beban modal Risiko Operasional menggunakan PID

GI = pendapatan bruto positif tahunan dalam tiga tahun terakhir

n = jumlah tahun di mana pendapatan bruto positif

$\alpha = 15\%$

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP profil *capital* dapat dihitung dengan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{ATMR} \times 100\%$$

Tabel 5. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Capital

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	Rasio KPMM lebih tinggi sangat signifikan dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan (KPMM > 15%).
2	Sehat	Rasio KPMM lebih tinggi cukup signifikan dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan (9% < KPMM ≤ 15%).
3	Cukup Sehat	Rasio KPMM lebih tinggi secara marjinal dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan (8% < KPMM ≤ 9%).
4	Kurang Sehat	Rasio KPMM di bawah ketentuan yang berlaku (KPMM ≤ 8%).
5	Tidak Sehat	Rasio KPMM dibawah ketentuan yang berlaku dan bank cenderung menjadi tidak <i>solvable</i> (KPMM ≤ 8%).

Sumber : Surat Edaran bank Indonesia

2.3.4 Peringkat Komposit

Akhir dari semua analisa yang dilakukan diubah menjadi peringkat komposit. Peringkat komposit dikategorikan dalam tingkatan yang disebut peringkat komposit.

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai sangat tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor internal lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akuntansi Perhitungan Rasio NPL

3.1.1 Metode Perhitungan

Perhitungan rasio NPL dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat resiko kredit. Perhitungan rasio NPL didapat dari hasil pembagian kredit bermasalah, yaitu kredit kepada pihak ketiga yang tergolong kurang lancar atau diragukan dengan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga.

3.1.2 Contoh Perhitungan Rasio NPL

1. Sumber Data

Pada KCP Bank BCA, kredit bermasalah sudah dimasukkan kedalam Ringkasan Laporan Keuangan, dengan akun *Non Performing Loan*.

Tabel 6. Data Jumlah Kredit dan Kredit Bermasalah

Account	2014	2015
PERFORMANCE LOAN (PL)	27.062.000.000	28.590.000.000
NON PERFORMANCE LOAN (NPL)	290.000.000	310.000.000
TOTAL PINJAMAN	27.352.000.000	28.900.000.000

Sumber: Ringkasan Laporan Keuangan Periode Desember 2014 & 2015

2. Perhitungan Rasio NPL

Dari data tersebut diatas, dapat dilakukan perhitungan Rasio NPL sebagai berikut:

a. Perhitungan Rasio NPL Tahun 2014

$$\begin{aligned}
 NPL &= \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp}290.000.000}{\text{Rp}27.062.000.000} \times 100\% \\
 &= 0,011 \times 100\% \\
 &= 1,1\%
 \end{aligned}$$

b. Perhitungan Rasio NPL Tahun 2015

$$\begin{aligned}
 NPL &= \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp}310.000.000}{\text{Rp}28.900.000.000} \times 100\% \\
 &= 0,011 \times 100\% \\
 &= 1,1\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat, pada posisi manakah tingkat kesehatan KCP Bank BCA dari segi resiko kredit.

Hasil perhitungan rasio NPL KCP Bank BCA untuk tahun 2015 adalah 1,1%. Jika dilihat ke dalam matriks kriteria penetapan peringkat komposit untuk komponen resiko kredit (Tabel 1) maka KCP Bank BCA tergolong sangat sehat karena hasil perhitungan rasio NPL menunjukkan bahwa rasio NPL KCP Bank BCA dibawah 2%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2014, terlihat tidak

ada perubahan yang signifikan untuk rasio NPL. Karena hasil perhitungan rasio NPL untuk tahun 2014 juga menunjukkan angka 1,1 %.

3.2 Akuntansi Perhitungan Rasio LDR

3.2.1 Metode Perhitungan Rasio LDR

Rasio keuangan ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membandingkan antara jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga. Dana Pihak ketiga yang dimaksud adalah dana simpanan pihak ketiga, seperti tabungan, giro, dan deposito.

3.2.2 Contoh Perhitungan Rasio LDR

1. Sumber Data

Pada KCP Bank BCA, Jumlah kredit yang diberikan sudah dimasukkan kedalam Ringkasan Laporan Keuangan. Dan untuk dana pihak ketiga juga sudah tertera dengan jelas di dalam Ringkasan Laporan Keuangan.

Tabel 7. Data Jumlah Kredit yang Diberikan.

Nama Akun	2014	2015
I A. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (RP+VA)	27.352.000.000	28.900.000.000
PERFORMANCE LOAN (PL)	27.062.000.000	28.590.000.000
NON PERFORMANCE LOAN (NPL)	290.000.000	310.000.000
IV A. DANA PIHAK III	75.646.000.000	93.536.000.000
IV A.1. GIRO PIHAK III	11.244.000.000	14.880.000.000
IV A.2. TABUNGAN	48.179.000.000	57.492.000.000
IV A.3. DEPOSITO PIHAK III	16.223.000.000	21.164.000.000

Sumber: Ringkasan Lap Keuangan Periode Desember 2014 & 2015

2. Perhitungan Rasio LDR

Dari data tersebut diatas, dapat dilakukan perhitungan Rasio LDR KCP Bank BCA untuk periode tahun 2014 dan tahun 2015 sebagai berikut:

a. Perhitungan Rasio LDR Tahun 2014

$$\begin{aligned}
 LDR &= \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp}27.352.000.000}{\text{Rp}73.646.000.000} \times 100\% \\
 &= 0,371 \times 100\% \\
 &= 37,1\%
 \end{aligned}$$

b. Perhitungan Rasio LDR Tahun 2015

$$\begin{aligned}
 LDR &= \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp}28.900.000.000}{\text{Rp}93.536.000.000} \times 100\% \\
 &= 0,309 \times 100\% \\
 &= 30,9\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas, dapat dilihat pada posisi manakah tingkat kesehatan KCP Bank BCA dari segi resiko kredit.

Hasil perhitungan rasio LDR KCP Bank BCA tahun 2015 adalah 30,9%. Dibandingkan tahun 2014, pada tahun 2015 rasio likuiditas KCP Bank BCA mengalami penurunan sebanyak 6,2%. Jika dilihat ke dalam matriks kriteria penetapan peringkat komposit untuk komponen resiko likditias (Tabel 2) maka KCP Bank BCA tergolong tidak sehat atau PK-5 karena hasil perhitungan rasio LDR menunjukkan bahwa rasio LDR KCP Bank BCA dibawah 60%.

3.3 Akuntansi Perhitungan Rasio ROA

3.3.1 Metode Perhitungan Rasio ROA

Rasio *Return of Assets* adalah analisa rasio yang membandingkan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset. Rasio ini dihitung untuk mengukur tingkat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil hasil perhitungan rasio ini berarti manajemen kurang baik dalam mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya. Laba yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah laba sebelum di kurangi pajak.

3.3.2 Contoh Perhitungan Rasio ROA periode 2015

1. Sumber Data

Pada KCP Bank BCA, untuk laba sebelum pajak dapat dilihat dari ringkasan laporan keuangan. Sedangkan untuk rata-rata aset harus di lakukan perhitungan terlebih dahulu dengan cara menjumlahkan total aset dua tahun terakhir di bagi dua.

Tabel 8. Laba Rugi KCP Bank BCA Tahun 2015

ACCOUNT	TYPE	Actual Per Des'15
VII. PENDAPATAN BUNGA	HSL/BYA	5.575
I A. PINJMAN YANG DIBERIKAN (RP+VA)	HSL/BYA	2.754
I C. SURAT BERHARGA (RP+VA)	HSL/BYA	-
I G. REKENING ANTAR KANTOR	HSL/BYA	2.821
VIII. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI	HSL/BYA	194
IX BIAYA BUNGA	HSL/BYA	1.614
IV B. DANA PIHAK BANK	HSL/BYA	16
IV C. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	HSL/BYA	-
IV E. REKENING ANTAR KANTOR	HSL/BYA	-
XI BIAYA PROVISI DAN KOMISI	HSL/BYA	-
Hasil Bunga Net.	HSL/BYA	4.155
XII. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	HSL/BYA	2.076
XII. A. SELISIH KURS	HSL/BYA	-
FEE BASED INCOME	HSL/BYA	1.716
XIII H. PENDAPATAN ANTAR KANTOR	HSL/BYA	360
XIV. BEBAN/PENDAPATAN PENGHAPUSAN AKTIVA	HSL/BYA	627
XV. BEBAN ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN	HSL/BYA	-
XVI. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	HSL/BYA	4.752
XVI A. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	HSL/BYA	1.376
XVI B. BIAYA TENAGA KERJA	HSL/BYA	1.569
XVI C. BIAYA LAINNYA	HSL/BYA	12
XVI D. BIAYA ANTAR KANTOR	HSL/BYA	1.795
XVI D.1. BIAYA RAK LAINNYA	HSL/BYA	1.504
XVI D.2. BIAYA GWM	HSL/BYA	291
XVII. PENDAPATAN (BIYA) NON OPERASIONAL	HSL/BYA	(1)
XVII A. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	HSL/BYA	-
XVII B. BIAYA ON OPERASIONAL	HSL/BYA	1
Lab a (Rugi) Tahun Berjalan	HSL/BYA	2.105

Sumber: Ringkasan Laporan Keuangan Periode Desember 2015

Data tersebut diatas dicatat dalam satuan jutaan rupiah. Untuk total asset dapat dilihat pada neraca KCP Bank BCA.

Tabel 9. Penggalan Neraca KCP Bank BCA Tahun 2015

Laporan posisi keuangan	Statement of financial position		
	31 December 2015	31 December 2014	
Aset			Assets
Jumlah aset	133.593	113.219	Total assets
Liabilitas dan ekuitas			Liabilities and equity
Liabilitas			Liabilities
Jumlah liabilitas	99.810	81.620	Total liabilities
Ekuitas			Equity
Jumlah ekuitas	33.782	31.599	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	133.593	113.219	Total liabilities and equity

Sumber: Neraca KCP Bank BCA Periode Tahun 2015

2. Perhitungan Rasio ROA

Dari data tersebut diatas, dapat dilakukan perhitungan Rasio ROA KCP Bank BCA sebagai berikut:

a. Perhitungan rata-rata total aset

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata Total Asset} &= \frac{\text{Total Asset 2014} + \text{Total Asset 2015}}{2} \\ &= \frac{\text{Rp133.593.000.000} + \text{Rp117.114.000.000}}{2} \\ &= \frac{\text{Rp250.707.000.000}}{2} \\ &= \text{Rp125.353.500.000} \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rata-rata total aset KCP Bank BCA untuk tahun 2015 adalah Rp. 125.353.500.000.

b. Perhitungan rasio ROA

$$\begin{aligned} \text{ROA} &= \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp2.105.000.000}}{\text{Rp125.353.500.000}} \times 100\% \\ &= 0,017 \times 100\% \\ &= 1,7\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat, pada posisi manakah tingkat kesehatan KCP Bank BCA dari segi resiko rentabilitas.

Hasil perhitungan rasio ROA pada laporan keuangan KCP Bank BCA menunjukkan angka 1,7%. Jika dilihat

ke dalam matriks kriteria penetapan peringkat komposit untuk komponen resiko rentabilitas (Tabel 3) maka KCP Bank BCA tergolong sehat atau PK-2 karena hasil perhitungan rasio ROA menunjukkan bahwa rasio ROA KCP Bank BCA berkisar di antara angka 1,26% sampai 2%. Artinya, perolehan laba KCP Bank BCA tergolong tinggi.

3.4 Akuntansi Perhitungan Rasio NIM

3.4.1 Metode Perhitungan Rasio NIM

Rasio NIM merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menghitung resiko rentabilitas.

Informasi keuangan yang dibutuhkan untuk menghitung rasio ini adalah pendapatan bunga bersih dan total aset produktif dua tahun terakhir. Rasio ini merupakan rasio yang membandingkan pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. Aktiva produktif yang dimaksud adalah aktiva yang menghasilkan keuntungan berupa bunga. Penentuan jenis aktiva produktif sendiri berbeda-beda sesuai kebijakan bank.

3.4.2 Contoh Perhitungan Rasio NIM periode 2015

1. Sumber Data

Pada KCP Bank BCA, untuk pendapatan bunga bersih dapat dilihat dari perhitungan laba rugi pada ringkasan laporan keuangan. Sedangkan untuk rata-rata aktiva produktif harus di lakukan perhitungan terlebih dahulu dengan cara menjumlahkan total aset 2 tahun terakhir di bagi dua.

Data tersebut diatas dicatat dalam satuan jutaan rupiah. Untuk total aset produktif dapat dilihat pada neraca KCP Bank BCA.

Tabel 10. Penggalan Neraca KCP Bank BCA Tahun 2015

Laporan posisi keuangan			Statement of financial position
	31 December 2015	31 December 2014	
Aset			Assets
Kas	16.850	11.590	Cash
Dana yang dibatasi penggunaannya			Restricted funds
Giro pada bank indonesia	19.810	19.420	Current accounts with bank Indonesia
Giro pada bank lain	6.603	5.578	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank indonesia dan bank lain	22.035	20.235	Placements with bank Indonesia and other banks
Piutang asuransi	8.051	7.050	Insurance receivables
Biaya akuisisi tanggungan			Deferred acquisition costs
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan			Deposits to clearing and settlement guarantee institution
Efek-efek yang diperdagangkan			Marketable securities
Investasi pemegang polis pada kontrak unit-linked			Investments of policyholder in unit-linked contracts
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	8.056	7.568	Securities purchased under agreement to resale
Wesel ekspor dan tagihan lainnya			Bills and other receivables
Tagihan akseptasi			Acceptance receivables
Pinjaman yang diberikan	28.257	26.744	Loans
Investasi sewa			Lease investments
Tagihan anjak piutang			Factoring receivables
Piutang lainnya			Other receivables
Aset keuangan lainnya	7.545	4.113	Other financial assets
Obligasi pemerintah	6.022	3.987	Government bonds
Aset tidak lancar atau kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual			Non-current assets or disposal groups classified as held-for-sale
Aset tidak lancar atau kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik			Non-current assets or disposal groups classified as held-for-distribution to owners
Uang muka			Advances
Biaya dibayar dimuka	1.025		Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka			Prepaid taxes
Klaim atas pengembalian pajak			Claims for tax refund
Aset pajak tanggungan	715	559	Deferred tax assets
Aset reasuransi			Reinsurance assets
Aset imbalan pasca kerja			Post-employment benefit assets
Goodwill			Goodwill
Aset takberwujud selain goodwill			Intangible assets other than goodwill
Properti investasi			Investment properties
Aset tetap	2.225	1.856	Property and equipment
Agunan yang diambil alih			Foreclosed assets
Aset lainnya	2.015	1.545	Other assets
Jumlah aset	133.593	113.219	Total assets

Sumber: Neraca KCP Bank BCA Periode Tahun 2015

Dari potongan neraca KCP Bank BCA diatas, untuk aktiva produktif yang ditetapkan sesuai kebijakan Bank BCA adalah kelompok aset yang berwarna merah. Kelompok tersebut adalah Giro pada Bank Indonesia, Giro pada Bank Lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain,

Pinjaman yang Diberikan, dan Obligasi Pemerintah.

2. Perhitungan Rasio NIM

Dari data tersebut diatas, dapat dilakukan perhitungan Rasio NIM KCP Bank BCA sebagai berikut:

Tabel 11. Perhitungan Total aktiva produktif Bank BCA KCP Rengasdengklok Tahun 2015

Jenis Aktiva Produktif	2015	2014
Giro pada bank indonesia	Rp 19.810.055.000	Rp 19.420.000.000
Giro pada bank lain	Rp 6.603.352.000	Rp 5.578.000.000
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	Rp 22.035.000.000	Rp 20.035.000.000
Pinjaman yang diberikan	Rp 28.256.977.000	Rp 26.744.226.000
Obligasi pemerintah	Rp 6.022.278.000	Rp 3.987.000.000
Total Aktiva Prouktif	Rp 82.727.661.000	Rp 75.964.226.000

Dari tabel tersebut diatas dapat dilakukan perhitungan rata-rata aktiva produktif seperti berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata Aktiva Produktif} &= \frac{\text{Aktiva Produktif 2014} + \text{Aktiva Produktif 2015}}{2} \\ &= \frac{\text{Rp}82.727.661.000 + \text{Rp}75.964.226.000}{2} \\ &= \frac{\text{Rp}158.691.887.000}{2} \\ &= \text{Rp}79.345.943.500 \end{aligned}$$

Setelah ditentukan nilai rata-rata aktiva produktif maka dapat dilakukan perhitungan rasio NIM seperti berikut:

$$\begin{aligned} \text{NIM} &= \frac{\text{Pend. Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}4.155.000.000}{\text{Rp}79.345.943.500} \times 100\% \\ &= 0,052 \times 100\% \\ &= 5,2\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat, pada posisi manakah tingkat kesehatan KCP Bank BCA dari segi resiko rentabilitas.

Hasil perhitungan rasio NIM pada laporan keuangan KCP Bank BCA menunjukkan angka 5,2%. Jika dilihat ke dalam matriks kriteria penetapan peringkat komposit untuk komponen resiko rentabilitas (Tabel 4) maka KCP Bank BCA tergolong sangat sehat atau PK-

1 karena hasil perhitungan rasio NIM menunjukkan bahwa rasio NIM KCP Bank BCA lebih dari 5%. Artinya, margin bunga KCP Bank BCA tergolong sangat tinggi.

5.5 Akuntansi Perhitungan Rasio CAR

5.5.1 Metode Perhitungan Rasio CAR

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi tingkat kecukupan modal dan pengelolaan modal. Dalam menghitung rasio CAR informasi yang dibutuhkan adalah modal bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut resiko. Rasio CAR adalah perbandingan antara jumlah modal dengan jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.

Untuk perhitungan ATMR sendiri sudah ditetapkan dalam surat edaran Bank Indonesia. ATMR diperhitungkan dengan cara KPID dikalikan 12,5. Dan untuk KPID sendiri dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan positif tiga tahun terakhir dikalikan 15% dan kemudian angka tersebut di bagi jumlah tahun yang menghasilkan laba positif.

5.5.2 Contoh Perhitungan Rasio CAR periode 2015

1. Sumber Data

Pada KCP Bank BCA, untuk pendapatan bunga bruto dapat dihitung dengan melihat perhitungan laba rugi pada ringkasan laporan keuangan. Untuk menghitung ATMR terlebih dahulu harus di kumpulkan data ringkasan laporan keuangan tiga tahun terakhir.

Tabel 12. Laba Rugi KCP Bank BCA Tahun 2013, Tahun 2014, dan Tahun 2015

ACCOUNT NAME	TYPE	2013	2014	2015
VII. PENDAPATAN BUNGA	HSL/BYA	5.177	5.324	5.575
I A. PINJMAN YANG DIBERIKAN (RP+VA)	HSL/BYA	2.556	2.630	2.754
I.A.1. PENDAPATAN BUNGA KKB	HSL/BYA	601	618	647
I.A.2. PENDAPATAN BUNGA KPR	HSL/BYA	150	155	162
I.A.3. PENDAPATAN BUNGA KARTU KREDIT	HSL/BYA	28	29	30
I.A.4. PENDAPATAN BUNGA KREDIT LAINNYA	HSL/BYA	1.778	1.829	1.915
I C. SURAT BERHARGA (RP+VA)	HSL/BYA	-	-	-
I G. REKENING ANTAR KANTOR	HSL/BYA	2.621	2.694	2.821
I.G.1. RAK DN (FEE BUNGA KKB)	HSL/BYA	-	-	-
I.G.2. RAK DN (FEE BUNGA KPR)	HSL/BYA	67	67	70
I.G.3. RAK DN (BUNGA RAK"C" LAINNYA)	HSL/BYA	2.554	2.627	2.751
VIII. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI	HSL/BYA	180	185	194
VIII.A. PEND PROVISI KREDIT	HSL/BYA	180	185	194
VIII.B. PEND KOMISI C/A KARTU KREDIT	HSL/BYA	-	-	-
Hasil Bunga Net.	HSL/BYA	5.357	5.509	5.769
XII. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	HSL/BYA	1.927	1.983	2.076
XII. A. SELISIH KURS	HSL/BYA	-	-	-
FEE BASED INCOME	HSL/BYA	1.593	1.639	1.716
FBI - PRODUK DANA & JASA	HSL/BYA	1.275	1.311	1.373
FBI - KARTU KREDIT	HSL/BYA	25	26	27
FBI - EXIM & BG	HSL/BYA	4	4	4
FBI - REMITACE (OR/IR)	HSL/BYA	7	8	8
FBI - BANCASSURANCE	HSL/BYA	206	212	222
FBI - LAINNYA	HSL/BYA	76	78	82
XIII H. PENDAPATAN ANTAR KANTOR	HSL/BYA	334	344	360
XIV. BEBAN/PENDAPATAN PENGHAPUSAN AKTIVA	HSL/BYA	582	599	627
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	HSL/BYA	7.866	8.091	8.472

Sumber: Ringkasan Laporan Keuangan Periode Desember 2013, 2014 & 2015

2. Perhitungan Rasio CAR

a. Perhitungan ATMR

Dari tabel 4.12 dapat dilihat jumlah pendapatan bruto tiga tahun terakhir adalah Rp. 7.866.000.000 + Rp. 8.091.000.000 + Rp. 8.472.000.000 = Rp. 24.429.000.000. Maka untuk perhitungan ATMRnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KPID &= \frac{\text{Rp } 24.449.000.000 \times 15\%}{3} \\
 &= \frac{\text{Rp}3.667.350.000}{3} \\
 &= \text{Rp}1.222.450.000
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan KPID diatas maka ATMRnya adalah:
12,5 x Rp. 1.221.450.000 = Rp. 15.280.625.000

b. Perhitungan Modal Bank

Untuk modal bank terlebih dahulu harus dilakukan perhitungan seperti tabel berikut:

Tabel 13. Tabel Pehitungan Modal Bank

Modal Bank	Jumlah
1. Modal Inti	
Modal Disetor	Rp. 1.223.000.000
Tambahan Modal	Rp. 230.000.000
Cadangan	Rp. 240.000.000
Laba Tahun Lalu (100%)	Rp. 1.006.000.000
Laba Tahun Berjalan (50%)	Rp. 1.052.500.000
2. Pelengkap	
Kepentingan Non Pengendali	Rp. 50.000.000
Total Modal Bank	Rp.3.801.500.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Koresponden Terkait

c. Perhitungan Rasio CAR

Dari hasil perhitungan ATMR dan modal bank di atas maka dapat dihitung rasio CAR seperti berikut:

$$\begin{aligned}
 CAR &= \frac{\text{Rp } 3.801.500.000}{\text{Rp } 15.280.625.000} \times 100\% \\
 &= 0,25 \times 100\% \\
 &= 25\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat, pada posisi manakah tingkat kesehatan KCP Bank BCA dari segi komponen permodalan.

Hasil perhitungan rasio CAR pada laporan keuangan KCP Bank BCA menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu 25%. Jika dilihat ke dalam matriks kriteria penetapan peringkat komposit untuk komponen resiko rentabilitas (Tabel 5) maka KCP Bank BCA tergolong sangat sehat atau PK-1 karena hasil perhitungan rasio CAR menunjukkan bahwa rasio CAR KCP Bank BCA lebih dari 15%. Artinya, dari segi kecukupan modal KCP Bank BCA memiliki modal yang sangat cukup.

IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan penilaian tingkat kesehatan Bank BCA KCP Rengasdengklok bisa dikategorikan kedalam peringkat komposit 2 (PK-2). Dengan kata lain, secara umum Bank BCA KCP Rengasdengklok bisa dikatakan sehat karena dari 5 analisa rasio yang dilakukan 3 diantaranya menunjukkan hasil yang dikategorikan sangat sehat sekalipun salah satunya menunjukkan hasil tidak sehat.

Bahwa tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek *risk profile*, *earnings*, dan *capital* pada Bank BCA KCP Rengasdengklok untuk periode tahun 2015 bisa dikategorikan sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, rentabilitas, dan permodalan secara umum sangat baik.

Sekalipun dikategorikan sehat, Bank BCA KCP Rengasdengklok perlu untuk memperhatikan aspek kredit yang mempengaruhi hasil perhitungan rasio LDR. Karena dari penelitian yang dilakukan, hasil perhitungan rasio LDR Bank BCA KCP Rengasdengklok menunjukkan angka yang dikategorikan dalam peringkat komposit 5 atau tidak sehat.

Hasil penelitian dengan membandingkan antara hasil perhitungan rasio NPL dan LDR tahun 2014 dan 2015 tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Sehingga bisa dikatakan kondisi Bank BCA KCP Rengasdengklok cukup stabil..

REFERENSI

Andri Veno, Syamsudin. "Analisa Trend Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2015

Sampai Dengan 2017." Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.42, No.1 (Januari 2017).

Indonesia, Bank. Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. Jakarta: Bank Indonesia, 2011.

—, Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/1/DPNP. Jakarta: Bank Indonesia, 2009.

—, Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP. Jakarta: Bank Indonesia, 2011.

Kasmir. Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

—, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Kusumo, Yunanto Adi. "Analisa Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2001-2007." La Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol.2 No.1 (Juli 2008).

Muhammad Sabir, Muhammad Ali, Abdul Hamid Habbe. "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia." Jurnal Analisis Vol.1 No.1 (Juni 2012): 76-86.

N Lapoliwa, Daniel S Kuswandi. Akuntansi Perbankan. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2013.

Subaweh, Imam. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Periode 2003-2007." Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.2 No.13 (Agustus 2008).

PROFIL PENULIS

Penulis lahir pada 19 Nopember 1974 di Jember, mendapat gelar Sarjana Ekonomi (prodi Akuntansi) dari STIE Malangkeccwara lulus 1997 dan Magister Akuntansi (prodi Keuangan & Perbankan) dari Universitas Trisakti lulus tahun 2011. Saat ini menjadi salah satu dosen Akuntansi di Akademi Manajemen Keuangan (AMK) BSI Jakarta dan memiliki Jabatan Fungsional Akademik Asisten Ahli. Tulisan ilmiah yang pernah dibuat salah satunya berhasil mendapatkan Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) dari Kopertis Wilayah III Jakarta tahun 2016 dengan judul penelitian Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK).

Pengaruh Pelayanan Dan Produk Jasa Terhadap Komitmen Penerimaan Nasabah Pada Bank BRI Tigaraksa

Nurhadi
AMIK BSI Tangerang
Program Studi Manajemen Informatika
email : nurhadi_bsi@yahoo.com

Abstract - The form of services, whether in the form of public goods or public services which in principle become the responsibility and implemented by government agencies centered, in the region, and within the State-Owned Enterprises or Regional Government Enterprises, in an effort to meet the needs of the community and in the implementation of provisions Legislation. Sampling of all populations used as a census sample of 30 respondents, using scale scale interval scale means showing distance between one data with other data t test statistical analysis and multiple correlation test and multiple regression test regression. Calculation obtained correlation rate between Influence of service and product of service to customer acceptance commitment at Bank BRI tigaraksa equal to 0353 correlation of 0.57 mean Influence of service and product of service simultan to commitment of customer acceptance at Bank BRI tigaraksa strong enough and direction (because result of positive), Meaning that if the influence of service and service products is high then the commitment of customer acceptance at Bank BRI tigaraksa also high. The correlation of both variables is significant because of the significant number of $0,000 < 0,05$. The large number of R Square (r^2) of 0124 numbers can be used to see the influence of service and service products on customer acceptance commitment at Bank BRI tigaraksa (determinant coefficient). This number has the meaning that 124% and the rest is influenced by other variables of 24%. Coefficient obtained in the regression equation $Y = 29.792 + -0.091 + 0.236 + e$, hypothesis test F arithmetic = 3.653, compared with F table using 5% The value of F table = 2.042 so F arithmetic > F table (3.653 > 2.042), Then H_0 is rejected and H_a accepted, meaning there is no effect of service and there is influence of service products to customer acceptance commitment at Bank BRI tigaraksa.

Keywords: services, products, services, Banks, customers

Abstrak - Bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan dipusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang. Pengambilan sampel semua populasi digunakan sebagai sampel sensus sebesar 30 responden, menggunakan skala pengukuran skala interval artinya menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya analisis statistiknya uji t dan uji korelasi dan regresi ganda multiple regression test. Perhitungan diperoleh angka korelasi antara Pengaruh pelayanan dan produk jasa terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa sebesar 0.353 korelasi sebesar 0.57 artinya Pengaruh pelayanan dan produk jasa secara simultan terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa cukup kuat dan searah (karena hasilnya positif), searah artinya jika Pengaruh pelayanan dan produk jasa tinggi maka komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa juga tinggi. Korelasi kedua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Besarnya angka R Square (r^2) sebesar 0.124 angka tersebut dapat digunakan untuk melihat antara Pengaruh pelayanan dan produk jasa terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa (koefisien determinan). Angka tersebut mempunyai maksud bahwa sebesar 124 % dan sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 24% .koefisien didapat dalam persamaan Regresi $Y = 29.792 + -0,091 + 0,236 + e$, uji hipotesis F hitung = 3,653, dibandingkan dengan F tabel yang menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai F tabel = 2,042 jadi F hitung > F tabel (3,653 > 2.042), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya tidak ada Pengaruh pelayanan dan ada pengaruh produk jasa terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa

Kata kunci: pelayanan, produk, jasa, Bank, nasabah

1.PENDAHULUAN

Bank dalam istilah ekonomi adalah sumber keuangan dimana perputaran keuangan dari masyarakat, dalam transaksi simpan pinjam.

Dengan keberadaan status penduduk dibuktikan dengan surat tanda penduduk / E-KTP acap kali permasalahan terutama surat keterangan E-KTP hal ini antara dunia jasa dengan birokrasi

mengalami distorsi prinsip, sehingga calon nasabah baru yang pada awalnya perlu dapat sambutan dari pihak pelayanan bank BRI ternyata sebaliknya.

Produk jasa pada tahun 2000 percepatannya pesat dalam dunia bisnis dari segi pelayanan semakin meningkat dan persaingan sangat pesat terutama dalam dunia perbankan.

Ketatnya penyaringa nasabah terutama penerimaan dan pelayanan di Bank BRI lebih berhati-hati dalam penerimaan nasabah dalam pendaftaran rekening baru hal ini bentuk dari teori dari penerimaan kredit baru yang disebut sifat kehati-hatian dari awal dalam hal tersebut apakah pergerakan dan perputaran aktifitas dalam mencapai target untuk pendapatan omzet dalam pertahunnya akan terkendala birokrasi hal ini pemicu dari kebijakan E-KTP blanko yang sudah habis ironisnya.

Denganketidak kepercayaan masyarakat ditunjang dengan isu blanko E-KTP yang kehabisan blanko kertas dilapisi plastik menjadi isu nasional sehingga berpengaruh pada dunia bisnis pelayanan jasa terutama Bank BRI Tigaraksa walaupun sudah ada kebijakan surat keterangan (suket) pihak tersebut tidak menerima atau menyakini adanya suket terutama ditunjang pada tidak ada tanda tangan pemilik KTP.

Hal ini penulis tertarik untuk mengambil tema dalam penelitian tersebut dengan tema Pengaruh pelayanan dan produk jasa terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa (studi kasus pelayanan pada nasabah baru dalam kependudukan suket dari catatan sipil).

Semua perusahaan harus mempunyai pelayan prima tak terkecuali perusahaan jasa keuangan dan retail yang menjual barang dan jasa yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Pelayanan prima (*excellent service*) adalah pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan sehingga dapat menimbulkan rasa puas pada pelanggan. Pelayan prima merupakan pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan pelanggan mengenai kualitas produk (barang atau jasa) sebaik-baiknya.

Pelayanan dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan hal pemberian kepuasan terhadap pelanggan, pelayanan dengan mutu yang baik dapat memberikan kepuasan yang baik pula bagi pelanggannya, sehingga pelanggan dapat merasa diperhatikan akan keberadaannya oleh pihak perusahaan. dalam bukunya yang bertajuk hubungan masyarakat membina hubungan baik dengan publik

Menurut Ratminanto dan Ati Septi Winarsih (2007:4-5) pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan dipusat, di daerah, dan di

lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang

Menurut Tjiptono (2006:6) Pelayanan/jasa adalah “ setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak

Sedangkan menurut Hurriyati (2010:27) Pelayanan/jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Dasar-dasar Pelayanan

Kosep dasar pelayanan menurut Kasmir. (2011:31) berdasarkan A6 yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan mendasarkan faktor-faktor sikap (*Attitude*) perhatian (*Attention*), tindakan (*Action*), kemampuan (*Ability*), penampilan (*Apprance*) dan tanggung jawab (*Accountability*)

1. Sikap (*Attitude*) adalah perilaku yang harus ditunjukkan ketika menghadapi pelanggan meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berfikir positif, sehat dan logis bersikap menghargai.
2. Perhatian (*Attention*) adalah kepedulian penuh kepada pelanggan baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dari keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan dan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan
3. Tindakan (*Action*) adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan, mengucapkan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali
4. Kemampuan (*Ability*) adalah pengetahuan dan keterampilan tertutup yang mutlak di perlukan untuk menunjang program pelayanan, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan mengembangkan public relation sehingga instrument dalam membawa hubungan kedalam dan keluar organisasi atau perusahaan
5. Penampilan (*Apprance*) adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik saja atau non fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain
6. Tanggung jawab (*Accountability*) adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan

atau menimalkan kerugian atau ketidakpastian pelanggan

Pelaksanaan layanan istimewa atau pelayanan prima oleh pihak perusahaan terhadap para pelanggan baik itu yang ditujukan untuk pelanggan intern maupun pelanggan ektern yang mempunyai peranan penting dalam bisnis karena kelangsungan perusahaan sangat tergantung dari loyalitas para pelanggan kepada perusahaan menurut Kasmir (2011:32)

1. Pelayanan bagi para pelanggan intern

Pelanggan intern adalah orang-orang yang terlibat dalam proses produksi barang dan atau jasa yang dihasilkan perusahaan mereka harus saling memberikan fasilitas baik kepada semua karyawan, bawahan maupun atasan dengan tujuan untuk mendukung kelancaran proses produksi barang dan atau jasa sehingga dapat menunjang kelangsungan perusahaan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima bagi pelayanan eksternal. Ada beberapa hal yang patut di perhatikan oleh segenap pelaku bisnis yaitu keharusan membudayakan pelayanan prima secara intern adalah kunci sukses yang mewujudkan pelayanan prima bagi pelanggan eksternal. Disebut sebagai keharusan karena bila pelayanan prima dilingkungan internal berlangsung baik maka akan dapat dijadikan sebagai tonggak dasar dalam mewujudkan pelayanan prima bagi lingkungan eksternal

2. Pelayanan bagi pelanggan eksternal

Kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan potensi pasar yang dapat dijadikan peluang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa yang kita sediakan. Dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan eksternal diharapkan ada peningkatan loyalitas pelanggan eksternal terhadap perusahaan sehingga dari waktu ke waktu perusahaan akan mampu memelihara dan meningkatkan penjualan barang dan jasa dan sekaligus dapat meraih keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

Karakteristik Pelayanan

Karakteristik pelayanan menurut Sunyoto (2012) dapat dibedakan menjadi empat, yaitu tidak berwujud (*intangibility*), tidak dapat dipisahkan (*inseparability*), heterogenitas (*heterogeneity*) dan cepat hilang dan permintaan yang fluktuasi (*perishability and fluctuating demand*).

1. Tidak terwujud

Pelayanan/jasa mempunyai sifat tidak terwujud karena tidak bisa dilihat, diraba, didengar atau dicium sebelum ada transaksi pembelian. Agar kepercayaan konsumen dapat ditingkatkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan/jasa yaitu:

1. Meningkatkan visualisasi pelayanan/jasa

2. Pemberian pelayanan/jasa tidak hanya menggambarkan siri-ciri suatu pelayanan/jasa, tetapi justru lebih menekankan manfaat dari jasa tersebut
3. Penataan fisik, harus menjurus pada pelayanan yang cepat dan efisien. Harus menimbulkan kesan yang bersih dan rapi
4. Penataan dokumentasi, harus dilakukan dengan penataan yang rapi, terjamin keamanannya dan efisien

2. Tidak dapat dipisahkan

Suatu bentuk pelayanan/jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber itu merupakan orang atau mesin, apakah sumber itu hadir atau tidak hadir produk fisik yang berwujud tetap ada.

3. Heterogenitas

Industri jasa atau penjual individu tidak mungkin mengadakan standarisasi output setiap unit jasa itu berbeda satu sama lain

4. Cepat hilang dan permintaan yang fluktuasi

Pelayanan/jasa itu cepat hilang dan tidak dapat disimpan dan penasarannya jasa itu berubah-ubah menurut musim, menurut jam, dan hari. Karena cepat rusak dan permintaan yang berubah-ubah, maka perlu adanya pengelolaan yang tepat.

Pengertian Produk Jasa

Pengertian produk menurut Kotler & Keller (2009:110), "sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan".

Sedangkan pengertian produk menurut Kasmir (2010:123), "sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen".

Produk Kasmir (2011:106) "produk adalah keseluruhan konsep atas objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen".

Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk saja, tetapi membeli manfaat dan nilai dari produk tersebut yang disebut "*the offer*". Utamanya pada produk jasa, tidak dikenal munculnya peralihan kepemilikan dari penyediaan jasa kepada konsumen. Yang dimaksud dalam pembahasan produk disini adalah total produk. Konsep tersebut dikenal sebagai Konsep Total Produk yang terdiri atas:

1. Produk inti/generik (*core product*)
2. Produk yang diharapkan (*expected product*)
3. Produk tambahan (*augmented product*)
4. Produk potensial (*potensial product*)

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen dan dapat ditawarkan kepada konsumen atau nasabah yang didalamnya

akan memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau nasabah.

Karakteristik Produk Jasa

Dalam hal dunia perbankan dimana produk yang dihasilkan berbentuk jasa, maka akan dijelaskan ciri-ciri atau karakteristik dari produk jasa. Adapun ciri-ciri atau karakteristik produk jasa adalah sebagai berikut:

1. Tidak berwujud (*Intangibility*)
Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, artinya jasa tersebut tidak dapat dirasakan atau dinikmati sebelum jasa tersebut dibeli atau dimiliki.
2. Tidak dapat dipisahkan (*inseparability*)
Jasa pada umumnya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan dengan partisipasi konsumen dalam prosesnya.
3. Bervariasi atau heterogenitas (*variability*)
Jasa dapat diperjualbelikan dalam berbagai bentuk.
4. Tidak tahan lama (*perishability*)
Jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan atau inventori.

Sebagian besar jasa bukanlah jasa murni, oleh karena itu menggunakan kata "*the offer*" yang dapat menghilangkan kerancuan. Sebuah "*offer*" dapat divisualisasikan sebagai atom dengan sebuah inti bagian tengah, yang dikelilingi tampilan atau fitur yang berwujud atau tidak berwujud.

Nasabah atau pelanggan

Pengertian kebutuhan manusia (Nasabah) menurut Kasmir (2010:53) "adalah suatu keadaan dimana dirasakan tidak ada dalam diri seseorang, seperti kebutuhan akan rasa aman, lapar, haus, dan kebutuhan lainnya"

Dalam dunia perbankan Kasmir. 2011:75) "pelanggan dapat diartikan nasabah, pelanggan/nasabah adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna produk"

Menurut Nina Rahmayanty (2010:23) "pelanggan adalah setiap orang, unit atau pihak dengan siapa kita bertransaksi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan produk"

Kebutuhan Nasabah

Pengertian kebutuhan nasabah Bank adalah suatu keadaan yang dirasakan tidak ada dalam diri seseorang. Dalam praktiknya kebutuhan konsumen atau nasabah menurut Kasmir (2010:56) diantaranya :

1. Kebutuhan akan produk atau jasa Bank
2. Kebutuhan rasa aman berhubungan dengan Bank
3. Kebutuhan kenyamanan berhubungan dengan Bank
4. Kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh seluruh karyawan Bank
5. Kebutuhan untuk persahabatan dan keakraban
6. Kebutuhan untuk diberi perhatian oleh seluruh karyawan Bank
7. Kebutuhan status/*prestise*
8. Kebutuhan aktualisasi diri

Keinginan Nasabah

Keinginan nasabah Bank merupakan kebutuhan yang dibentuk oleh kultur kepribadian individu. Keinginan nasabah Bank menurut Kasmir (2010:56) antara lain:

1. Ingin memperoleh pelayan yang cepat.
2. Ingin agar Bank bisa menyelesaikan masalah yang sedan dihadapi.
3. Ingin memperoleh komiten Bank.
4. Ingin memperoleh pelayanan yang bermutu (cepat dan memuaskan).
5. Ingin memperoleh kepuasan nasabah atas layanan yang diberikan.
6. Ingin dihargai dan dihormati oleh seluruh karyawan Bank.
7. Ingin memperoleh perhatian oleh seluruh karyawan Bank.
8. Ingin memperoleh status/*prestise*.
9. Ingin memperoleh keamanan dari setiap transaksi yang berhubungan dengan Bank.

II.METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan sampling jenuh artinya pengambilan sampel semua populasi digunakan sebagai sampel sensus, menggunakan skala pengukuran skala interval artinya menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya analisis statistiknya uji t dan uji korelasi dan regresi ganda multiple regresion test.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Regresi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.353 ^a	.124	.057	4.50504	.124	1.848	2	26	.178	2.055

a. Predictors: (Constant), produk, pelayanan

b. Dependent Variable: komitmen penerimaan nasabah

Sumber data diolah menggunakan SPSS versi 16.00

Tabel 2. Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	75.009	2	37.504	1.848	.178 ^a
	Residual	527.681	26	20.295		
	Total	602.690	28			

a. Predictors: (Constant), produk, pelayanan

b. Dependent Variable: komitmen penerimaan nasabah

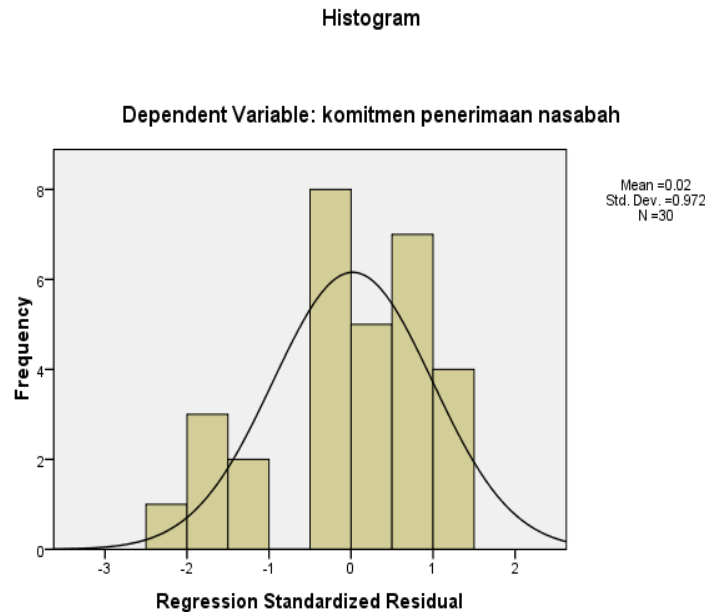
Sumber data diolah menggunakan SPSS versi 16.00

Tabel 3. Uji Persamaan Statistik
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	29.792	5.527		5.390	.000					
	pelayanan	-.091	.229	-.079	-.396	.695	.066	-.077	-.073	.851	1.175
	produk	.256	.136	.376	1.888	.070	.345	.347	.347	.851	1.175
2	(Constant)	28.159	3.620		7.779	.000					
	produk	.236	.123	.345	1.911	.067	.345	.345	.345	1.000	1.000

a. Dependent Variable: komitmen penerimaan nasabah

Sumber data diolah menggunakan SPSS versi 16.00



Sumber data diolah menggunakan SPSS versi 16.00

Gambar 1. Histogram distribusi frekuensi

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara Pengaruh pelayanan dan produk jasa terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa sebesar 0.353 korelasi sebesar 0.357 artinya Pengaruh pelayanan dan produk jasa secara simultan terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa cukup kuat dan searah (karena hasilnya positif), searah artinya jika Pengaruh pelayanan dan produk jasa tinggi maka komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa juga tinggi. Korelasi kedua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Besarnya angka R Square (r^2) sebesar 0.124 angka tersebut dapat digunakan untuk melihat antara Pengaruh pelayanan dan produk jasa terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa (koefisien determinan). Angka tersebut mempunyai maksud bahwa sebesar 124 % dan sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 24% .

Dari tabel koefisien dapat dikatakan:

1. persamaan Regresi

$$Y = 29.792 + -0,091 + 0,236 + e$$

$Y = 29,792$ artinya jika tidak ada Pengaruh pelayanan dan produk jasa dapat ditingkatkan sebesar satu kesatuan, dengan asumsi terhadap komitmen penerimaan nasabah bertambah pada Bank BRI tigaraksa.

$X_1 = -0,091$ artinya jika tidak ada Pengaruh pelayanan ditingkatkan sebesar satu kesatuan, dengan asumsi terhadap komitmen penerimaan nasabah berkurang pada Bank BRI tigaraksa

$X_2 = 0,640$ jika Pengaruh produk jasa ditingkatkan sebesar satu kesatuan, dengan

asumsi dalam terhadap komitmen penerimaan nasabah bertambah pada Bank BRI tigaraksa.

2. Hasil uji hipotesis

F hitung = 3,653, dibandingkan dengan F tabel yang menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai F tabel = 2,042 jadi F hitung > F tabel ($3,653 > 2,042$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya tidak ada Pengaruh pelayanan dan ada pengaruh produk jasa terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa

IV.KESIMPULAN

Pengaruh pelayanan dan produk jasa terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa sebesar 0.353 korelasi sebesar 0.57 artinya Pengaruh pelayanan dan produk jasa secara simultan terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI Tigaraksa cukup kuat dan searah (karena hasilnya positif), searah artinya jika Pengaruh pelayanan dan produk jasa tinggi maka komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa juga tinggi. Korelasi kedua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$,

1. Besarnya angka R Square (r^2) sebesar 0.124 angka tersebut dapat digunakan untuk melihat antara Pengaruh pelayanan dan produk jasa terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa (koefisien determinan). Angka tersebut mempunyai maksud bahwa sebesar 124 % dan sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 24%,

2. $F_{hitung} = 3,653$, dibandingkan dengan F_{tabel} yang menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai $F_{tabel} = 2,042$ jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3,653 > 2,042$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya tidak ada Pengaruh pelayanan dan ada pengaruh produk jasa terhadap komitmen penerimaan nasabah pada Bank BRI tigaraksa.

REFERENSI

- Ida, Nuraida. 2014. Manajemen Administrasi Perkantoran. Edisi Revisi . Yogyakarta: Kanisius
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. 2009. Manajemen Pemasaran. (Jilid 2 edisi Ketiga Belas) Terjemahan Bob Sabran, MM. Jakarta: Erlangga
- Kasmir. 2011. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Kasmir. 2011. Etika Customer Service. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Kasmir. 2010. Pemasaran Bank. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group
- Rahmayanty, Nina. 2014. Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Sunyoto, Danang. 2012. Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran. Yogyakarta : CAPS.
- Tjiptono (2006) Tjiptono, Fandi. 2008. Pemasaran Jasa. Edisi Pertama. Malang : Banyumedia

PROFIL PENULIS

Nurhadi adalah dosen tidak tetap dilembaga Yayasan Bina Sarana Informatika Group selama aktif menjadi pengajar di AMIK BSI Tangerang jl-Gatot Subroto Km 08 Cimone Kecamatan Karawaci Tangerang Banten, aktif dikeorganisasian Lembaga swadaya masyarakat pesisir terutama terumbu karang dan ekosistem perairan selat sunda. Selama karirnya pendidikan dilembaga yayasan Binasarana Informatika Group telah beberapa menulis jurnal dan prosiding dan sebagai pemerhati lembaga keuangan terutama bagi masyarakat yang membutuhkan penambahan biaya untuk melebarkan usaha.

Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Secara Global

Seno Sudarmono Hadi
Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Akademi Manajemen Informatika & Komputer BSI Jakarta
Jl. RS. Fatmawati No. 24 Pondok Labu Jakarta
seno.ssh@bsi.ac.id

Abstract – Indonesia's economic growth is so rapid at the end of this end result in the inflation rate. As happened in the last six years was recorded inflation increases quite dramatically from the year 2009 of 2.78 to 5.50 in the year 2014, despite declines in terjadi flktuasi rising inflation. Inflation is the impact of terjadinya increase perekonomian growing on a country by increasing the economic growth of trading activities or buying and selling increased as the supply increases of businesses or producers resulting in an increase of more than buyers or consumers to shop, resulting in price increases of some good product ata goods market services. One way to anticipate the growing inflationary policy, the government is supposed to do parties with Binga rate policy in this regard should be made the monetary authorities in Indonesia, Bank Indonesia. With interest rate policy is expected minimal rate of inflation can be prevented to a lower level so that people can enjoy the products at a more affordable price so that the prosperity of the people can be achieved.

Keywords: Interest Rates, Inflation, Economic Growth

I. PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan sering kita jumpai pada hampir semua negara adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kecenderungan harga yang cenderung mengalami kenaikan terus menerus, secara umum dan terjadi dalam waktu yang lama atau terus- menerus. Jika terjadi kenaikan harga hanya terjadi pada berbagai barang tidak bisa disebut sebagai inflasi, tetapi jika kenaikan harga hampir terjadi pada semua barang yang diperjual belikan dimasyarakat dan terjadi pada kurun waktu yang cukup lama baru keadaan tersebut disebut inflasi.

Salah satu hal untuk mengantisipasi inflasi yang berkelanjutan atau hyper inflasi adalah kebijakan tingkat suku bunga yaitu menaikkan tingkat suku bunga pada saat terjadi inflasi. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank Sentral, maka akan direspon oleh para pelaku pasar dan para penanam modal untuk memanfaatkan moment tersebut guna meningkatkan produksi dan menanamkan investasinya. Seiring dengan itu, akan berdampak juga pada jumlah produksi yang bertambah dan tenaga kerja yang juga akan semakin bertambah. Akibatnya ekspor bertambah dan jumlah pengangguran menurun, sehingga devisa yang masuk ke negara tersebut semakin menguatkan dollar terhadap mata uanglain. Demikian pula sebaliknya, bila saja suku bunga menurun, produksi industri akan berkurang karena produsen akan membatasi kerugian. Apabila jumlah produksi berkurang, maka akan melemahkan mata uang tersebut.

Kenaikan suku bunga sangatlah dikhawatirkan oleh para kreditur dan tingkat penjualan perumahan yang semakin menurun karena membuat pajak pinjaman modal dan kredit perumahan semakin meningkat,

tanpa didukung dalam kelancaran produksi dan bisnis yang menunjang akan berimbas. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai dalam menaikkan dan menurunkan suku bunga yang semuanya harus berpihak pada kesejahteraan rakyat dalam negeri Dampak ekonomi dari sebuah perubahan tingkat suku bunganya diantaranya akan berpengaruh terhadap:

1. GDP (Gross Domestik Product)

Sebagai indikator tingkat kesehatan atas pertumbuhan ekonomi suatu negara. GDP merupakan indeks utama sistem akun nasional (*Sistem of National Accounts - SNA*) yang dikarakteristik oleh hasil final dari kesatuan aktifitas program perekonomian, penduduk, dan pengukuran biaya barang dan jasa, yang diproduksi kesatuan untuk penggunaan akhir. GDP adalah indeks utama, yang menunjukkan kondisi ekonomi nasional. GDP adalah indikator produk manufaktur, yang berjumlah pada biaya produksi bersifat final terhadap barang dan jasa. Ini berarti, biaya barang dan jasa lanjutan, yang digunakan dalam produksi (seperti barang mentah, bahan-bahan, bahan bakar, bibit, makanan ternak, layanan pengangkutan udara, harga grosir, layanan komersil dan finansial, dll) tidak termasuk dalam GDP. Jika tidak, GDP akan mengandung akun berulang. Selain itu, GDP adalah produk domestik, karena diproduksi oleh penduduk. Penduduk adalah kesatuan ekonomi (usaha maupun rumah tangga), dengan mengabaikan indentitas nasional dan kewarganegaraannya, yang memiliki suku bunga ekonomi dalam wilayah ekonomi negara.

2. Kredit Untuk Kepemilikan Perumahan Rakyat

Pengadaan perumahan merupakan bagian terpenting

dalam menunjang kesejahteraan hidup manusia, pentingnya data ini terletak pada kemampuannya untuk memicu perubahan kondisi perekonomian, memprediksi perubahan tingkat pertumbuhan. Turunnya jumlah unit perumahan yang baru dapat memperlambat perekonomian dan mendorong ke arah resesi. Sebaliknya, peningkatan pada jumlah unit perumahan yang baru dapat mengindikasikan adanya tumbuhnya perekonomian dalam suatu negara

3. Tingkat Pengangguran (*Unemployment Rate*)

Dampak yang harus diperhatikan dalam kebijakan naik-turunnya tingkat suku bunga apakah semakin meningkatkan peluang usaha dan peluang kerja atau malah justru meningkatkan pengangguran dan PHK dan perlu diketahui, pengangguran dapat terjadi akibat ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga hanya sedikit yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja.

Disisi lain, suku bunga adalah harga yang harus dibayar oleh pihak bank atau peminjam lainnya untuk memanfaatkan uang selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga itu merupakan balas jasa yang akan diterima kemudian atas pengorbanan yang dilakukan atau kata lain suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau sebagai sewa penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu.

Pada prinsipnya suku bunga adalah harga atau penggunaan uang atau sebagai sewa atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu, yang mengumumkan dalam 'persentase'. Setiap masyarakat (atau investor) yang melakukan interaksi dengan bank, baik interaksi dalam bentuk simpanan, maupun pinjaman (kredit), akan selalu terkait dan dikenakan dengan yang namanya bunga. Bagi masyarakat (atau investor) yang menanamkan dananya pada bank, baik itu simpanan tabungan, deposito dan giro akan diberikan suku bunga simpanan (dalam bentuk %). Suku bunga ini merupakan rangsangan dari bank agar masyarakat mau menanamkan dananya pada bank. Semakin tinggi suku bunga simpanan, maka masyarakat akan semakin giat untuk menanamkan dananya pada bank, dikarenakan harapan mereka untuk memperoleh keuntungan. Dan begitu sebaliknya, semakin rendah suku bunga simpanan, maka minat masyarakat atau investor dalam menabung akan berkurang sebab masyarakat berpandangan tingkat keuntungan yang akan mereka peroleh di masa yang akan datang dari bunga adalah sangat kecil.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK

telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan *international best practice* antara lain:

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. Penjelasan lebih detail mengenai IHPB dapat dilihat pada web site Badan Pusat Statistik

2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)

Menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan. Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose - COICOP*), yaitu :

- a. Kelompok Bahan Makanan
- b. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
- c. Kelompok Perumahan
- d. Kelompok Sandang
- e. Kelompok Kesehatan
- f. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
- g. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan Inflasi, Kebijakan Fiskal dan Moneter, serta Peran BI dalam menanggulangi terjadinya inflasi yang bersumber pada buku kepustakaan, brosur dan internet.

III. PEMBAHASAN

Pengertian Bank menurut Kasmir, (2008:135) mengatakan bahwa bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Suku bunga merupakan salah satu faktor yang cukup menarik bagi pemilik dana untuk menyimpan

uangnya pada suatu bank. Tingkat suku bunga yang diberikan hendaknya dapat bersaing dengan tingkat suku bunga yang diberikan bank lain. Tingkat suku bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah yang dipinjamkan dan dengan dasar tahunan (annual basis/perannum).

Menurut Kasmir, (2008:136), dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

1. Bunga Simpanan

Adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh: jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contoh bunga kredit. Suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah peminjam (debitur).

Agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal, maka pihak manajemen bank harus pandai dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga. Menurut Kasmir (2008:137-140), faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dana

Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga simpanan akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban.

2. Target Laba yang diinginkan

Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Karena jika diinginkan laba usaha meningkat maka pihak perbankan akan menaikkan tingkat suku bunganya.

3. Kualitas Jaminan

Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid jaminan

(mudah dicairkan) yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

4. Kebijakan Pemerintah

Dalam menentukan baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan atau pagu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia

5. Jangka Waktu

Faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, bunganya relatif rendah.

6. Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil.

7. Produk yang Kompetitif

Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar.

8. Hubungan Baik

Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama dan nasabah biasa. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan kepada bank. Nasabah yang memiliki hubungan baik dengan bank tentu penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

9. Persaingan

Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Untuk bunga pinjaman, harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan, meskipun margin laba mengecil.

10. Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya apabila pihak yang memberikan jaminan bonafide, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitasnya

terhadap bank, bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Begitu pun sebaliknya.

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan *Inflation Targeting Framework* (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (*Base Money*) sebagai sasaran kebijakan moneter.

Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara *forward looking*, artinya perubahan *stance* kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, *stance* kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (*BI Rate*) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi *output* dan inflasi.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan *aggregat* (*demand management*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Sementara inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (*shocks*) seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok *volatile food* dan *administered prices* yang mencakup kurang lebih 40% dari bobot IHK.

Dengan demikian, kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi sangat terbatas apabila terdapat kejutan (*shocks*) yang sangat besar seperti ketika terjadi kenaikan harga BBM di tahun 2005 dan 2008 sehingga menyebabkan adanya lonjakan inflasi.

Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan (*shocks*) dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut.

Dalam tataran teknis, koordinasi antara pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan departemen teknis terkait di Pemerintah seperti Departemen Keuangan, Kantor Menko Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Ke depan, koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran

inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi tahun 2013, 2014, dan 2015 tanggal 30 April 2012 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2013 – 2015, masing-masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4% masing-masing dengan deviasi $\pm 1\%$.

Sasaran inflasi diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang rendah dan stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia akan senantiasa berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan tersebut melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi tersebut. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu (*anchor*) pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan

Adapun Tabel Inflasi dari Periode Juli 2015 sampai dengan Februari 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Inflasi Periode Juli 2015- Februari 2017

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
Februari 2017	3.83 %
Januari 2017	3.49 %
Desember 2016	3.02 %
Nopember 2016	3.58 %
Oktober 2016	3.31 %
September 2016	3.07 %
Agustus 2016	2.79 %
Juli 2016	3.21 %
Juni 2016	3.45 %
Mei 2016	3.33 %
April 2016	3.60 %
Maret 2016	4.45 %
Februari 2016	4.42 %
Januari 2016	4.14 %
Desember 2015	3.35 %
Nopember 2015	4.89 %
Oktober 2015	6.25 %
September 2015	6.83 %
Agustus 2015	7.18 %
Juli 2015	7.26 %

Sumber: BPS (2017)

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia.

Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, *shocks* terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*). Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap *shocks* tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat.

Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Menurut Hartojo Wignyowiyoto mengemukakan adanya faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga antara lain:

1. Persepsi Masyarakat Tentang Waktu (*Time Frame Preference*)

Semakin banyak masyarakat percaya akan hari esok maka akan semakin rendah tingkat suku bunga, sebaliknya semakin tidak percayanya akan adanya hari esok, maka tingkat suku bunga akan semakin tinggi

2. Pengaruh Teknologi Terhadap Inflasi

Semakin luas penggunaan teknologi semakin efisien cara kerja masyarakat dan harga akan menjadi lebih rendah dan suku bunga menjadi turun

3. Unsur Keterdesakan Waktu Mendapatkan Dana

Dalam situasi pelunasan uang tunai mendadak, maka dana yang ditawarkan suku bunganya akan semakin tinggi

4. Dana Masyarakat

Dalam situasi dana yang sangat langka sementara permintaan pasar naik, maka kemungkinan tingkat suku bunga bank cenderung akan mengalami

Menurut Hartojo Wignyowiyoto mengemukakan adanya faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga antara lain

1. Persepsi Masyarakat Tentang Waktu (*Time Frame Preference*)

Semakin banyak masyarakat percaya akan hari esok maka akan semakin rendah tingkat suku bunga, sebaliknya semakin tidak percayanya akan adanya hari esok, maka tingkat suku bunga akan semakin tinggi

2. Pengaruh Teknologi Terhadap Inflasi

Semakin luas penggunaan teknologi semakin efisien cara kerja masyarakat dan harga akan menjadi lebih rendah dan suku bunga menjadi turun

3. Unsur Keterdesakan Waktu Mendapatkan Dana

Dalam Situasi pelunasan uang tunai mendadak, maka dana yang ditawarkan suku bunganya akan semakin tinggi

4. Dana Masyarakat

Dalam situasi dana yang sangat langka sementara permintaan pasar naik, maka kemungkinan suku bunga cenderung akan mengalami kenaikan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingginya suku bunga adalah:

1. Adanya Inflasi

Suku bunga terkait dengan harga barang dan tinggi rendahnya Inflasi, sebab suku bunga rendah maka JUB akan bertambah dan kreditpun murah. Sehingga tidak mungkin suku bunga akan turun jika tingkat inflasi tinggi.

2. Otoritas Moneter

Dunia usaha sebaiknya mengalahkan otoritas moneter. Dengan membandingkan suku bunga tinggi sebagai sumber ketidakmampuan mereka dipasar internasional dengan suku bunga yang berlaku

3. Korupsi Dan Kolusi

Dengan adanya korupsi maka jumlah uang yang didapat akan digunakan untuk dibelanjakan pada waktu dekat, timbulnya korupsi dan kolusi disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pasar terutama pengusaha yang baru yang belum memiliki pengalaman memasuki bisnis

4. Tingkat Urbanisasi

Proses urbanisasi yang pesat mendorong inflasi yang menyebabkan suku bunga yang meningkat, karena para urban tidak dibarengi prasarana yang memungkinkan membuat barang karena banyak permintaan akan kredit bank

5. Penggunaan Kapasitas Produksi Yang Optimal

Di Indonesia penggunaan kapasitas produksi baru sepertiga, dari kapasitas yang seharusnya namun kapasitas yang menganggur harus tetap dibiayai, selain itu rendahnya dalam berorganisasi mengakibatkan jabatan ketua lebih banyak diduduki dari pelaku lapangan yang mengatur lebih banyak dari yang bekerja

6. Ketidak Efisienan Dunia Usaha

Tingkat suku bunga yang tinggi oleh sektor riil dari pada sektor moneter, sehingga mengakibatkan tingkat suku bunga terus merangkak ketinggian yang lebih besar

Akibat tingginya suku bunga berdampak pada masalah perekonomian sebagai berikut:

1. Dana asing masuk untuk mendapatkan tingkat keuntungan
2. Menghambat perekonomian nasional sebab tingginya suku bunga, maka peklaku bisnis enggan mengajukan kredit ke bank dan pada akhirnya kegiatan perekonomian menjadi lesu.
3. Kesulitan dalam mengembangkan usaha karena tingkat suku bunga yang tinggi pengusaha sulit mendapatkan dana dengan agunan yang lebih besar

Dampak terhadap perekonomian akibat dari suku bunga yang rendah adalah:

1. Negara akan terjadi penurunan pendapatannya
2. Muncul adanya inflasi

Suatu kenaikan dalam tingkat penawaran uang akan menciptakan kenaikan penawaran uang pada tingkat mula-mula, Individu akan mencoba mengurangi saldo uang pada tingkat bunga mula mula, sementara individu dapat mengurangi uang dalam portofolio

Masyarakat sebagai suatu keseluruhan harus memegang penawaran uang yang dinaikkan. Uang itu ada sehingga seseorang harus memegangnya, Kalau perlu transaksi tidak mengharapkan untuk memegang penawaran uang yang dinaikkan itu pada tingkat bunga yang ada untuk membentuk keseimbangan Individu mencoba untuk mengurangi saldo uang mereka dengan menggunakan uang untuk membeli assets finansial, barang konsumsi serta investasi. Jika suatu obligasi memberikan uang pada pemiliknya setiap tahunnya, karena hasil obligasi turun, maka tingkat bunga juga mengalami penurunan.

Kebijakan Moneter menurut Iswardono SP (1995:3), memiliki tujuan paling utama adalah:

1. Masyarakat menginginkan antara barang dan jasa yang diprimistikoduksi sama dengan kapasitas produksinya. Dengan perkataan lain “ *Actual GNP Should Equal Potential GNP*” baik untuk tenaga kerja, capital dan tanah seharusnya diolah para entrepreneur untuk menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting terhadap sumbangannya terhadap pendapatan, sehingga pencapaian tingkat GNP yang tinggi sehingga secara dapat mencerminkan rendahnya tingkat angka pengangguran
2. “ *A Stable Price On at Least a Constant and Pradictable rate of Inflation*” ada suatu kepercayaan. Suatu yang diperkirakan tidak akan t bakal akan terjadi memberikan dampak pada misallocation sumber daya ekonomi, demikian juga dengan laju inflasi yang tidak akan berdampak pada perekonomian tetapi juga akan memiliki dampak pada bidang social dan juga bidang politik.

3. *A Light Rate of Growth of Output* yang dapat dicapai melalui efisiensi atau penghematan. Pada dasarnya perluasan efisiensi terjadi dikarenakan meningkatnya tingkat tabungan masyarakat serta para investor mendapatkan hasil yang sangat tinggi.

Pengangguran yang terjadi dijelaskan oleh teori klasik dengan adanya ketegaran dalam suatu perekonomian khususnya ketegaran upah dan immobilitas buruh yang akan berdampak pada ketegaran yang akan dapat memberikan jaminan bekerjanya fungsi ekonomi secara otomatis untuk menuju *full employment* (FE).

Permasalahan yang terjadi pembuatan kebijakan tentang kesalahan ketegaran upah dan immobilitas buruh.

Pada tahun 1930 teori moneter lebih dikaitkan pada harga dari pada tingkat pendayagunaan yang secara luas tidak mampu membuat kebijakan. Penekanan harga oleh para ahli monetaris terhadap masuknya output dan tenaga kerja .

Alternatif lain adalah tentang pengangguran persisten yang menjurus dengan identifikasi beberapa karakteristik khusus dari suatu perekonomian yang akan menjaga pencapaian FE secara otomatis bahkan jika upah dan harga sangat fleksibel dan menekankan pada peranan ketidak-tentuan dan pengharapan pada suatu perekonomian dan masalah akibat informasi.

Keynes mencoba membentuk teori tentang output dan tenaga kerja yang akan menganalisis perilaku pada saat ini dalam pengaruh perubahan ide tentang masa yang akan mendatang

Uang memiliki peranan yang penting karena uang merupakan *substel device* untuk menghubungkan saat ini dan masa yang akan datang

Menurut Keynes dalam suatu perekonomian yang tidak seimbang (*Disequilibrium*) memungkinkan para pembuat transaksi yang pesimistik dapat berlaku sebagaimana mereka tidak dapat berusaha untuk membeli output dimana perekonomian mampu untuk memproduksi dan tidak ada suatu tingkat harga dan upah yang fleksibel dapat membiarkan perilaku ini, dengan kata lain penurunan tingkat upah tidak akan mencapai *full employment* (FE) sehingga diperkirakan bahwa hanya dengan rangsangan eksternal terhadap permintaan dapat dan mampu menghilangkan pengangguran misal.

Jalur kebijakan moneter antara jumlah uang tingkat pendapatan nasional atau perubahan tingkat JUB akan dapat mempengaruhi perubahan tingkat pendapatan nasional Bukrti secara empiris bahwa jalur kebijakan moneter yang dapat dipergunakan antara lain suku bunga, pagu dari kredit atau pinjaman serta kekayaan yang dimiliki masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Fenomena keadaan suku bunga yang tinggi secara bertahap mulai menurun ini sangat diharapkan banyak pihak, karena tingkat suku bunga yang tinggi di Indonesia saat ini sangat sulit dicari jalan keluarnya karena menyangkut berbagai aspek kegiatan perekonomian pada bidang-bidang lainnya. Kesulitan yang dihadapi untuk mendapatkan situasi terbaik banyak diutarakan banyak ahli, tetapi solusi yang ditawarkan banyak pro dan kontra.

Adapun solusi yang disarankan berhubungan dengan tingginya tingkat suku bunga adalah:

1. Penurunan tingkat suku bunga
2. Perbaikan dalam sistem moneter dan riil secara berkesinambungan
3. Menahan laju inflasi
4. Menanggulangi korupsi dan kolusi

Kita semua berharap serta berkeinginan agar kegiatan perekonomian Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tingkat bunga yang beranjak turun secara stabil dapat memperlancar transaksi perekonomian di Indonesia. Sebenarnya kenaikan suku bunga dari suatu sisi baik untuk menyerap dana dari luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai sumber dana untuk melakukan investasi.

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh sebab itu kebijaksanaan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi secara makro yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas tingkat harga barang sangat tinggi, stabilitas tingkat harga kebutuhan sehari-hari serta pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran.

Sasaran itu akan tercapai secara maksimal dan serempak atau dengan kata lain kebijakan moneter diharapkan dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tingkat pengangguran dan inflasi yang cukup rendah serta tumbuhnya serta tercapainya tingkat keseimbangan neraca pembayaran yang cukup mantap.

REFERENSI

- Boediono. 2001. *Ekonomi Makro (Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2)*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Iswardono SP .1995 *Kapita Selekta Ekonomi Moneter*. Jakarta:Gunadarma
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Cetakan 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nasution, Mulia.1998. *Ekonomi Moneter Uang Dan Bank*. Jakarta: Djambatan

Nopirin. Ekonomi .2008. Moneter. Yogyakarta:
BPFE UGM.

Sukirno, Sadono. 2004. Makro Ekonomi. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.

Wijaya, Faried dan Hadiwigeno.1992. Soetatwo.
Ekonomi Moneter Dan Perbankan. Yogyakarta:
BPFE UGM.

PROFIL PENULIS

Lahir Di Sleman Yogyakarta Tanggal 04 Januari
1968, Alumni Strata Satu FE Jurusan Manajemen
Perusahaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Starata Dua Program Magister Manajemen
Universitas Gunadarma Jakarta. Staff Akademik
Atau Dosen Tetap AMIK Bina Sarana Informatika (
AMIK BSI) Jakarta Sejak Tahun 1999

Mengajar Di Beberapa perguruan Tinggi Di Jakarta
diantaranya FE Universitas Gunadarma, AMIK BSI
Jakarta Dan STMIK Nusa Mandiri Jakarta.